

# KEDAULATAN PANGAN

Merdeka Pangan, Sandang, dan Papan



Rumusan Hasil  
Kongres Kebudayaan Desa  
1 Juni-15 Agustus 2020



# KEDAULATAN PANGAN

Merdeka Pangan, Sandang, dan Papan

**Webinar Seri 7**  
**Kongres Kebudayaan Desa 2020**  
**1-10 Juli 2020**



## **KEDAULATAN PANGAN**

**Merdeka Pangan, Sandang, dan Papan**

**© Sanggar Inovasi Desa 2020**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-undang**

**Diterbitkan oleh Sanggar Inovasi Desa 2020**

**Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93, Panggunharjo,  
Yogyakarta**

**Web: [www. sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)**

**Penanggung jawab : Faiz Ahsoul**

**Penyunting : Dwi Cipta**

**Penyelia aksara : Suhairi Ahmad**

**Desain dan ilustrasi sampul : Ketjilbergerak, Arif Gunawan, Agus Teriyana**

**Tata letak : Fitriana Hadi**

**Cetakan pertama, Agustus 2020**

**xxxviii, 160 hal., 13x19cm.**

**ISBN :**

**Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.**



## Pengantar Editor

Dwi Cipta

Memasuki pintu gerbang tahun 2020, kehidupan dunia yang gegap-gempita memasuki fase hening yang mengerikan. Orang-orang mengurangi sebagian besar aktivitasnya di luar rumah akibat ketakutan tertular wabah Covid-19 saat berinteraksi dengan orang lain. Dampak dari dibatasinya secara radikal aktivitas di luar rumah ini sungguh di tak pernah diperkirakan sebelumnya: dunia usaha ambruk, rumah ibadah sepi jamaah, pertunjukan seni dan

budaya lenyap, dan pemerintahan di seluruh dunia kalang kabut menghadapi virus Covid-19.

Sekitar dua bulan sejak virus Corona (Sars-Cov-2) mengguncang Cina dan mulai menyebar ke berbagai negara, *Food and Agriculture Organization* (FAO) memprediksikan kemungkinan terjadinya ancaman krisis pangan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Peringatan FAO ini berangkat dari dua hal. *Pertama*, kenyataan timpangnya produksi pangan baik antara satu wilayah dengan wilayah lain dalam suatu negara maupun antara sebuah negara dengan negara lain. *Kedua*, akibat terhambatnya rantai pasokan pangan karena diberlakukannya pembatasan mobilitas barang dan manusia untuk mencegah persebaran penyakit lebih luas lagi.

Peringatan tentang ancaman krisis pangan dari FAO tersebut memaksa kita untuk mengukur sampai sejauh mana bisa bertahan menghadapi pandemi Covid-19 dan krisis multidimensional yang mengikutinya. Gambaran umum tentang kesiapan Indonesia menghadapi ancaman krisis pangan sungguh mengkhawatirkan. Banyak daerah di Indonesia saling mengandalkan hasil produksi daerah lain untuk memenuhi kebutuhannya. Di samping itu, Indonesia masih tergantung pada bahan pangan impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sampai akhir November 2018, misalnya, Indonesia telah mengimpor gandum sebanyak 9,2 juta ton, 2,4 juta ton kedelai, 2,2 juta ton beras, 2,5 juta ton garam dan 4,6 juta ton gula.



Terhambatnya distribusi pangan akibat pandemi Covid-19 membuat harga komoditas bahan pangan menjadi tidak menentu. Pada awal pemberlakuan PSSB, misalnya, produsen kangkung dari Malang maupun distributornya (pedagang) tidak bisa memasok kangkung ke Surabaya. Kasus yang sama juga terjadi dengan dibuangnya hasil panen tomat di Garut karena harganya anjlok dan dibagi-bagikannya hasil sayuran para petani Ungaran (Jawa Tengah) yang khawatir hasil panennya membusuk karena tidak laku dijual di pasar sayur. Berdasarkan aplikasi cek harga pasar milik Kementerian Pertanian, SIHARGA, harga cabe merah keriting di berbagai pasar di Yogyakarta yang sebelumnya mencapai Rp. 70.000/ kg pada awal bulan Februari 2020 turun drastis menjadi Rp. 17.500/kg pada April 2020, sementara di tingkat petani harga cabe merah keriting hanya Rp. 7.000,00 per kilogram per 30 April 2020. Sementara di tempat lain, terutama di kota-kota yang tidak memiliki lahan pertanian yang bisa menyuplai kebutuhan sayur dan bahan pangan sehari-hari mereka, harga komoditas tersebut melambung tinggi.

Berkebalikan dengan anjloknya harga komoditas pangan di pusat-pusat produksinya, di wilayah yang berjauhan dengan pusat produksi untuk komoditas yang sama harganya justru meroket. Kasus naiknya harga komoditas pangan di kota-kota besar dan daerah luar Jawa adalah contoh paling jelas dari fenomena ini. Situasi semacam ini menyebabkan baik desa dan kota sama-sama sedang terjebak dalam ancaman krisis pangan.



## **Selubung Ketidakberdaulatan Pangan dan Bencana Lingkungan yang Mengikutinya**

Pandemi Covid-19 secara tak terduga menyingkap selubung ketidakberdaulatan kita di bidang pangan yang dalam kondisi normal tidak begitu terasa. Sembari menjalani masa-masa isolasi dari kehidupan sosial yang riuh, kita dipaksa oleh keadaan untuk melacak akar persoalan dari ketidakberdaulatan pangan yang menimpa kita selama ini. Dan akhirnya, momen ini juga mendorong kita untuk memperhitungkan modal alam maupun kultural yang kita miliki dan menakar kemampuan kita dalam mengonversi modal tersebut untuk mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan di negeri ini.

Bila mau dirunut jauh ke belakang, salah satu penyebab munculnya ancaman krisis pangan yang sedang kita hadapi sekarang ialah karena diberlakukannya sistem pertanian monokultur—menanam hanya satu jenis tanaman—untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Sistem ini berkontribusi pada lenyapnya keanekaragaman hayati—terutama pada jenis-jenis tanaman pangan—yang menjadi nilai lebih dari kawasan tropis seperti Indonesia. Di masa kekuasaan kolonial Belanda, sistem penanaman secara monokultur hanya diterapkan di bidang kehutanan dan perkebunan. Rezim Orde Baru kemudian memasukkan agenda sistem pertanian monokultur secara masif demi ambisinya untuk menciptakan swasembada beras di samping untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari bisnis plasma nutfah, pupuk kimia dan pestisida. Sesudah Orde Baru tumbang, sistem pertanian monokultur justru semakin masif seiring dikonversinya banyak hutan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku hingga Papua menjadi areal perkebunan seperti sawit.



Dalam pemenuhan kebutuhan pangan lokal, sistem pertanian monokultur memperoleh label yang sekilas tampak hebat, *Revolusi Hijau*. Revolusi hijau adalah sistem pertanian modern di mana tanaman yang ditanam hanya satu jenis saja dan dalam jumlah besar. Wujud yang paling tampak dari sistem ini adalah dijadikannya padi sebagai jenis tanaman pangan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Sistem ini bergantung pada mekanisasi, penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan herbisida sintetis. Pupuk kimia meningkatkan zat hara di tanah dalam waktu singkat. Pestisida dan herbisida mengurangi risiko rusaknya tanaman oleh hama. Seragamnya tanaman juga mempermudah perawatan, menekan biaya tenaga kerja, dan memperbanyak hasil produksi. Diperkenalkan sejak 1950-an, sistem ini dianggap paling efektif dalam menyejahterakan rakyat karena menguatkan ketahanan pangan dan membuka banyak lapangan kerja bagi petani dan pengolah produk pertanian.

Akibat langsung dari diberlakukannya sistem pertanian monokultur ini adalah terjadinya perubahan lanskap alam di hampir semua wilayah Indonesia dan bencana lingkungan yang mengikutinya. Sebagian besar kasus konversi hutan di Indonesia, misalnya, terjadi karena ekspansi bisnis sawit yang dikelola perusahaan-perusahaan besar. Yang menyedihkan, pengonversian hutan untuk proyek pertanian dan perkebunan monokultur ini dilakukan dengan membakar hutan tersebut. Pada tahun 2019 saja, misalnya, dari kasus-kasus pembakaran hutan yang direkam BNPB, tercatat 328.724 hektar hutan terbakar hingga Agustus 2019. Rantai terakhir dari alih fungsi lahan ini adalah hadirnya berbagai bencana



lingkungan. Bencana kabut asap di musim kemarau, banjir bandang di musim penghujan, dan tanah longsor makin sering terjadi.

## **Jalan Terjal Menuju Kedaulatan Pangan**

Pangan merupakan penjamin kehidupan, sedangkan lingkungan merupakan penjamin keberlanjutan pembangunan. Penyelamatan ketahanan pangan dan jaminan keberlanjutan lingkungan (ekologis) merupakan dua hal yang harus dihadirkan bersama. Tantangan untuk mewujudkan dua hal ini semakin berat mengingat lingkungan yang menjadi media utama penghasil pangan daya dukungnya terbatas. Keterbatasan tersebut terjadi baik secara kuantitas maupun kualitas. Sebaliknya kebutuhan manusia akan pangan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan gaya hidup boros manusia.

Bila kita sedikit mau mengevaluasi skema regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah dan memperhitungkan dengan seksama potensi-potensi yang ada di bidang pertanian, jalan keluar dari krisis pangan tersebut masih sangat terbuka.

Dari pihak pemerintah, diperlukan langkah strategis untuk mempersiapkan diri terhadap risiko kerawanan pangan di masa pandemi yang tidak pernah diketahui secara pasti kapan akan berakhir. *Pertama*, kembali mengaktifkan sistem-sistem ketahanan petani dari mulai tingkat desa dengan bantuan koperasi-koperasi desa. Beberapa wilayah di Indonesia telah menerapkan sistem koperasi untuk mengontrol harga di tingkat petani sehingga harga yang diperoleh petani tidak jauh berbeda dengan harga pasaran.



*Kedua*, memfasilitasi partisipasi publik yang dengan inisiatifnya sendiri menyiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap krisis pangan. Ketiga, melakukan penguatan terhadap para petani kecil yang sebagian besar tersebar di berbagai pelosok desa di Indonesia dalam aktivitas pertanian mereka. Para petani kecil inilah yang bisa menjadi garda depan dalam perjuangan keluar dari kemungkinan krisis pangan yang ada di depan mata.

Dari sisi skema kebijakan Reforma Agraria, Pelaksanaan Reforma Agraria 2014—2019 menargetkan 400.000 hektar tanah bekas perkebunan dan tanah terlantar yang akan *didayagunakan* untuk tanah objek reforma agraria. Angka ini sesungguhnya kurang dari 10% dari total tanah *terindikasi* terlantar seluas 4.880.598,3049 hektar yang berasal Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dan Izin Lokasi (Direktorat Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Kementerian ATR/BPN, 2017). Di luar angka-angka tersebut, potensi tanah yang dibiarkan menganggur atau terlantar di desa dan perkotaan sangat luas baik yang dimiliki oleh perseorangan, badan hukum maupun pemerintah daerah dan desa.

Oleh karena itu, tata pengurusan ke depan semestinya perlu mendapatkan perspektif demokratisasi agraria. Sayangnya, di dalam UU Desa 6/2014, tata pengurusan tersebut masih sangat terbatas. UU Desa 6/2014 memang menyebut empat kewenangan yang diberikan kepada des, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun Undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan kewenangan desa



mengelola dan mengatur ulang (restrukturisasi) sumber daya agraria di desa. Lubang yang sama bisa ditemukan pada regulasi tentang reforma agraria, yaitu Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Perpres ini hanya mengatur kelembagaan GTRA sampai dengan kabupaten/kota, tidak sampai ke level desa agar subyek dan obyek reforma agraria teridentifikasi, dan demikian menjadikan regulasi tentang reforma agraria ini menjadi lebih tepat sasaran.

Di tengah persoalan menyusutnya lahan pertanian yang semakin mencemaskan, sebenarnya masih ada lahan-lahan terlantar yang dibiarkan tidak produktif. Namun, karena paradigma pemerintah dan petani sampai sekarang masih belum bergeser dari lahan baku sawah (LBS) atau lahan yang secara turun-temurun dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian, ruang alternatif seperti lahan terlantar tidak pernah dilirik lahan produktif. Menurut catatan Kementerian Agraria dan tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) jumlah tanah yang terindikasi terlantar sebanyak 4.042 bidang dengan luas mencapai 2.927.809 hektar. Bila diperbandingkan dengan luas lahan baku sawah (LBS) Indonesia yang sebesar 7.463.948 hektar, maka luas lahan-lahan terlantar tadi lebih dari sepertiga luasan lahan baku sawah.

Dengan demikian, program yang dilakukan dapat berupa optimalisasi tanah-tanah kosong untuk lumbung pangan komunitas di semua daerah. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu mendata penggunaan tanah-tanah di desa dan menggerakkan pemuda-pemudi pedesaan dengan segenap skema dan *resources* yang dimiliki oleh kementerian untuk kedaulatan pangan. Demikian pula kebijakan alokasi dana desa



serta pembangunan desa (melalui RPJMDes) dapat dilakukan secara spasial dengan melindungi dan bahkan memperluas lahan-lahan pangan di desa yang sekaligus dapat menyerap tenaga kerja pedesaan yang luas.

## **Kembali pada Ibu sebagai Jalan Menjadi Diri Sendiri**

Pandemi Covid-19 bisa menjadi momentum untuk memperhitungkan kembali kebijakan pembangunan yang berimplikasi pada tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam. Kebijakan pembangunan kita selama ini yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari proyek modernitas harus dikritik karena berdampak sangat besar pada kerusakan alam dan manusia itu sendiri. Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya. Tidak salah kemudian apabila ada sebagian orang yang berpikir bahwa pandemi Covid-19 merupakan salah satu bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah asal mula keberadaan dan prasyarat keberlanjutan eksistensinya di alam semesta ini.

Sebenarnya, jauh sebelum Covid-19 mengguncang tatanan kehidupan manusia yang keluar dari kodrat kebersamaannya dengan alam, bencana global yang lebih mengerikan yaitu bencana yang diakibatkan perubahan iklim telah mengintip sejak lama. Perubahan iklim sekarang ini telah menyulitkan petani dalam penggunaan *pranata mangsa*. Jika perubahan iklim berkembang makin ekstrem,



bisa dipastikan desa akan kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan pangan. Urbanisasi dan *climate change* bersumber dari asal yang sama, yaitu industrialisasi.

Bila kita keluar dari tatanan kehidupan yang berpijak pada pandangan modern tentang manusia sebagai subjek yang lebih berkuasa atas hal-hal yang berada di luar dirinya, warisan pengetahuan dan kearifan nenek moyang kita dalam memandang dirinya dan alam semesta ini layak kita pertimbangkan. Berabad-abad lalu, jauh sebelum proyek manusia modern dianggap sebagai keniscayaan, nenek moyang kita telah memberi teladan bagaimana hidup selaras dengan alam, dan dengan demikian menjadikan alam semesta ini sebagai pusat dirinya. Kosmosentrisme adalah pandangan alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan secara sembarangan karena alam merupakan bagian tidak terpisah dari dirinya dan dalam pola relasi sederajat.

Buku ini lahir sebagai ikhtiar untuk mendokumentasikan seluruh perbincangan yang berlangsung selama diselenggarakannya Kongres Kebudayaan Desa, terutama selama pelaksanaan Webinar Seri ke-7 yang bertajuk “Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru.” Dalam pelaksanaannya, Kongres Kebudayaan Desa melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media. Itulah sebabnya, naskah pembentuk buku ini berasal dari makalah para pembicara Webinar Seri ke-7 dan *Call for Paper* dari publik akademika yang memiliki



kepedulian dan kompetensi untuk membicarakan isu kedaulatan pangan dan lingkungan.

Lewat publikasi buku ini kami berharap muncul perbincangan yang lebih maju dan tindakan yang lebih konkret dalam mewujudkan cita-cita kedaulatan pangan di negeri yang selama ini dikenal *gemah ripah loh jinawi*, negeri yang diyakini bisa menjadi lahan pertumbuhan tongkat kayu atau bahkan batu.





# Sekapur Sirih

**Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Ada ungkapan Jawa tentang desa yang menyatakan: “Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata”. Dalam UU Otonomi Desa No. 6/2014, ada kewenangan desa secara luas untuk mengatur cara dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak berarti keluar dari tata ketatanegaraan NKRI. Sebelumnya, khusus untuk desa-desa

di Yogyakarta, sudah ada landasan UU Keistimewaan DIY No. 13/2012 sehingga UU Desa menjadi lebih spesifik dalam arti ada perubahan mendasar dari *Pangreh Projo* menjadi *Pamong Praja*. Termasuk penyesuaian nomenklatur Jabatan Camat pada level bawah maupun nama beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota. Bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Oleh karena itu, semua perangkat wajib mengikuti *short course* di Pawiyatan Pamong sehingga sesanti *desa mowo coro negara mawa tata* lebih tampak nuansanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tematik, membaca desa adalah sebuah introspeksi atas eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia dengan melafalkan per huruf membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a, merupakan bentuk evaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa se-Nusantara. Semuanya itu harus ditempatkan pada era “normal baru” daripada aspek kebudayaan.

“*New normal*” adalah *back to normal* karena kehidupan kemarin justru *abnormal*, menandai sebuah *hiper realita*, seperti ketika kita harus membeli *image* sebuah produk air yang—seolah—meningkat statusnya setelah menjadi produk kemasan. Sebuah kondisi mental yang membuat sesuatu tidak substansif, menjadi melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. “*New normal*” adalah sebuah terapi psikis dan kultural *healing*, berefek kejut untuk merefeksi dan mengintrospeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin, untuk itu kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati. Dunia hari ini ibarat sebagai sebuah rumah sakit besar, kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir sehat dan agar tetap bisa hidup.



Di situlah kini desa berada, yang berimbas pada tata pergaulan dan tata pemerintahan desa. Akhirnya kita menjadi bagian dari generasi yang dipertemukan oleh situasi terbaru dengan perubahan relasi sosial, dinamika organisasi kerja, dan berbagai hal yang selama ini telah kita lalui. Konsekuensinya, Kongres Kebudayaan Desa harus membahas pergeseran budaya desa yang tentu tidak mudah.

Menurut pakar kebudayaan August Compte, Disanayake, maupun Alvin Tofler, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tahapan yang selalu mengedepankan rasionalitas. Bahwa iptek merupakan komponen utama majunya peradaban. Semakin baik penguasaan akan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati tahap adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di setiap desa agar sejalan dengan konsep *townbie*, membangun kelompok kreatif berbasis kebudayaan seperti contoh *Jogja gumregah*.

Pada masa awal, tentu canggung dan getir, bahkan sakit untuk *melakoninya*. Sebagaimana watak perubahan, harus melewati proses bertahap, terasa ada ketidaknyamanan yang mau tidak mau kita harus hadir menjadi bagian dalam proses tersebut. Potret perubahan dan ketidaknyamanan tersebut, tampak jelas dalam proses Kongres Kebudayaan Desa yang salah satunya menghasilkan 21 buku rumusan Indonesia Menuju Tatanan Baru dari Desa.

Dampak Covid-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era Industri 4.0 yang belum mapan. Itu pun sudah



dibayang-bayangi era Sosial 5.0 yang segera menyusul. Perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa, harus bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan masyarakat: tersedianya sarana medis, tersedianya jaring pengaman sosial untuk melindungi—mereka—yang paling rentan, dan tersedianya perlindungan kesehatan. Sebaliknya, berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik.

Gambaran strategis lingkungan desa yang telah berubah harus diikuti perubahan tata masyarakat, antara lain dengan relokasi dan *refocusing* Dana Desa. Dampak ekonomi membawa dampak sosial yang positif dalam meningkatkan peradaban empati, diikuti kesediaan saling belajar, menghargai, dan berbagi sebagai penguat modal sosial dan partisipasi publik. Penguatan ini berdampak positif pada peningkatan daya tahan ekonomi warga karena terbangunnya jaringan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Kebijakan “normal baru” atau adaptif menghadapi realitas perubahan, tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan kehendak membangun hidup *guyub* di tengah keragaman perbedaan yang didasari oleh *mutual trust* untuk memperoleh *mutual benefit*. Untuk itu kita harus siap mengubah *mindset* budaya dalam mengelola kehidupan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lurah atau kepala desa, harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan. Bekal kompetensi dalam dunia yang kompleks dan penuh kejutan serta perubahan yang tidak terduga merupakan syarat utama. Harus



mampu melakukan lompatan *non-linier* bahkan *out of the box*. Dari *Terra Firma*, daratan yang dikenal dengan baik, ke *Terra Incognita* atau dunia masa depan. Demikianlah, semoga buku rumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini bermanfaat bagi desa, bangsa, dan negara Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. *Wassalam*.

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

**Hamengku Buwono X**  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta





# Sekapur Sirih

## Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

### **Melawan korupsi dari desa**

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraktikkan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkir Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born*. Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh. Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian



menular. Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat *money politic*. Berharap untuk pilkades tidak ada *money politic*. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspirator korupsi karena *money politic* pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.



Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.

Jakarta, 5 Agustus 2020

**Giri Suprardiono**

Direktur Dikyanmas KPK





# Sekapur Sirih

**Menteri Desa, PDTT**

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana

perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau holopis kuntul baris, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif



yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain, di balik keriuhan negara mengurus problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini problem solving yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. Tagline “Desa untuk Semua Warga atau Desa Surga” merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan



lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggungharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa.

Jakarta, 5 Agustus 2020

**Abdul Halim Iskandar**

Menteri Desa, PDTT





# Pidato Kebudayaan

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud

*A*ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

**Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.**

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan

cara hidup, cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktek yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

*Pertama*, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing, lockdown*, dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

*Kedua*, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk



revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan



dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegakkan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah, tradisi lisan, dan berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya



tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun 2023 kelak, nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik.



Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retoris, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa dengan peralatan modern, termasuk uang. Mengubah cara pandang dan kebiasaan memerlukan perubahan



mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut science mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan, sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung



fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih. Wassalam.

Jakarta, 1 Juli, 2020

**Dr. Hilmar Farid**

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud





## Daftar Isi

<b>Pengantar Editor.....</b>	<b>v</b>
<b>Sekapur Sirih</b>	
<b>1. Gubernur DIY.....</b>	<b>xvi</b>
Hamengku Buwono X	
<b>2. Direktur Dikyanmas KPK.....</b>	<b>xxi</b>
Giri Suprapdiono	
<b>3. Menteri Desa, PDPT.....</b>	<b>xxv</b>
Abdul Halim Iskandar	
<b>Pidato Kebudayaan Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud.....</b>	<b>xxix</b>
Dr. Hilmar Farid	
<b>Perombakan Relasi Agraria Perdesaan untuk Pangan Berkelanjutan.....</b>	<b>1</b>
Ahmad Nashih Luthfi	
<i>Sakmadya: Paradigma Baru Demi Mencapai Kedaulatan Pangan.....</i>	<i>... 17</i>
Prof. Damayanti Buchori	

<b><i>Mletik Pager</i></b> .....	27
Singgih S Kartono	
<b>Agroekologi: Jalan Keluar yang Memesona</b> .....	45
Nissya Wargadipura	
<b>Optimalisasi Partisipasi Pengembangan Usaha Rakyat Untuk Desa Berdaulat</b> .....	56
Maria Loretha	
<b>Pertanian Organik Masyarakat Buton Utara dan Kekuatan Pangan Lokal</b> .....	65
Laxmi dan La Ode Gusman Nasiru	
<b>“Tentara Hitam” yang Menyejahterakan Masyarakat Desa</b> .....	75
Yudha Adipradana, S.Pi, M.I.L	
<b>Isu Ekohidrologi Perdesaan dalam Komunikasi Sains: dari Masa Pandemi ke Tata Pemerintahan Desa menuju Indonesia Baru</b> .....	87
Muhammad Yunus Zulkifli	
<b>Pemanfaatan Water Banking sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana Hidrometeorologi</b> .....	101
Zuhrotun Nisa’	
<b>Diversifikasi Pangan ala Masyarakat Desa</b> .....	114
Rizka Nur Laily Muallifa	
<b>Epilog</b> .....	126
Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa 2020	
<b>Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa</b> .....	154
<b>Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020</b> .....	157





# Perombakan Relasi Agraria Perdesaan untuk Pangan Berkelanjutan<sup>1</sup>

Ahmad Nashih Luthfi

**D**i dalam suatu perjalanan sejarah, kondisi krisis di satu lini kehidupan dapat menjadi tonggak bagi perubahan lebih lanjut di lini kehidupan tersebut, bahkan di lini kehidupan yang lain. Krisis itu dapat dipicu oleh ekonomi (malaise era 1930-an, krisis 1997, dan

<sup>1</sup> Disajikan dalam Seri Webinar 4 Juli 2020 dengan tema “Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru”, bagian dari rangkaian Kongres Kebudayaan Desa 2020.

krisis global 2008); politik (krisis 1965); wabah penyakit (flu Spanyol 1920-an, dan Covid-19 kini), untuk menyebut beberapa contoh.

Apakah setiap krisis diiringi dengan perubahan yang mendasar? Kita memerlukan analisa lebih lanjut terhadap *dimensi* dan *dampak* krisis, *pemaknaan* dan *sikap* terhadap krisis tersebut, *kebijakan* penanganan serta *arah* atau *visi* yang bukan hanya menyelesaikan secara tepat (praktis) terhadap krisis tersebut, namun juga *tata pengurusan baru* di masa depan. Krisis bisa hanya menjadi penanda peristiwa (*event*) dan bukan batu tonggak (*milestone*) tatkala ia tidak disertai perubahan yang mendasar.

Pertanyaan lanjutan yang penting bagi kita adalah apakah Covid-19 dapat membuka mata kita atas krisis-krisis (pedesaan) yang telah ada selama ini; apakah ia bisa menjadi kesempatan untuk merumuskan tata kelola baru pedesaan; apakah ia bisa mengubah ketimpangan (tenurial, generasi, dan penggunaan—pangan) untuk menuju tata pengurusan pedesaan yang lebih inklusif? Di sinilah tantangannya.

Adanya krisis (pandemi Covid-19) juga bisa menjadi dalih untuk melakukan tindakan eksepsional (atas nama kedaruratan) yang arah dan dampaknya justru dapat bertolak belakang. Pada satu sisi, eksepsional itu menjadi kesempatan untuk membuka diri atasi segenap kendala struktural dan kelembagaan karena yang penting adalah pada tindakan penyelamatan. Pada sisi yang lain, atas alasan yang sama, ia justru menjadi dalih akan berbagai “diskresi” yang bersifat imun dari mekanisme dan prinsip-prinsip standar seperti transparansi, akuntabilitas, bebas korupsi, partisipasi, demokrasi, dan



sebagainya. Lebih jauh bahkan pandemi dijadikan kesempatan untuk memasukkan (kembali) kebijakan yang telah mendapat penolakan publik. Hal ini perlu diwaspadai hingga di tingkatan desa sehingga tata pengurusan desa ke depan tidak dibangun dari eksepsional yang justru bertolak belakang dari prinsip-prinsip utama tersebut.

## **Desa dalam Perspektif Kajian**

“... [d]esa adalah Ibu Bumi tempat kembalinya para petarung ...Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali....adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme, karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, komunalitas, berjamaah, tidak mudah untuk mengumbar keserakahan...”  
(*Kerangka Acuan Kegiatan Kongres Kebudayaan Desa 2020*, hlm. 4).

Kutipan dari *Kerangka Acuan Kegiatan Kongres Kebudayaan Desa 2020* di atas menempatkan desa dalam pandangan ideal. Dalam studi agraria ia berada pada pandangan idealistik atau bahkan romantik (*romantic perspective*). Jika pernyataan yang mencirikan desa yang sedemikian inklusif di atas itu benar, mengapa terjadi migrasi (tetap/ sirkuler) yang sangat deras dari desa ke kota bahkan ke luar negeri? Tidakkah hal terakhir ini mencerminkan desa (masyarakat desa, elit desa, pemerintahan desa, sumber agraria desa) tidak cukup inklusif untuk menerima dan menampung generasi muda pedesaan hidup dan melakukan aktivitas ekonominya di desa?

Pertanyaan yang mengemuka tersebut tidak dilatari setuju atau tidak setuju atas terciptanya bangunan ideal (*ideal type*) atas



desa seperti kutipan di atas. Yang lebih mendesak dari itu, kita perlu melihat dalam *kondisi seperti apakah* desa ideal semacam itu; *siapakah mereka* di desa yang dimaksud dapat hidup sejahtera itu; dan apakah desa senantiasa ajek atau justru *mengalami perubahan* sebagai hasil dari berbagai relasi dan kekuatan (intra dan supradesa) yang ada dari waktu ke waktu yang mengakibatkan ketimpangan relasi agraris dan kelompok muda pedesaan. Studi pedesaan yang kritis (*critical perspective*) berupaya mengembangkan pertanyaan-pertanyaan tersebut.

## Desa dalam Multikrisis

Setidak-tidaknya kita melihat bahwa di pedesaan telah terjadi tiga krisis yang saling terkait, yakni krisis agraria-ekologis, krisis regenerasi dan krisis penggunaan sumber agraria utamanya untuk pangan. Tanpa menyadari dan memahami atau bahkan bersifat *denial* atas adanya krisis tersebut, maka *arus balik pengurusan agraria yang inklusif* tidak dapat terwujud.

1. Krisis agraria-ekologis dan urgensi demokratisasi agraria pedesaan.<sup>2</sup>

Kebijakan terhadap desa pasca pandemi Covid-19 perlu dirumuskan untuk memulihkan desa dari sejarah panjang marginalisasi desa akibat krisis agraria dan ekologis yang disebabkan masifnya ekonomi kapitalistik berbasis sumber agraria hingga ke

---

2 Bagian ini dicuplik dengan perubahan dari Ahmad Nashih Luthfi, "Idealisasi Desa di Tengah Krisis Sosial-Ekologis", *Jurnal Wacana*, No. 36/ Tahun XIX/ 2017



pelosok pedesaan serta hegemoni negara yang menempatkan desa secara instrumentalistik.

Demokratisasi agraria perlu diarahkan untuk membalik kondisi dua jenis ketimpangan, yakni “ketimpangan distribusi” yang berarti kesenjangan penguasaan tanah di antara berbagai kelas dalam sektor pertanian rakyat, dan “ketimpangan alokasi” yang berarti kesenjangan peruntukan tanah dan sumber daya alam lain antara usaha tani skala kecil (keluarga) dengan usaha skala besar (korporasi). (Shohibuddin 2019).

Dalam konteks tersebut di atas, isu demokratisasi desa dalam UU Desa 6/2014 harus diperluas maknanya. Demokratisasi dan penguatan desa tidak dapat semata-mata ditempuh melalui dikembalikannya otonomi dan pengakuan desa serta percepatannya melalui anggaran desa sebagaimana UU Desa 6/2014. Akan tetapi ia harus mampu menjawab krisis mendalam yang saat ini dihadapi desa dan pedesaan, yakni kemiskinan akibat ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria. Alas material ini turut membentuk relasi antar aktor dan institusi di dalam desa.

Terdapat hubungan *diadik* antara struktur politik (desa) dengan struktur penguasaan sumber daya alam. Perubahan struktur politik dapat memengaruhi perubahan struktur agraria dan sebaliknya pergeseran dan perubahan yang terjadi dalam struktur agraria dapat pula memengaruhi perubahan struktur politik (Midlarsky 1992). Meskipun institusi dan ruang partisipasi dan kebebasan telah tersedia, tetapi kekuasaan yang didasarkan pada hubungan berbasis (konsentrasi) sumber agraria itulah yang turut menentukan.



Agenda demokratisasi hubungan negara dengan warga negara desa harus berlanjut menuju hubungan demokratisasi secara internal antarwarga desa melalui demokratisasi sumber daya agraria/alam. Di dalam masyarakat di mana sumber dayanya yang penting terkonsentrasi di tangan sedikit orang, maka kekuasaan politik juga akan terkonsentrasi pada sedikit orang tersebut. Sebaliknya, di dalam masyarakat saat sumber daya pentingnya terdistribusi secara luas, maka kekuasaan politiknya juga akan secara luas terdistribusikan (Vanhanen, 1997)

Oleh karena itu, tata pengurusan ke depan semestinya perlu mendapatkan perspektif demokratisasi agraria. Sayangnya, di dalam UU Desa 6/2014, tata pengurusan tersebut masih sangat terbatas. Regulasi ini menyebut empat kewenangan yang diberikan kepada desa (pasal 18): penyelenggaraan pemerintahan desa; pelaksanaan pembangunan desa; pembinaan kemasyarakatan desa; dan pemberdayaan masyarakat desa. Tidak ada yang secara eksplisit menyebut kewenangan desa mengelola dan mengatur ulang (restrukturisasi) sumber daya agraria di desa. Perencanaan pembangunan desa juga perlu menempatkan desa sebagai subyek yang terlibat dan mengatur perubahan penggunaan tanah (*land use*) dan peralihan penguasaan/kepemilikannya (*land holding*). Semestinya desa tidak hanya menjadi “arena” dari berbagai perubahan tersebut. Tanpa ini semua demokratisasi dan proses penguatan desa yang diniatkan akan berdiri pada pijakan yang rapuh.

Terkait dengan dana desa, perlu misalnya mengalihkan persoalan pemerintah pusat-daerah-desa dalam alokasi dan persentase desa menuju alokasi/pembelanaan dana desa di internal masyarakat.



Adakah kaitan antara dana desa dengan pengelolaan sumber-sumber agraria guna mengatasi ketimpangan penguasaan tanah yang ada di desa? Dapatkah dana desa digunakan untuk pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi cadangan tanah desa, tanah komunal yang pemanfaatannya dilakukan secara bergilir/kolektif bagi tunakisma/ buruh tani pedesaan? Dari pemanfaatan peluang UU Desa 6/2014, misalnya, adakah desa yang telah berkreasi melakukan penataan ulang terhadap ketidakadilan sumber-sumber agraria di wilayahnya? UU ini menyebutkan bahwa tanah adalah salah satu bentuk aset desa. Apakah bentuk hak yang tepat bagi desa terhadap tanahnya dan bagaimana mekanisme pengaturan penggunaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat?

## 2. Ketimpangan antargenerasi

Desa juga sedang menghadapi krisis regenerasi dan reproduksi pertanian. Krisis regenerasi menjadi salah satu bentuk kekhawatiran bagi masa depan pertanian. Dalam rentang hampir satu dekade, angka penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Jawa mengalami penurunan, dari yang semula 43% (tahun 1993) menjadi 32% (tahun 2010). Data BPS tahun 2011 menyebutkan jumlah pemuda sebanyak 62,92 juta jiwa, hanya sekitar 6,9 juta atau sekitar 11 % yang bekerja di sektor pertanian. Sisanya “bekerja” di sektor lain yang tidak juga bisa didefinisikan sebagai pekerja tetap. Minat anak muda di pertanian kurang atraktif. Dinamika *lockdown* semasa pandemi adalah kisah tentang bertahan-tidaknya atau keluar-masuknya anak muda desa-kota kita, tatkala desa tidak mampu menampung tenaga produktif pedesaan.



Terlibat atau tidaknya anak muda dalam pertanian ditentukan banyak faktor, di antaranya adalah akses terhadap tanah, keterampilan dan pendidikan, dan keterbukaan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar pertanian (Ben White 2011; Ben White 2012; Luthfi dan Saluang 2015; Nugraha dan Herawati 2015). Maka pertanyaan yang mendesak diajukan adalah pendekatan pembangunan seperti apa yang ditawarkan sehingga desa mampu menjadi basis kehidupan yang sekaligus mampu menarik tenaga kerja muda di sektor pertanian; apa kontribusi kebijakan desa baru ini dalam turut menangkal arus urbanisasi dan migrasi tenaga kerja (muda) pedesaan.

Berbagai dampak pandemi ini telah tampak nyata. Penyusutan aktivitas ekonomi berbagai sektor mengakibatkan pengangguran tinggi dan kekurangan pangan. Angka pengangguran diprediksi akan melonjak pada triwulan II-2020. Pemerintah sendiri memperkirakan akan ada penurunan ekonomi 0,4 persen dalam skenario terburuknya yang mengakibatkan hilangnya pendapatan ekonomi sebesar Rp 72 triliun pada hari ke-240 (sejak 1 April 2020). Angka pengangguran akan mencapai 3 juta jiwa, naik dari kisaran 1,9 juta akibat *lockdown* per 16 April 2020 (Kemenaker 18 April 2020). Ditambah lagi para pemudik yang tidak dapat kembali ke kota-kota tempat mereka mencari nafkah setelah mereka pulang ke kampung halaman.

Sebelum masa pandemi kondisi pangan di Indonesia sudah cukup serius. *Global Hunger Index* yang membuat penghitungan sejak tahun 2000 melaporkan bahwa angka *hungry index* di Indonesia pada tahun 2019 adalah 20,1 (serius) (Global Hunger Index 2019). Keseriusan itu bisa meningkat menjadi mengkhawatirkan tatkala



mencapai indeks 35 jika tidak bisa menanggulangnya di tengah wabah virus korona ini. Krisis pangan menghantui Indonesia!

Sementara itu menurut data potensi desa dari Badan Pusat Statistik (BPS), selama 2003-2011 terjadi penurunan tajam persentase desa-desa dengan tipe persawahan (artinya, desa pangan) yakni 70% pada tahun 2003, 54% (2005), 47% (2008) dan 40% (2011) (Soetarto & Agusta 2012 dalam Shohibuddin 2018). Hal ini disertai dengan peningkatan signifikan desa tipe perkebunan. Tak pelak perubahan itu akan mengakibatkan degradasi desa sebagai sumber produksi pangan, dan adanya perubahan besar pada struktur ketenagakerjaan dan agraria.

## **Optimalisasi Tanah Kosong untuk Pangan**

Setelah menyadari berbagai krisis di atas (tenurial, generasi, dan pangan), kita perlu maju satu langkah dengan melihat salah satu potensi yang dapat dioptimalisasi di dalam menata ulang ketimpangan relasi keagrariaan di pedesaan, dengan melihat potensi tanah kosong atau tanah terlantar untuk pangan.

Pada skala nasional saat ini Indonesia memiliki kebijakan Reforma Agraria (RA) yang akan dijalankan oleh Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dari daerah hingga kabupaten/kota. Perpres 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria hanya mengatur kelembagaan GTRA sampai dengan kabupaten/kota. Padahal penting membentuk GTRA hingga level desa yang berguna untuk melakukan identifikasi subyek dan obyek RA (secara partisipatif dan *bottom-up*) sehingga RA dapat lebih tepat sasaran.



Salah satu objek tanah reforma agraria adalah tanah terlantar. Secara nasional, pada masa pandemi sekarang ini penting dilakukan konsolidasi lintas kementerian dan kelembagaan untuk melahirkan perencanaan nasional berbagai kegiatan yang mampu menyediakan pangan berkelanjutan (*national planning for sustainable food*). Keberlanjutan (*sustainability*) dalam konteks lintas generasi maupun ekologis (menghindari penanaman kimiawi yang merusak alam).

Program yang dilakukan dapat berupa optimalisasi tanah-tanah kosong untuk lumbung pangan komunitas di semua daerah. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu mendata penggunaan tanah-tanah di desa dan menggerakkan pemuda-pemudi pedesaan dengan segenap skema dan *resources* yang dimiliki oleh kementerian untuk kedaulatan pangan. Demikian pula kebijakan alokasi dana desa serta pembangunan desa (melalui RPJMDes) dapat dilakukan secara spasial dengan melindungi dan bahkan memperluas lahan-lahan pangan di desa yang sekaligus dapat menyerap tenaga kerja pedesaan yang luas.

Dari Kementerian ATR/BPN, misalnya, kementerian ini dapat mendukung penyediaan data dan lokasi hasil identifikasi tanah-tanah terlantar. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar mengamanatkan kementerian tersebut (BPN kala itu) untuk melakukan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar guna kepentingan reforma agraria, cadangan strategis negara (utamanya pangan), dan tanah cadangan negara menghadapi situasi bencana. Peruntukan itu diperjelas melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar.



Dari sisi substansi dan kebutuhan konteks sekarang, optimalisasi tanah terlantar untuk tiga keperluan tersebut sangat relevan.

Skema Pelaksanaan Reforma Agraria 2014-2019 menargetkan 400.000 hektar tanah bekas perkebunan dan tanah terlantar yang akan *didayagunakan* untuk tanah objek reforma agraria (KSP 2015). Angka ini sesungguhnya kurang dari 10% dari total tanah *terindikasi* terlantar seluas 4.880.598,3049 hektar yang berasal Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, dan Izin Lokasi (Direktorat Penertiban dan Pendaayagunaan Tanah Terlantar Kementerian ATR/BPN, 2017). Di luar angka-angka tersebut, potensi tanah yang dibiarkan menganggur atau terlantar di desa dan perkotaan sangat luas baik yang dimiliki oleh perseorangan, badan hukum maupun pemerintah daerah dan desa.

Inilah momentum yang perlu dimanfaatkan untuk melakukan kerja sama multipihak agar pemerintah menggerakkan reforma agraria di pedesaan, mengoptimalkan Tim Reforma Agraria Nasional di tingkat pusat dan membentuk GTRA sampai dengan Desa atau kelompok kerja (Pokja) dengan penugasan khusus melakukan optimalisasi tanah kosong/terlantar untuk pangan di desa atau perkotaan. Kerja sama perlu digalang antara GTRA berbagai level, pemerintahan desa, karang taruna, pemuda-pemudi (pelajar/mahasiswa) yang pulang kampung karena sekolah/perkuliahannya diliburkan, dan para pekerja yang terkena PHK. Hal penting lain adalah kerjasama dengan Organisasi Tani Lokal (OTL) dan masyarakat sipil lainnya. Pemerintah daerah yang sedang merealokasi anggaran dapat memperhatikan kebutuhan tersebut. Pemerintah desa (dan perkampungan di kota) mulai melakukan pendataan



tanah potensial milik pribadi, badan hukum atau tanah kas desa yang dapat disewa dengan harga murah atau dikerjasamakan secara kolektif dengan tenaga kerja muda-mudi tersebut.

Patut diingat bahwa dalam Undang-Undang Pokok Agraria 1960 (UUPA 1960) tindakan “memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah rusaknya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah” (Pasal 15), sehingga tindakan menelantarkan tanah atau membiarkan tanah kosong tidak ditempati dan diolah adalah suatu tindakan pidana, dengan hukuman kurungan 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000 kala itu (Ketentuan Pidana, Pasal 52, UUPA 1960).

## **Tendensi Sejarah**

Indonesia memiliki pengalaman di dalam kebijakan dan praktik melakukan pencadangan dan optimalisasi tanah untuk pangan pada masa krisis. Pengalaman sejarah ini dapat direkontekstualisasi pada masa kini. Pada masa pendudukan Jepang rakyat menderita kelaparan yang luar biasa. Kondisi lapar pangan dan lapar tanah terjadi di mana-mana. Pada akhirnya Jepang membolehkan rakyat menanam tanah-tanah perkebunan (*erfpacht*) terlantar dengan tanaman pangan disertai kewajiban menanam tanaman untuk kepentingan militer Jepang (minyak), seperti tanaman jarak (*jatropha*) (Shigeru Sato 1994).



Pada masa awal kemerdekaan presiden memerintahkan kepada Menteri Urusan Bahan Makanan, I.J. Kasimo untuk menyusun Rencana Produksi Tiga Tahun (1947-1950) atau dikenal dengan *Plan Kasimo*. Kebijakan berupa perintah penanaman tanah-tanah kosong oleh rakyat, utamanya tanah yang ada di Sumatera Timur seluas 281.277 ha. Swasembada pangan di pedesaan digiatkan dalam hal usaha tani, intensifikasi melalui bibit padi unggul, dibentuknya kebun-kebun bibit untuk rakyat, dan pemeliharaan hewan ternak sebagai alat produksi pangan. Didirikan Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) dengan peserta didik pemuda-pemudi tani 18-25 tahun. Tampak kaitan antara kemandirian pangan, ekonomi, budaya, pendidikan dan pengorganisasian masyarakat (Luthfi 2011).

Pada masa krisis tahun 1997-1998 juga terjadi berbagai pemanfaatan tanah kosong untuk kebutuhan pangan. Pemerintah bahkan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan. Dibangun atas dasar adanya kondisi krisis saat itu, serta prinsip fungsi sosial atas tanah dan nilai keadilan, peraturan ini membuat ketentuan kewajiban bagi pemilik atau pemegang hak atas tanah untuk mengizinkan masyarakat memanfaatkan tanah melalui pemerintah daerah/instansi pemerintah (Pasal 3 [1]). Kantor pertanahan ditugaskan melakukan pendataan tanah-tanah potensial, membuat uraian rinci pemanfaatan serta memonitor penggunaannya (Pasal 4 [1]). Kebijakan ini cukup efektif misalnya terjadi di Kabupaten Bantul. Warga dan pemerintah desa bekerja sama dalam program ABRI Manunggal Pertanian (AMP) melakukan pemanfaatan atas



tanah kosong (HGB) para pengembang perumahan yang bangkrut terkena krisis ekonomi. Kerja sama ini dilakukan dengan sistem bagi hasil dengan keuntungan besar bagi pengguna tanah (Wibawanti dan Sumardjono 2001).

## **Penutup: Kepercayaan dan Inklusifitas**

Dengan adanya kebijakan pertanahan untuk keberlanjutan pangan dan generasi di era pandemi ini diharapkan ia memiliki dampak yang meluas. Akan terjadi optimalisasi fungsi dan manfaat tanah-tanah yang terlantar selama ini, serta ketersediaan pangan yang cukup bagi komunitas. Kebijakan ini dapat memiliki arti penciptaan lapangan kerja (kembali) sektor pertanian (*repeasantisation/ reagrarianisasi*) dari fenomena *depeasantization/ deagrarianisasi* (White 2011) yang tengah terjadi. Mengingat bahwa jumlah Rumah Tangga Pertanian (RTP) di Indonesia terus menurun setiap tahun. Sekitar 5 juta RTP hilang dalam sepuluh tahun, dari 31,17 juta RTP (2003) menjadi 26,12 juta RTP (2013) (Sensus Pertanian, BPS 2013). Proses pembalikan ini adalah seni bertani (van der Ploeg 2019) yang mengorkestrasi serta mendinamisasi desa dan kampung perkotaan atas segenap potensinya, baik unsur manusia dan nonmanusia: tenaga kerja muda-mudi, tanah, tanaman, mikroba. Hal ini akan menjadi arena baru penataan ulang hubungan manusia dengan alam lingkungan yang selama ini semata-mata diposisikan sebagai bahan baku penciptaan kapital. Pandemi bisa menjadi proses *degrowth* dan kesempatan pemulihan alam sekaligus peningkatan kualitas manusia. Paradigma terakhir ini menekankan



bahwa kemajuan umat manusia (*human progress*) tanpa pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah mungkin. *Degrowth* istilah yang menunjukkan adanya penurunan produksi dan konsumsi yang justru meningkatkan kehidupan manusia dan kondisi ekologis global hingga level lokal dalam jangka waktu singkat atau lama (*in the short and long term*) (Schneider, Kaliis, dan Martinez-Alier 2010).

Secara lebih spesifik, ini adalah kesempatan emas bagi Tim Reforma Agraria Nasional dan GTRA yang belum menunjukkan akselerasinya selama ini. Momentum bagi keduanya untuk membangun kerja sama lintas lembaga (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, desa, organisasi tani dan masyarakat sipil); lintas generasi (tua-muda/mudi di komunitas); dan lintas kepentingan (tanah-pangan-tenaga kerja). Dengan demikian akan terbangun *trust* atau kepercayaan publik tatkala pemerintah hadir hingga level desa, sensitif atas krisis yang terjadi, serta langsung menyentuh kebutuhan primer warga di masa pandemi. Langkah ini merupakan imajinasi besar membangun tata kelola sosial-ekonomi berbasis pertanian yang inklusif.

Kita yakin bahwa setiap krisis melahirkan kesempatan perubahan besar.

## **Profil Penulis**

Ahmad Nashih Luthfi merupakan dosen Sekolah Tinggi Pertanian Nasional (STPN). Ia mengajar politik pertanian dan *land reform*. Ketekunannya dalam kajian agraria mengantarkan Ahmad menjadi Manajer Penelitian dan Kepala STPN Press.



Sebelumnya ia bergabung sebagai peneliti di Sajogyo Institute (2005-2010). Lalu mendirikan komunitas dan aktif sebagai editor Jurnal Ethnohistori (2011-2018). Rentang akademiknya ia mulai dari madrasah, pesantren, hingga melanjutkan kuliah sarjana dan pascasarjana di Jurusan Sejarah UGM. Ia bisa dikontak lewat email: [anasluthfi@stpn.ac.id](mailto:anasluthfi@stpn.ac.id)





# **Sakmadya: Paradigma Baru Demi Mencapai Kedaulatan Pangan<sup>1</sup>**

**Prof. Damayanti Buchori**

*“The desire to reach for the star is ambitious. The desire to reach hearts is Ade.” – Maya Angelou*

**B**agi saya, permasalahan kedaulatan pangan adalah permasalahan hati, rasa, dan cinta. Kedaulatan pangan bisa membuat kita merdeka dari rasa takut, merdeka dari keterbelengguan, dan pada gilirannya bisa membuat kita mencintai kehidupan. Hal tersebut

<sup>1</sup> Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal , Sabtu, 4 Juli 2020, Seri 7: Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru dan disarikan oleh Kusharditya Albi

bisa tercipta jika kita mau belajar bagaimana kita bisa hidup dengan *sakmadya* atau secukupnya.

Jika kita berbicara mengenai lingkungan hidup dalam ranah ekologi, maka kita tidak bisa lepas dari keterhubungan dan keberagaman. Antara makhluk satu hidup dengan makhluk hidup lainnya, baik yang sesama maupun yang berlainan jenisnya, sudah pasti saling memiliki ketergantungan dan timbal balik. Mulai dari organisme yang terkecil hingga organisme yang terbesar, semuanya ikut mempengaruhi bagaimana keseimbangan alam dapat terbentuk.

Kita bisa melihat ke belakang dan berpikir bagaimana pembentukan alam raya terjadi. Sebenarnya manusia tidak luput dari proses pembentukan alam raya itu sendiri. Saya sepakat dengan apa yang dikatakan Tom Chen pada acara TED Talk, pada tahun 2016, di Taipei bahwa semua yang ada di alam raya ini terhubung. Dia melihat keterhubungan antara alam raya, jantung, napas, dan pikiran kita.

Jantung kita menjadi alat untuk mengalirkan darah. Di dalam darah kita terdapat hemoglobin yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbondioksida. Salah satu komponen dari hemoglobin adalah zat besi. Zat besi yang ada di dalam tubuh kita berasal dari alam raya.

Zat besi kita terbentuk akibat proses terjadinya supernova. Peristiwa supernova terjadi akibat matinya suatu bintang. Peristiwa itu yang kemudian menciptakan berbagai partikel dan zat yang sebelumnya belum pernah ada, termasuk besi. Rangkaian peristiwa demi peristiwa tersebut membuat saya berpikir kalau jantung kita sangat terhubung dengan alam raya.



Selain manusia terhubung dengan alam raya, kita sudah tahu bahwa manusia dan tanaman juga saling terhubung. Tanaman membutuhkan karbondioksida untuk melakukan proses respirasi yang mengeluarkan oksigen. Sementara manusia membutuhkan oksigen untuk bernapas dan menghasilkan karbondioksida. Semuanya memiliki timbal balik dan saling terhubung.

Demikian pula dengan pikiran kita. Kehidupan kita hari ini ada karena kehidupan sebelumnya. Terkadang kita berpikir bahwa keberadaan kita di dunia tidak memiliki kontribusi apa pun. Padahal, segala kehidupan sosial yang ada hari ini, tidak terlepas dari kehidupan yang ada di masa lalu. Pemikiran dan penemuan yang dilakukan orang-orang di masa lalu melahirkan kehidupan pada masa sekarang. Maka, interkoneksi antara masa lalu dan masa sekarang menjadi kunci dari keberadaan kita.

## **Ekologi dan Hierarki Kehidupan**

Ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Ernst Haeckel, seorang ahli biologi Jerman pada tahun 1866. Menurut Haeckel, ekologi adalah ilmu komprehensif yang mempelajari hubungan antar organisme dengan lingkungannya. Ekologi memegang prinsip keseimbangan semua komponen alam. Bencana alam adalah salah satu bentuk peristiwa yang menjadi penanda atau peringatan bahwa keseimbangan alam sedang terganggu. Ekologi percaya bahwa semua makhluk hidup memegang peranannya masing-masing dalam menyeimbangkan alam raya ini.



Jika kita melihat hierarki kehidupan dari level individu, populasi, komunitas dan ekosistem, niscaya kita akan sampai pada pemahaman bahwa manusia sebagai individu akan selalu membentuk menjadi populasi. Di dalam populasi kita saling berinteraksi dan membentuk suatu komunitas. Keseluruhan level ini yang nanti akan membentuk ekosistem.

Setiap individu jelas mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita semua saling terhubung. Oleh karena itu, apa pun yang kita lakukan akan berdampak pada ekosistem saat kita menjadi bagiannya. Dengan membentuk sistem pertanian yang baik, misalnya, kita bisa membuat ekosistem yang adil.

## **Kedaulatan Pangan melalui Sains dan Teknologi**

Kita bisa melihat berbagai perubahan yang terjadi di dunia termasuk Indonesia. Berbagai sistem kehidupan kita saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi. Mulai dari bagaimana kita memulai hari kita, bagaimana kita makan, atau bagaimana kita memilih pekerjaan. Pertanian pun ikut terpengaruh dan memiliki perubahannya. Semuanya tidak luput dari perkembangan sains dan teknologi.

Kita sudah mengetahui terjadinya revolusi industri pertama hingga yang ketiga. Sekarang kita hidup dalam masyarakat industri 4.0, yang segala tatanannya dipengaruhi oleh internet. Jadi, pengaruh ini akan membawa kita ke mana?



Perubahan lanskap sudah banyak terjadi di sekitar kita. Banyak kasus-kasus pembakaran hutan yang diperuntukkan untuk proyek monokultur. Pada tahun 2019, dari kasus-kasus pembakaran hutan yang direkam BNPB, tercatat 328.724 hektar hutan terbakar hingga Agustus 2019.

Selain itu, banyak terjadi kasus-kasus pertambangan liar. Hal ini juga berpengaruh terhadap perubahan lanskap. Yang memilukan, aktivitas pertambangan liar tersebut biasanya menggunakan merkuri dan sianida yang dapat merusak lingkungan. Akibat nyata dari semua ini adalah terjadinya degradasi lingkungan. Struktur tanah mengalami perubahan drastis karena kehilangan mineral dan unsur hara.

Kerusakan lingkungan seperti ini tentu membuat keseimbangan alam dan ekosistem menjadi terganggu. Stephen Hawking pernah berkata bahwa pemanasan global dapat membuat bumi menjadi tidak layak huni lagi dan mengancam eksistensi manusia di planet ini. Agar dapat bertahan dari kepunahan, manusia harus pergi ke planet lain. Saat ini, Elon Musk dengan proyeknya sedang mengembangkan roket luar angkasa, agar manusia bisa tinggal di planet mars.

Dengan pengetahuan dan teknologi yang ada sekarang dan akan terus berkembang di masa depan, akan menuju ke mana peradaban kita? Peradaban seperti apa yang sebenarnya ingin kita capai? Kita punya banyak sumber daya dan kedaulatan. Mengapa kita justru memikirkan planet mars untuk bertahan hidup?



Isaac Asimov, seorang astrofisikawan mengatakan “aspek yang paling menyedihkan dari kehidupan yang sedang kita jalani sekarang adalah kenyataan bahwa sains meramu pengetahuan lebih cepat dibandingkan dengan manusia meramu kearifan” (*‘the saddest aspect of life right now is that science gathers knowledge faster than society gathers wisdom’*). Sementara itu, seorang ahli semut, E.O. Wilson, justru pernah mengatakan bahwa permasalahan kita adalah hidup dalam masyarakat yang masih memiliki emosi zaman batu. Kita juga hidup dalam masyarakat yang masih mengikuti institusi abad pertengahan, meski sudah memiliki teknologi yang menyerupai tuhan. Inilah masalah kita hari ini.

Oleh karena itu, dalam hemat saya, yang perlu kita lakukan adalah menyentuh hati kita. Bagaimana kita menjadi lebih arif dalam mengelola lingkungan. Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* mengatakan jika kita bisa melakukan sesuatu, maka juga terdapat kekuatan untuk tidak melakukannya. Jadi, apakah kita mau menjadi lebih arif atau tidak dalam menjaga keseimbangan alam tergantung pada diri kita sendiri.

## **Menuju Kedaulatan Pangan**

Kemandirian pangan dan desa sebetulnya sudah dilakukan oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP). KRKP dibentuk pada Februari 2003 di Bogor, kemudian disahkan sebagai badan hukum pada tanggal 21 Juli 2006. KRKP dibentuk atas dasar keprihatinan bahwa masyarakat petani adalah kelompok rentan dan



marjinal. Padahal, fungsi petani terhadap penyediaan pangan bagi rakyat sangat besar.

KRKP melihat dari UU No 6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan undang-undang tersebut maka KRKP berusaha mendorong potensi desa agar berkembang dan dapat menyejahterakan masyarakat. KRKP juga mendorong pemerintah agar lebih memfokuskan anggaran-anggaran pada sektor pertanian.

Ada beberapa program yang diselenggarakan oleh KRKP. Salah satunya adalah mengenai lumbung pangan. Lumbung pangan yang dibuat KRKP ini berfungsi sebagai antisipasi terhadap datangnya bencana. Sebelumnya, Lombok memiliki sistem lumbung pangan yang disebut dengan “sambi”. Pada zaman dahulu sambu digunakan sebagai sistem ketahanan pangan keluarga. Namun, berkaca dari peristiwa gempa yang menimpa Lombok pada tahun 2018 silam, saat ini masyarakat Lombok memakai kembali sistem sambu.

Masyarakat Lombok terbiasa menjual keseluruhan hasil panen mereka. Ketika terjadi bencana semua aktivitas jual-beli menjadi terhenti. Sehingga, ketika terjadi bencana atau pandemi seperti sekarang, mereka berpotensi kehabisan persediaan makanan. Maka dari itu, sistem lumbung pangan sangat penting untuk pemenuhan surplus agar masyarakat dapat tercukupi kebutuhan pangannya.

Mereka juga memiliki lumbung benih dan pupuk. Lumbung uang juga ada di desa. Pengelolaan dan pemasaran hasil panen juga terjadi di desa. Jadi semua perputaran ekonomi itu terjadi di desa. Hal tersebut bisa dilakukan maksimal jika kita memiliki



akses terhadap teknologi, akses pada lahan, dan memiliki asuransi pertanian.

## **Paradigma Baru yang Lama**

Menurut Mahatma Gandhi ada tujuh bahaya yang muncul dari kekuatan manusia. Semua bahaya itu adalah: kekayaan tanpa bekerja; kesenangan tanpa hati nurani; pengetahuan tanpa karakter; bisnis tanpa etika; ilmu pengetahuan tanpa kemanusiaan; agama tanpa pengorbanan; dan politik tanpa prinsip.

*Sakmadya* atau “secukupnya” adalah paradigma lama. Kita perlu belajar lagi melalui kearifan-kearifan kita di masa lalu. Belajar dari masa lalu untuk masa depan dan untuk keterhubungan. Mempelajari kearifan sangat penting karena bisa membuat kita menjadi rendah hati. Kita bisa melihat kearifan itu di mana-mana. Salah satunya dari desa, tempat di mana kita bisa mengambil nilai-nilai luhur untuk membangun tatanan baru Indonesia.

Kita bisa belajar kearifan-kearifan itu dari konsep Subak di Bali. Subak pada awalnya merupakan organisasi masyarakat petani di Bali. Kemudian, Subak menjadi nama dari sistem irigasi. Sistemnya adalah dengan mengalirkan air melalui tiga tingkatan agar semua lahan mendapatkan pengairan yang sama. Konsep ini muncul dari filosofi Tri Hita Karang yang berarti “tiga penyebab kesejahteraan”.

Selain itu, kita juga bisa belajar dari sistem Sasi yang ada di Maluku. Sasi adalah adat yang melarang masyarakat mengambil sumber daya alam dalam waktu tertentu. Sasi merupakan larangan yang dikenakan pada semua orang. Bagi yang melanggar larangan



tersebut akan dikenai hukum adat ataupun denda. Hal ini baik karena masyarakat tidak terus-terusan mengeksploitasi alam secara berlebihan.

Kearifan juga ada pada masyarakat Petalangan di Riau. Jika masyarakat Petalangan melihat lebah-lebah datang pada sebuah pohon, mereka punya kepercayaan itu adalah saatnya menghentikan penebangan pohon di wilayah itu. Mereka tahu lebah-lebah itu akan mencari makanan.

Melihat pandangan-pandangan masyarakat Timur, sangat banyak kearifan lokal yang ikut menjaga keseimbangan ekosistem. Jika kita belajar dari pandangan Barat, kita selalu berfokus pada individu. Kita terlalu fokus pada pemenuhan materi individu dan kemudian kehilangan kearifan kita sendiri.

Pengetahuan yang sudah diolah dapat menjadi ilmu. Ilmu-ilmu yang berkembang menjadi teknologi. Seharusnya setelah teknologi ada, muncul nilai-nilai baru yang membuat kita semakin bijak.

Manusia hidup dengan rasio dan spiritualitas. Menurut saya kedua hal itu harus memiliki keseimbangan. Kedaulatan pangan bagi saya hanyalah pemenuhan kebutuhan pangan dalam arti harfiah, namun tidak luput dari pemenuhan pangan secara spiritual. Semuanya dilakukan dengan *sakmadya* atau secukupnya. Masihkah desa memiliki nilai-nilai yang bisa menjaga peradaban dari gempuran materi. Seperti yang dikatakan Maya Angelou di atas, keinginan untuk meraih bintang itu bagus. Namun, keinginan mencapai hati adalah sebuah kearifan. Seharusnya kedaulatan pangan dapat menyentuh hati kita semua.



## **Profil Narasumber**

Prof. Damayanti Buchori. Lulusan Institut Pertanian Bogor dengan konsentrasi Hama dan Penyakit Tanaman ini memperoleh gelar master (dari University of Illinois) dan doctor (Indiana University Bloomington) di bidang Entomologi (ilmu tentang serangga). Pengalaman riset dan konsentrasinya pada kebijakan kesehatan lingkungan mengajarkan perlunya sinergi antara kebijakan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat untuk konservasi lingkungan alam di Indonesia. Komitmennya tersebut kemudian diwujudkan dengan mendirikan Yayasan Peduli Konservasi Alam Indonesia pada tahun 2000. Salah satu programnya adalah mengedukasi anak-anak tentang peduli lingkungan dan kampanye pelestarian alam.





# Mletik Pager<sup>1</sup>

Singgih S Kartono

*“Kehidupan lama yang lebih seimbang menjadi inspirasi arah masa depan. Prototipe peradaban baru pun mulai menampakkan wujudnya, ketika nilai-nilai lama muncul kembali dalam wujud baru dan hal-hal yang berlawanan kemudian berkawan”*

*“Bangsa-bangsa yang sedang/belum berkembang memiliki kesempatan untuk langsung menuju ke era baru, mereka berada dekat dengan masa depan, namun selama ini dilihat sebagai masa lalu”*

Cyral-Spирiterial. Spedagi Movement

## Simbok

Tahun 2020 sebenarnya merupakan tahun dengan angka indah dan langka. Namun, 2020 ini sungguh *nyolong pethek*. Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu pandemi terbesar dalam sejarah

<sup>1</sup> Ungkapan dalam Bahasa Jawa. Artinya kurang lebih, ‘lompat pagar,’ biasanya dilakukan dengan memanjat dan menurunya, bukan dengan melompatnya

umat manusia. Beberapa pihak sesungguhnya telah memberikan peringatan tentang kemungkinan munculnya pandemi besar, namun sayangnya mereka tidak bisa meramalkan angka tahunnya dengan tepat. Angka-angka dalam 2020 jika dijumlahkan ternyata menghasilkan angka 4, angka yang dalam budaya China menjadi simbol kematian/kesialan. Dan *koq ya mbeneri*<sup>2</sup> pandemi ini berawal dari kejadian di sebuah kota di China, negara yang perekonomiannya sedang moncer.

*Othak-athik* kalau bisa *gathuk*<sup>3</sup> memang mengasyikkan. Namun mungkin bukan sebuah kebetulan di tahun 2020 ini pandemi mendera dunia. Laju kehidupan yang tengah melesat cepat tiba-tiba harus *mandheg greg*<sup>4</sup>. Desain kehidupan ala industri sekarang ini memang ibarat sebuah kendaraan yang tenaganya terus ditambah, ukurannya diperbesar, namun lupa memasang rem. Ketika ada sesuatu yang besar melintas di depan, braaaak... remuk! Terutama di “kabin” bagian depan, yaitu wilayah perkotaan, kegiatan berhenti, perekonomian *mrotholi*<sup>5</sup>. Desa yang memang selama ini ada di belakang, walaupun terkena dampak, sepertinya *mung mlecet-mlecet*<sup>6</sup>. Ribuan orang desa yang selama ini *boro*<sup>7</sup> dan *glidhik*<sup>8</sup> di kota, kemudian memilih kembali ke desa karena tidak ada pekerjaan dan pendapatan lagi yang bisa diperoleh di kota. Di India, ratusan ribu orang yang selama ini tinggal dan bekerja di kota, memilih untuk kembali ke desa meskipun harus berjalan kaki puluhan hingga

2 Ungkapan dalam Bahasa Jawa. Artinya kurang lebih, ‘secara kebetulan.’

3 Cocok, pas, atau tepat—Bahasa Jawa.

4 Ungkapan dalam Bahasa Jawa. Artinya kurang lebih, ‘berhenti tiba-tiba.’

5 Hancur lebur—Bahasa Jawa.

6 Ungkapan dalam Bahasa Jawa. Artinya kurang lebih, ‘cuma lecet-lecet.’

7 Bekerja

8 Bolak-balik.



ratusan kilometer, karena sarana transportasi dihentikan. Mereka pulang ke desa karena di desa meskipun kehidupan sederhana, pangan tersedia, tempat tinggal pun tidak perlu membayar sewa. Keluarga dan warga siap sedia untuk saling membantu dalam menghadapi kesusahan bersama.

Desa kembali muncul seperti sosok *simbok* yang dengan *ati semeleh*<sup>9</sup> menyambut putra-putrinya yang sedang kesusahan kembali. Namun, sebenarnya *simbok* (=desa) ini sudah tidak sekuat dulu lagi. Urbanisasi telah menggerogoti kekuatannya. Sementara itu telah mengintip sejak lama ancaman-bencana besar global yang lebih mengerikan yaitu bencana yang diakibatkan perubahan iklim. Perubahan iklim sekarang ini telah menyulitkan petani dalam penggunaan *pranata mangsa*<sup>10</sup>. Jika perubahan iklim berkembang makin ekstrem, bisa dipastikan desa akan kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan pangan. Urbanisasi dan *climate change* bersumber dari asal yang sama, yaitu industrialisasi. Ironisnya, negara-negara belum/ sedang berkembang seperti Indonesia justru sedang menggebu mengejar predikat negara industri.

Adakah pilihan lain menjadi maju dan sejahtera tanpa harus menjadi negara Industri terlebih dahulu? Jawaban ini akan menjadi penentu apakah kemerdekaan pangan, sandang dan papan bagi desa bisa diwujudkan atau tidak. Saya akan menjawabnya dengan sebuah konsep pemikiran yang saya susun sendiri yang saya namakan *Cyral-Spiriterial*. *Cyral* dari kata City+Rural, sebagai pegiat desa memang mestinya saya mendahulukan desa (*rural*), tapi koq jadinya “Rultry”

---

9 Ungkapan dalam Bahasa Jawa. Artinya kurang lebih , 'perasaan penuh lapang dada.'

10 Tatanan musim



atau “Ralcy” rasanya kurang *sedep* dan *wagu*<sup>11</sup>, *yo wis* saya pakai *Cyral* saja. *Spiriterial* berasal dari Spiritual+Material. *Cyral-Spiriterial* ini sebuah era setelah era industri, ketika dikotomi dalam bagai aspek kehidupan kemudian melebur membentuk tatanan nilai-nilai baru. Oya, pemikiran yang saya susun ini bukan hasil riset akademis. Saya hanya seorang “desa-iner”, desainer yang tinggal dan bekerja di desa dan menjadikan desa sebagai pijakan berpikir dan berkarya. Sebagai orang yang berjiwa bebas, saya memahami ilmu desain sebagai ilmu dasar yang sebenarnya juga kita temukan dalam hampir semua disiplin ilmu lain. Desain ini ilmu yang saya suka karena kreativitas dan imajinasi menjadi salah satu pilar utamanya. Dan menariknya ketika di eja ulang pun, kita bisa menemukan Desa dan In (-donesia) di sana, demikian juga kata Indonesia, saya menemukan kata “desa” dan “desain” di sana. Dalam menyusun pemikiran ini saya juga tidak menggunakan metodologi ilmu sosial dan maupun ekonomi. Saya menerapkan metode *design thinking*, itu pun saya pakai secara *awangan*<sup>12</sup> saja. Metode *ndeso* “*othak-athik gathuk*” jujur saja paling banyak saya pakai, semoga setelah diteliti para ahli nanti memang *gathuk*.

## Cyral-Spiriterial

*Cyral Spiriterial* adalah sebuah skenario yang saya susun untuk menjelaskan tentang apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan apa yang seharusnya kita (masyarakat dunia) lakukan jika ingin mewujudkan cita-cita keberlanjutan kehidupan global. Satu

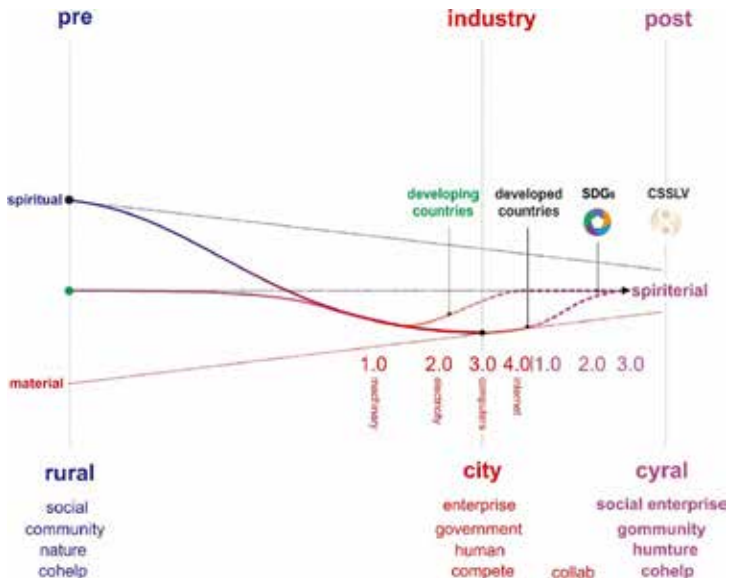
---

11 Tidak pas atau tidak tepat.

12 Lewat pembayangan di benak.



fenomena penting yang sering tidak kita sadari adalah fenomena disorientasi, yaitu kondisi kehilangan orientasi ketika kita diterpa arus informasi dan perubahan-perubahan sangat cepat yang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu menemukan “peta besar” adalah sesuatu yang penting kita lakukan, agar kita bisa terbebas dari situasi disorientasi dan bisa melihat dengan jelas di mana kita berada, ke mana arus besar menuju dan sebaiknya kita mesti *gimana*, ke mana dan lewat apa. *Cyral-Spiriterial* adalah sebuah “peta besar” yang saya coba susun untuk membantu kita terbebas dari situasi terdisorientasi sebagai individu, bangsa Indonesia dan umat dunia.



Pergeseran peradaban manusia sesungguhnya bukan hanya gerak linier ke depan, namun juga pergeseran vertikal spiritual-material. Situasi yang tidak seimbang akibat dominasi sisi spiritual maupun sisi material mendorong manusia mencari keseimbangan baru. Era Industri telah menyeret kehidupan ke dasar jurang materialisme dengan dampak kerusakan alam dalam skala global dan munculnya kekosongan batin. Kehidupan lama (tradisional) yang lebih seimbang menjadi inspirasi arah masa depan. Prototipe peradaban baru pun mulai menampakkan wujudnya, ketika nilai-nilai lama muncul kembali dalam wujud baru dan hal-hal yang berlawanan kemudian berkawan.

Negara-negara maju tidak lagi bergerak ke industri tahap lanjut, namun menapak era baru Era Pasca Industrial. Titik pergeseran ini sesungguhnya merupakan momentum yang sangat baik untuk mewujudkan kebersamaan dan gotong royong global yang menjadi prasyarat terwujudnya cita-cita keberlanjutan kehidupan di bumi. Bangsa-bangsa yang sedang/belum berkembang memiliki kesempatan untuk langsung menuju ke era baru, mereka berada dekat masa depan, namun selama ini melihatnya sebagai masa lalu. Negara-negara maju seharusnya membantu negara-negara sedang berkembang untuk bisa melihatnya sebagai masa depan dan mengajak untuk bersama-sama menuju era baru, era Pasca Industrial, era *Cyral-Spiritierial*.

Ada enam kata kunci yang penting dalam konsep *Cyral-Spiritierial*. Keenam kata kunci tersebut adalah sebagai berikut:



1. **Cyral:** Cyral ini menjelaskan fenomena desa yang mengadopsi hal-hal baik dari kota (teknologi, sistem informasi dll) dengan tetap menjaga nilai-nilai luhur kedesaannya, juga fenomena kota yang mengadopsi hal-hal baik dari desa untuk membuat kehidupan di kota menjadi lebih sehat dan seimbang. Fenomena Cyral tidak bisa diwujudkan ketika kota masih *over* populasi demikian juga sebaliknya ketika desa masih mengalami depopulasi dalam jumlah maupun kualitas SDM.
2. **Spiriterial:** ketika nilai-nilai spiritual *ndhelik*<sup>13</sup> dalam aktivitas keseharian. Sistem pemilahan sampah yang detail di Jepang sesungguhnya adalah *ritual khusyuk* menjaga kelestarian alam. Masyarakat tradisional yang selalu memiliki ritual upacara dalam setiap aktivitas kesehariannya sesungguhnya adalah juga masyarakat spiriterial.
3. **Socent:** singkatan dari *Social Enterprise* atau Wirausaha Sosial.
4. **Gommunity:** gabungan dari kata *Government* dan *Community*, yaitu sebuah situasi ketika pemerintah memiliki kesadaran pentingnya peran komunitas (semua pemangku kepentingan di luar pemerintah) dan melibatkannya dalam proses pembangunan dari sejak pemetaan, perencanaan dan pelaksanaan.
5. **Humture:** gabungan dari *Human* dan *Nature*, koreksi dalam era sebelumnya yang menempatkan manusia sebagai pusat peradaban yang berakibat pada kerusakan alam dan manusia itu sendiri.



6. **Cohelp**: karena saya tidak menemukan padanan kata “gotong royong” dalam bahasa Inggris, saya buat saja kata baru “Cohelp”. Menurut saya, gotong royong ini tingkatannya lebih tinggi dari *collab/collaboration*, karena di dalam gotong royong sudah tidak ada unsur transaksional, adanya semangat saling membantu, *tulung-tinulung*. Gradasinya *compete* (bersaing), *collab* (bekerjasama) dan *Cohelp* (saling membantu).

### ***Mletik Pager, Yuuuk!***

Melihat “peta besar” di atas, semestinya bangsa kita mengubah haluan pembangunan secepat mungkin. Kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk meraih predikat negara industri sesungguhnya merupakan gambaran tentang fenomena disorientasi yang menginfeksi para perumus kebijakan pembangunan nasional. Kita perlu secepatnya ***mletik pager***, atau kalau *samar kecangkol*, kita hanya perlu menemukan *exit gate* untuk keluar dari jalur jalan tol industrial. Kita perlu segera keluar, karena jalur tol meskipun lurus dan mulus serta *okeh barengane*<sup>14</sup> nyata-nyata menuju arah yang keliru. Mengambil jalan yang berbeda ini sebenarnya bukan memilih jalan yang lebih sulit, namun sebaliknya jalur yang jauh lebih pendek, meskipun barangkali memang harus *liwat galengan*<sup>15</sup> sawah dan *nyabrang kali*<sup>16</sup>.

Masa depan yang dituju oleh bangsa-bangsa maju sesungguhnya sama dengan banyak hal yang masih ada dalam kehidupan kita. Kita

---

14 Ungkapan dalam Bahasa Jawa. Artinya kurang lebih, “banyak kawan seperjalanannya.

15 Lewat pematang sawah.

16 Menyeberang sungai.



bahkan tidak perlu jalan jauh, cukup dengan membalikkan badan dan kita akan menemukan masa depan ada di sana. Kita memang perlu cuci muka, *ucek-ucek* mata dulu atau menggunakan kacamata baru agar bisa melihat dengan cara berbeda. Saya bisa melihat *papringan* (kebun bambu) yang lembab, gelap, banyak nyamuk dan jadi tempat sampah warga sebagai taman bambu yang indah, karena saya melihatnya dengan *mindset* yang berbeda. Dan *papringan* pun kemudian mewujud menjadi Pasar Papringan.

Untuk menjadi bangsa yang maju, tidak harus menjadi *magrong-magrong* seperti mereka. Pasar Papringan merupakan sebuah contoh bagaimana kita bisa menjadi setara dengan bangsa maju dengan apa yang desa miliki. Pasar Papringan adalah *plastic free market* karena orang desa dulu memang *ecofriendly*. Lembaran daun pisang dan keranjang bambu untuk kemasan dan wadah belanja dihasilkan di sana. Makanan *ndeso* yang dijual pun sehat karena bebas dari bahan tambahan industri dan juga *glutten free*. Alam desa kaya dengan bahan-bahan yang bisa membuat sedap makanan dan pewarna alam yang membuat makanan tampil menarik. Ketiadaan gandum karena memang bukan tanaman lokal yang kemudian melahirkan produk *glutten free, onone mung telo yo gaweyo soko telo*<sup>17</sup>.

## ***Pakdhe Ezio***

Demikian juga mestinya dengan Indonesia yang memiliki 74.954 desa, kita harus mulai dengan aset terbesar yang ada dan memiliki akar kuat di kita yaitu desa. Hampir semua negara di dunia ini awalnya adalah negara desa, dan kini sebagian warga dari

<sup>17</sup> Adanya ketela bikin ketela saja.

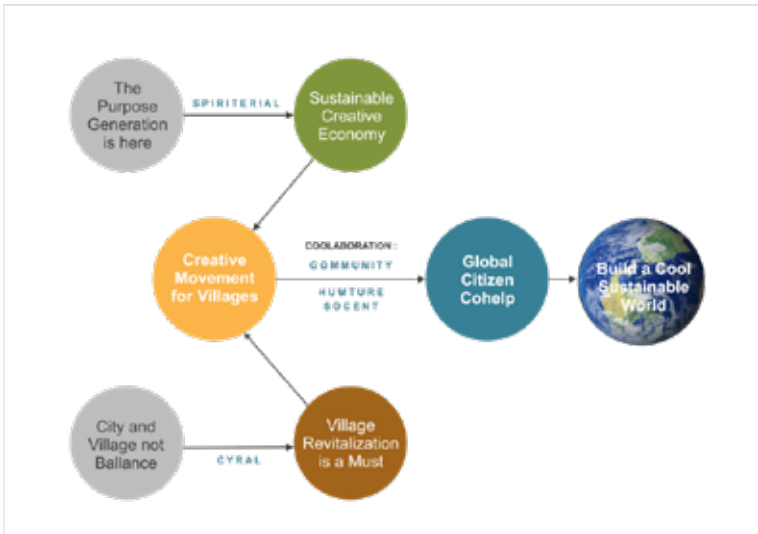


negara-negara maju mulai bisa melihat masa depan sesungguhnya ada di wilayah pedesaan. Pelatuk menuju cara pandang ini adalah Ezio Manzini, seorang desainer dan aktivis *Design for Social Innovation* dari Italy. Berdasarkan riset atas berbagai aktivitas baru, terutama dilakukan oleh anak-anak muda diberbagai belahan dunia, dia menyusun *SLOC Scenario*. *SLOC* adalah singkatan dari *Small, Local, Open, Connected*. Dia melihat kecenderungan bahwa ke depan orang akan memilih tinggal di komunitas kecil, memenuhi kebutuhan hidup dari sumber-sumber lokal, namun dalam komunitas yang terbuka dan dan terkoneksi secara global. Bukankah itu rumusan menarik tentang desa masa depan?

Dari pemikiran Ezio Manzini tersebut saya pun mulai mulai mengotak-atiknya dengan metodologi andalan saya *otak-atik gathuk*. Akhirnya saya bisa merunut dan mengurutkannya ke dua era ke belakang. Di Era Industri, saya menemukan *Big, Global, Open, Connected*, dan di Era Pra-Industri kembali menjadi *Small, Local* namun *Closed* dan *Isolated*. Era Industri dengan berbagai penemuan teknologi telah membuka ketertutupan dan keterisolasian desa-desa, meskipun waktu itu juga dibarengi dengan arus urbanisasi yang memberikan dampak negatif ke desa-desa. Namun, teknologi informasi dan komunikasi pula yang kemudian memberikan peluang untuk tinggal dan berkarya di pelosok desa ketika kehidupan kota telah dirasakan sudah tidak manusiawi lagi. Pemikiran *Pakdhe* Ezio ini yang menjadi pemantik awal penyusunan konsep *Cyral-Spiriterial*, selain tentu saja pengalaman dan pengetahuan yang saya dapat atas eksperimentasi kembali tinggal dan berkarya di desa yang



kemudian melahirkan Spedagi Movement, Gerakan Revitalisasi Desa dengan pendekatan kreatif.



### ***The Purpose Generation***

Revitalisasi Desa merupakan salah satu langkah strategis dan mendasar, karena desa-desa yang terdegradasi selama Era Industri sesungguhnya merupakan sumber dari hampir semua permasalahan dunia. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan orang tinggal di mana saja, sehingga desa maju-sejahtera, mandiri-lestari akan membantu mewujudkan keseimbangan desa-kota (Cyril). Lahirnya “*The Purpose Generation*” sekarang ini sebuah indikator nyata fenomena Spiriterial. Revitalisasi Desa yang digerakkan generasi ini akan membawa kehidupan global menuju era



Cyral-Spiriterial dimana cita-cita keberlanjutan kehidupan memiliki harapan besar untuk diwujudkan.



### ***Cyral-Spiriterial Sustainable Life Visions (CSSLV)***

Saya sendiri melihat permasalahan kemerdekaan pangan, sandang dan papan di desa itu tidak hanya urusan di desa, namun juga urusan negara dan masyarakat dunia. Kita semua tahu, bangsa kita terpaksa harus mengonsumsi makanan rakyat tempe dan tahu, namun kedelainya diimpor dari Amerika Serikat. Bukan sekedar

kedelai lho, namun kedelai GMO. Kedelai lokal yang ukurannya tidak seragam, namun lebih sehat dan lebih enak menjadi lebih mahal dan lebih susah diperoleh, kalah telak dengan kedelai impor yang ukurannya seragam, mulus dan *mlenuk-mlenuk*<sup>18</sup>. Ada hal-hal yang mendasar yang perlu dicermati dan dirumuskan ulang. *Sustainable Development Goals (SDGs)*, sebuah program global untuk mewujudkan keberlanjutan kehidupan—yang menurut saya prasyarat dasarnya adalah kebersamaan dan kesetaraan bangsa-bangsa di dunia—pun disusun oleh lembaga internasional yang di dalamnya unsur kesetaraan menjadi pertanyaan besar dengan tetap adanya 5 negara pemegang hak veto. Menurut masyarakat dunia membutuhkan visi baru agar kita benar-benar bisa mewujudkan keberlanjutan kehidupan global.

1. Tumbuhnya kesadaran peran utama manusia—makhluk paling cerdas di muka bumi ini—sebagai pemelihara dan penjaga alam.
2. Terjaganya jumlah populasi manusia dalam kapasitas daya dukung alam,
3. Terciptanya sistem ekonomi, politik, sosial dan hukum baru yang menyejahterakan manusia dan alam secara simultan,
4. Terjaganya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam koridor kesejahteraan manusia dan alam,
5. Terciptanya hubungan internasional yang didasarkan pada prinsip kesetaraan, keberagaman, persaudaraan dan kegotongroyongan global.



## Merdeka Pangan, Sandang, Papan.

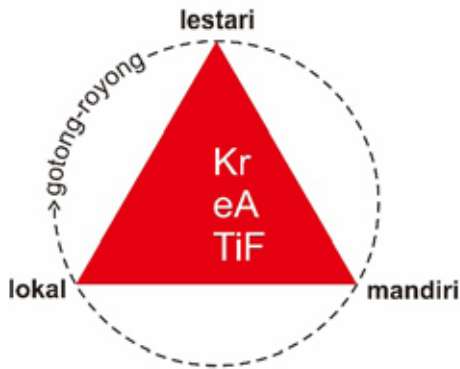
PR-nya kita ternyata banyak, namun yang paling penting adalah arahnya sudah benar. Hal ini akan menjadi bekal atau landasan yang sangat baik dalam merumuskan kebijakan dan program. Dalam situasi sekarang ini, saya kira mustahil meraih kemandirian desa seperti masyarakat adat Baduy Dalam yang 100% kebutuhannya bisa dipenuhi dengan bahan dan aktivitas produksi lokal. Mungkin masyarakat adat Ciptagelar di Sukabumi bisa menjadi rujukan yang lebih tepat. Masyarakat adat ini meskipun kuat menjaga nilai-nilai dan aturan-aturan adatnya, namun cukup terbuka dengan dunia luar dan juga teknologi baru sehingga mereka bisa dikatakan sebuah komunitas yang maju sejahtera mandiri lestari. Larangan memperjualbelikan beras menurut saya bukan saja cerdas dan orisinal, namun nyata menyelesaikan masalah. Apakah kita punya keberanian dan cukup *pede* menerapkan sistem ekonomi *ndeso* ini? Saya kira kita perlu terus menumbuhkan rasa percaya diri untuk menggali pengetahuan lokal-*ndeso* dan punya keberanian memadukannya dengan pengetahuan modern yang ada saat ini.

Dalam konsep *Cyral-Spiriterial* kemandirian itu tidak bisa dipisahkan dengan konsep kebersamaan dan kegotongroyongan, bukan hanya internal komunitas, namun secara horizontal dengan komunitas desa lainnya, secara vertikal dengan struktur komunitas/jenjang pemerintahan di atasnya. Posisi yang di atas adalah *ngemong*<sup>19</sup> dan melayani struktur di bawahnya dan semakin ke atas kebijakan dan program semakin makro, semakin ke bawah semakin detail. Aturan detail mestinya dirumuskan oleh

---

19 Mengasuh—Bahasa Jawa.





masyarakat lokal. Oleh karena itu konsep kemerdekaan atau kemandirian pangan, sandang dan papan yang paling realistis tidak diletakkan di tingkat desa, namun di tingkat Kabupaten. Itu pun dengan persentase, misal untuk kemandirian pangan bisa sampai 100%, sandang mungkin hanya 50% demikian juga papan 50%. Prinsip dasarnya adalah lokalitas, jadi mengoptimalkan sumber-sumber lokal dan memprioritaskan kebutuhan lokal. Setelah kebutuhan lokal terpenuhi, baru kemudian menyuplai kebutuhan tempat lain. Dalam ekonomi industri, karena orientasinya pertumbuhan dan profit sebanyak-banyaknya, yang sering terjadi mereka sibuk memenuhi kebutuhan luar. Untuk tetangga sekitar justru mereka memenuhinya dengan membeli dari sumber di luar desa mereka. Konsep dari Murakabi Movement, sebuah kerja gotong royong para seniman, desainer, arsitek, pegiat pangan lokal, dan pegiat koperasi kontemporer di bawah ini mungkin bisa menjadi



*trigger* pemikiran. Murakabi Movement mendefinisikan diri sebagai Gerakan kreatif berasaskan gotong royong untuk mewujudkan kelestarian kehidupan dengan menjadikan lokalitas dan kemandirian sebagai pijakan. Saat ini Murakabi sedang dalam proses pendirian Warung Murakabi di sebuah dusun di Kecamatan Minggir, Yogyakarta. Warung yang secara kelembagaan akan berbentuk koperasi ini diharapkan menjadi benih bagi tumbuh dan kukuhnya perekonomian lokal.

## **Gommunity**

Salah satu lembaga penting yang perlu didirikan di daerah adalah Lembaga Riset dan Pengembangan Daerah (Risbangda) yang bersifat independen, namun dalam bentuk lembaga gotong royong (gommunity) pemerintah dan pemangku kepentingan nonpemerintah. Sambil menunggu pembenahan di sisi sistem pemerintah, lembaga Risbangda ini mendesak didirikan untuk menyinergikan kekuatan-kekuatan dalam sebuah wilayah dan



mempercepat, mengefisienkan, mengoptimalkan aktivitas pembangunan daerah. Lembaga independen ini akan membantu menyelesaikan problem kelambatan akibat proses birokrasi yang panjang di jalur pemerintahan. Melalui lembaga ini potensi dan permasalahan daerah dipetakan bersama, kemudian dicarikan solusi pengembangan dan pemecahan bersama-sama. Pola ini akan mereduksi derajat *kemlesetan*<sup>20</sup> sebuah program karena sejak awal dilakukan bersama. Melalui lembaga ini akan tercipta ruang-ruang untuk melakukan eksplorasi dan eksperimentasi sebuah program atau solusi sebelum dituangkan dalam sebuah program. Lembaga ini akan menjadi mitra kerja Bappeda yang selama ini menjalankan fungsi riset, pengembangan dan perencanaan daerah.

## Penutup

Kita hanya perlu *mletik pager*, bukan lompatan katak (*leap frog*) yang memang mustahil kita lakukan.

## Profil Penulis

Singgih S Kartono. Pernah lihat produk radio kayu dan sepeda bambu? Itu adalah dua jenis produk dari sekian banyak karya yang dihasilkan oleh Singgih Susilo Kartono. Lelaki asal Temanggung ini adalah lulusan sarjana Desain Produk Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut Teknologi Bandung.

Selang dua tahun lulus, ia memutuskan pulang kampung. Saat itu, niatnya untuk mewujudkan impian tinggal dan berkarya di

---

20 Ketergelinciran



desa, tetapi tetap terkoneksi secara internasional. Impian tersebut terinspirasi dari tulisan Alvin Toffler dalam buku *Future Shock*.

Singgih meluncurkan produk-produk kayu dengan brand Magno yang mendunia. Tak hanya produknya laris manis, Singgih juga mendapat banyak penghargaan desain internasional prestisius disertai publikasi sangat luas.

Selain Magno, ada juga Spedagi. Sebuah gerakan revitalisasi desa dengan ikon sepeda bambu. Ilmu desain bagi Singgih bukan semata untuk menciptakan produk, tapi juga sebagai upaya memperbaiki kehidupan dan menjaga kelestarian alam. Selain sebagai *founder* Spedagi Movement dan bergiat di dalamnya.





# Agroekologi: Jalan Keluar yang Memesona<sup>1</sup>

Nissya Wargadipura

Salah satu masalah besar kita pada masa pandemi Covid-19 ini adalah *Food supply chain* atau rantai pasokan pangan. Di level domestik, sampai sekarang, banyak daerah saling mengandalkan hasil produksi daerah lain untuk memenuhi kebutuhan. Persoalan ini menjadi makin kompleks mengingat sampai sekarang Indonesia

---

1 Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal , Sabtu, 4 Juli 2020, Seri 7: Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru dan disarikan oleh Ageng Indra

masih tergantung pada impor bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sampai akhir November 2018, tercatat Indonesia telah mengimpor gandum sebanyak 9,2 juta ton, 2,4 juta ton kedelai, 2,2 juta ton beras, 2,5 juta ton garam dan 4,6 juta ton gula. Dua jenis rantai pasokan bahan pangan tersebut—rantai pasokan dari satu daerah ke daerah lain di dalam negeri dan dari luar negeri ke Indonesia—sama-sama mengalami kemacetan akibat ketakutan terhadap meluasnya wabah Covid-19.

Terhambatnya distribusi pangan akibat pandemi membuat harga komoditas bahan pangan menjadi tidak menentu. Contoh dari fenomena ini bisa kita saksikan pada video *viral* mengenai kangkung yang dilempar-lemparkan kepada orang-orang di Malang. Pemberlakuan PSSB membuat pedagang tidak bisa memasok kangkung ke Surabaya seperti biasa sehingga jumlah persediaan tetap, sementara permintaan di daerah-daerah lain sedikit. Kasus yang sama juga kasusnya dengan tomat di Garut yang dibuang-buang karena harganya anjlok dan membagi-bagikannya hasil sayuran para petani Ungaran (Jawa Tengah) yang khawatir hasil panennya tidak laku dijual di pasar sayur. Sementara di tempat lain, terutama di kota-kota yang tidak memiliki lahan pertanian yang bisa menyuplai kebutuhan sayur dan bahan pangan sehari-hari mereka, harga komoditas tersebut melambung tinggi. Situasi semacam ini menyebabkan baik desa dan kota sama-sama sedang terjebak dalam ancaman krisis pangan.

Kenapa kita mesti mengalami masalah logistik separah ini dalam situasi seperti sekarang? Kenapa di tanah surga yang “tongkat kayu dan batu jadi tanaman” ini bisa sampai terancam krisis pangan?



## Jebakan Revolusi Hijau

Salah satu penyebab munculnya ancaman krisis pangan yang sedang kita hadapi sekarang ialah karena kecenderungan sistem pertanian kita yang monokultur—menanam hanya satu jenis tanaman—untuk memenuhi kebutuhan pangan kita. Sistem pertanian monokultur yang diterapkan sejak era kolonial Belanda ini berkontribusi pada lenyapnya keanekaragaman hayati—terutama jenis-jenis tanaman pangan—yang menjadi nilai lebih dari kawasan tropis seperti Indonesia. Dampak lain dari sistem ini adalah semakin menurunnya unsur hara dalam tanah karena penggunaan pupuk dan obat-obatan pengusir hama secara masif. Semula sistem penanaman secara monokultur diterapkan di bidang kehutanan dan perkebunan. Rezim Orde Baru kemudian memasukkan agenda sistem pertanian monokultur secara masif demi ambisinya untuk menciptakan swasembada pangan di samping untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari bisnis plasma nutfah, pupuk kimia dan pestisida. Agenda inilah yang di kemudian hari dikemas dalam label mentereng bernama “*Revolusi hijau*”.

Revolusi hijau adalah sistem pertanian modern ketika tanaman yang ditanam hanya satu jenis saja dan dalam jumlah besar. Sistem ini bergantung pada mekanisasi, penggunaan pupuk kimia, pestisida, dan herbisida sintetis. Pupuk kimia meningkatkan zat hara di tanah dalam waktu singkat. Pestisida dan herbisida mengurangi risiko rusaknya tanaman oleh hama. Seragamnya tanaman juga mempermudah perawatan, menekan biaya tenaga kerja, dan memperbanyak hasil produksi. Diperkenalkan sejak 1950-an, sistem ini dianggap paling efektif dalam menyejahterakan rakyat karena



menguatkan ketahanan pangan dan membuka banyak lapangan kerja bagi petani dan pengolah produk pertanian.

Sayangnya, kenyataan di lapangan tidak seindah bayangan. Monokultur merupakan sistem yang penuh risiko jangka panjang. Pemanfaatan lahan secara besar-besaran menyerap banyak nutrisi dari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah secara drastis. Bahan kimia dalam pupuk, pestisida, maupun herbisida juga dapat memberi dampak buruk terhadap kemampuan tanah memulihkan kesuburannya sendiri. Sedang di sisi lain, kemiripan genetik tanaman mempermudah persebaran hama dan penyakit. Ketika satu rebah, semua lemah. Bila tidak ditangani dengan baik, seluruh tanaman bisa rusak. Salah satu contohnya adalah pisang-pisang di daerah Sagara yang banyak bertekstur lembek dan jika dibuka isinya penuh lendir, atau akrab disebut *ngacay*.

Revolusi hijau juga tidak bisa dibilang berhasil dalam menyejahterakan petani. Sistem ini sangat bergantung pada bahan kimia dalam pupuk dan pembasmi hama. Untuk membelinya dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Sementara, hasil pertanian pun kerap kali tidak bisa dinikmati oleh petani yang menanamnya, terutama buruh tani yang tak punya tanah sendiri. Lutfi Fauzi Rahman suatu kali bercerita tentang petani yang menanam padi, setelah mendapat bayaran dari penjualan padi, menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli beras. Peristiwa ini mencerminkan betapa aktivitas pertanian tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, namun telah memasuki jebakan dari lingkaran setan produksi-distribusi-konsumsi yang dikendalikan sepenuhnya oleh pemodal.



Melalui Serikat Petani Pasundan dan berbagai organisasi lain di tanah air, saya bergelut dengan permasalahan petani. Tujuh belas tahun tinggal menetap bersama para petani memperlihatkan pada saya bahwa revolusi hijau gagal menjembatani kesenjangan antara desa dan kota. Banyak pemilik tanah yang luas bukan warga desa, sementara orang-orang desa berangkat ke kota karena lahan-lahan di tempat asalnya sudah sangat terbatas. Bahkan ketika banyak petani sudah punya tanah sendiri dengan cara seperti okupasi, banyak dari mereka tetap saja miskin, tetap di bawah kesejahteraan, tetap pergi ke kota, dan tetap menjual tanahnya ketika disertifikasi.

Pengalaman bergelut selama tujuh belas tahun bersama Serikat Petani Pasundan mengajari saya bahwa sistem pertanian monokultur tidak maksimal. Sungguh patut disayangkan apabila kita terlalu mengandalkan sistem ini mengingat di negara agraris ini ada banyak sekali kemudahan, baik itu berbasis tanah, udara, maupun air. Oleh karena itu, harus ada perubahan pola bertani yang bukan lagi monokultur.

## **Agroekologi, Sebuah Jalan**

Karena resah akan revolusi hijau di desa-desa yang menjebak petani dalam kemiskinan, saya berusaha mencari alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap input eksternal seperti pupuk, pestisida dan herbisida. Berangkat dari keresahan itulah saya menemukan satu desain yang mudah dan murah berbasis polikultur bernama agroekologi. “Agro” berarti pertanian, sementara “Ekologi” ialah kembali ke alam. Artinya, desain ini menyerahkan



input eksternal pada peran alami masing-masing. Misalnya, mengandalkan kacang-kacangan sebagai pupuk ketimbang zat kimia, atau membiarkan ular dan burung hantu menangkap tikus yang menjadi hama. Mungkin ada banyak penyebutan untuk sistem semacam ini, seperti permakultur atau pertanian organik, tapi semua itu mengerucut pada pangkal yang sama, yaitu pertanian *rahmatan lil alamin* atau pertanian yang memberi rahmat bagi semesta.

Saya bukan dari keluarga petani dan tidak sejak awal memutuskan menjadi petani. Semula keterlibatan saya di dunia pertanian bersama Serikat petani Pasundan mengharuskan saya mempelajari pertanian secara autodidak. Dari sana saya berpikir bahwa cara terbaik untuk mengembangkan desain pertanian ini ialah dengan membuka lembaga pendidikan. Saat suami saya membangun pesantren, kami memutuskan untuk sekaligus menjadikannya laboratorium pertanian.

Dulu, berkebun, memelihara ikan, dan bertani merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan pesantren. Hal semacam itu mulai ditinggalkan sejak banyak pesantren berkembang ke bentuk pesantren modern. Saya meminta agar pesantren yang kami buat berbeda dari yang lain. Pesantren ini harus jadi tempat orang-orang membicarakan kerusakan ekologi dan wadah bagi gerakan berbasis pemulihan ekologi. Pendidikannya *rahmatan lil alamin*, pendidikan yang bicara segala aspek, bukan saja pertanian, tapi lintas itu semua. Dengan niat itu, kami berdua keluar dari Serikat Petani Pasundan dan mendirikan Pesantren Ekologi Ath Thaarig di Garut.



Agroekologi adalah hasil dari refleksi dan evaluasi kami di Pesantren Ekologi Ath Thaariq. Kami menyadari, situasi bertani yang gagal menyejahterakan dan tak ramah lingkungan ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan hati. Dari mempelajari agroekologi, kami menemukan bahwa cara bertani paling baik adalah dengan cinta. Berbasis cinta berarti menjunjung tinggi semua makhluk hidup. Untuk itu, kami memberi kesempatan hidup kepada tikus, ular, dan burung hantu. Dan itu justru membantu kami. Karena dengan menghadirkan rumah ular, misalnya, bukan hanya ular-ular akan menangani tikus, tapi rumahnya pun memberikan hasil. Sebab, rumah ular itu sendiri adalah rumput, yang di antaranya ada pegagan, nangka-nangkaan, dan banyak lainnya yang bisa menjadi tanaman obat.

Kami mengembangkan agroekologi di Parahyangan yang selama ini dikenal sebagai tempat bersemayam para dewa. Di sini, pupuk urea digantikan dengan pupuk alami yang teramat sederhana dan mudah ditemukan. Salah satunya adalah *azolla pinnata* yang tumbuh dengan masif di sawah-sawah dan hanya perlu kami benamkan langsung di dalam tanah. Kacang-kacangan juga bisa menjadi pupuk. Darinya, kami menggunakan akar, batang, serta daunnya. Kami pun membuat pupuk organik cair dari tanaman kami sendiri: kalau kami mau menguatkan batang, kami memakai pupuk batang-batangan; kalau kami ingin menghijaukan daun, kami pakai daun-daunan. Burung, kupu-kupu, dan binatang lain hidup sehat di pekarangan kami karena tak tercemar zat kimia.

Delapan tahun lalu, di wilayah Parahyangan hampir semua petani menerapkan pertanian padi monokultur. Tanahnya keras



karena terlalu mengandalkan pupuk kimia. Namun, begitu kami menerapkan agroekologi, tanah yang tandus bisa kami pulihkan dengan menggunakan kacang koro, tanaman legum yang mengandung nitrogen tinggi. Kami juga tidak membuang atau membakar jerami, tetapi menumpuknya saja agar mengompos dengan sendirinya. Setelah pulih, sebenarnya tanah tidak lagi memerlukan pupuk karena nutrisinya sudah dicukupi dirinya sendiri. Sebab, tanah yang menjadi media tanam tersebut bukan tidak subur, melainkan kekurangan unsur hara. Maka ketika kami mendapat benih dari tempat lain, mereka bisa tumbuh dengan sendirinya, seperti bunga rosela atau pegagan.

Lahan produktif di Pesantren Ekologi Ath Thaariq dibagi berdasarkan zonasi. Ada zona sawah, kebun, kandang, kolam dan *seed saving area*. Sejumlah zona dibedakan berdasarkan masa tanam, seperti zona untuk jangka menengah 3-4 bulan dan zona untuk makanan sehari-hari.

Dengan sistem ini, pekebun tidak perlu mengenal penderitaan gagal panen. Kalaupun ada tanaman yang gagal panen, masih akan ada tanaman pengganti. Sebagai contoh, jika tidak ada markisa, masih ada sirsak; jika tak ada sirsak, masih ada ceri monyet. Terlebih bila ada *edible garden* seperti kebun kami, maka bunga, biji, dan buah bisa dimakan semua. Inilah keunggulan desain berbasis polikultur.

Dari tanah yang hidup, hadir keluarga yang kuat. Itulah yang kemudian menjadi prinsip agroekologi. Sebab, agroekologi meyakini keluarga yang kuat mendapat asupan makanan yang tidak itu-itu saja: dari kangkung kembali ke tahu, lalu ke kol, lalu ke tahu lagi.



Dalam satu olahan, kami mendapat 12 tanaman, yang berarti 12 olahan bahan pangan. Daya kreativitas dan inovasi yang tinggi akan berkembang dari keluarga semacam ini karena anak-anak menjadi kuat berpikir, kuat bergerak, dan kuat untuk berbagai hal terkait pendidikan.

## **Benih Warisan, Sebuah Tonggak**

Pada situasi pandemi ini, bisa dikatakan agroekologi menjadi pemenangnya. Ketika teman-teman kami di desa dan kota sama-sama menjerit karena monokultur, kami tetap tenang karena karbohidrat kami tidak satu. Kami tidak hanya bergantung pada beras, tapi ada singkong, salad, kacang-kacangan, dan tanaman lain. Tanah kami tidak luas, tapi tidak ada tanah dan air yang mengganggu di pinggir-pinggir pematang kami. Tanah kami semua ditanami karbohidrat yang tinggal dipetik.

Berbagai tanaman obat juga tersedia untuk menjaga kesehatan. Bahkan untuk kebutuhan *hand sanitizer*, kami membuat sendiri dari daun sereh dan lidah buaya yang hanya sejengkal dari pintu rumah kami. Efektivitasnya pun sudah teruji klinis. Semua ini menunjukkan pada kami bahwa menanam hanya satu tanaman saja adalah sia-sia, terutama di masa pandemi seperti sekarang. Oleh karena itu, harus ada perubahan pola bertani: bukan lagi monokultur, melainkan polikultur.

Namun, dari mana sumber produksinya? Sumbernya ialah benih warisan. Ini benih yang sangat adaptif di daerah setempat. Disebut benih warisan karena merupakan benih tanaman lokal



yang bisa dikembangbiakkan sendiri secara terus menerus oleh para petani dan para pekebun. Contoh benih warisan ini, untuk menyebut beberapa, adalah kundur, orok-orok, telang ungu, saga rambat, maupun kacang koro.

Banyak di antaranya mungkin sudah cenderung ditinggalkan karena tergantikan oleh bahan makanan yang diimpor, seperti kacang koro tergerus kacang kedelai. Namun, mereka adalah *super food* dan pada masa tertentu bisa menjadi penyelamat. Saat harga kacang kedelai melonjak akibat krisis ekonomi pada 2008, misalnya, kacang koro menjadi solusi bagi para pengusaha tahu dan tempe di Wonogiri untuk tetap beroperasi.

Pada masa pandemi ini, penggunaan benih warisan dapat memperkuat ketahanan pangan kita ke depannya. Selama dibudidayakan, inventori benih ini akan tumbuh terus dan penyumbang benih warisan ini akan terus bertambah. Benih warisan adalah tonggak dari terwujudnya agroekologi dan kedaulatan pangan yang mandiri. Laboratorium seperti ini butuh dimasifkan dan diperbanyak karena dapat membebaskan petani kecil yang rentan dari ketergantungan pada pemodal dan subsidi negara.

Sudah saatnya ancaman kerawanan pangan menjadi momentum untuk mengambil jalan keluar yang secara nyata bisa kita kerjakan dengan apa yang selama ini ada dalam diri kita. Bertahun-tahun kita dibuai oleh janji produk bahan pangan yang melimpah lewat pertanian monokultur, pupuk dan herbisida kimia untuk memastikan hasil panen, dan bibit unggul yang dalam prakteknya justru mematikan bibit lokal. Buaijan janji itu membuat kita lupa



warisan struktur tanah, bibit lokal, dan ekosistem yang sangat mendukung pertanian polikultur yang berbasis pada agroekologi. Sampai kapan kita mau dibuai janji kosong dan memungguni berkah alam yang bisa melimpahi kita dengan bahan pangan tersebut?

### **Profil Narasumber**

Nissya Wargadipur. Lahir dan tumbuh di lingkungan pesantren, ia justru gelisah saat melihat pergeseran konsep ke arah pesantren modern. Karena kemudian santri mulai meninggalkan aktivitas berkebun, bertani, dan memelihara ikan. Padahal, dulu tiga hal tersebut jadi bagian tak terpisahkan dari aktivitas keseharian santri. Kini akibat konsep pesantren modern, santri menjadi tidak mandiri dan cenderung pasif karena semua dilayani dan difasilitasi.

Pengalaman tersebut kemudian mendorong Nissya Wargadipura bersama suami mengggagas Pesantren Ekologis At-Thariq di Garut, Jawa Barat. Konsepnya memadukan kesadaran ekologis dan spiritualitas. Sebelumnya, ia mengikuti kursus di The Navdanya Biodiversity Conservation Farm, Earth University, India. Berkat beasiswa dari Dr. Vandana Shiva tersebut, Nissa belajar tentang tanah dan kehidupan di dalamnya. Dengan kesadaran tersebut, ia memahami bahwa manusia bisa menyelamatkan diri tanpa bantuan bahan kimia seperti pestisida.





# Optimalisasi Partisipasi Pengembangan Usaha Rakyat Untuk Desa Berdaulat<sup>1</sup>

**Maria Loretha**

**P**andemi Covid-19 membuka mata kita bahwa masa depan tak selalu baik-baik saja. Ada berbagai ancaman yang sewaktu-waktu melanda. Salah satunya ialah perkara krisis pangan. Potensi krisis pangan di tengah pandemi hari ini ditengarai akibat berhentinya jalur distribusi pangan seperti pelabuhan dan jalur darat sebagai

---

1 Makalah disampaikan dalam kegiatan Kongres Kebudayaan Desa tanggal , Sabtu, 4 Juli 2020, Seri 7: Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru dan disarikan oleh Rofi Ali Majid

dampak dari diberlakukannya pembatasan sosial di berbagai belahan dunia. Akibatnya, daerah yang memiliki ketergantungan pangan dari daerah lain—termasuk bahan pangan impor—menjadi kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan. Badan pangan dunia, *Food and Agriculture Organization* (FAO) telah memperingatkan ancaman krisis pangan tersebut sejak pandemi Covid-19 mulai dirasakan di berbagai belahan dunia.

Lalu bagaimana ketahanan pangan Indonesia hari ini? Kondisinya tidak jauh berbeda. Ancaman tersebut masih berlaku meskipun kita terlalu sering mendaku sebagai negeri agraris. Jikalau kita sudi meluangkan waktu sejenak untuk menilik data Badan Pusat Statistik, bisa kita simpulkan kalau swasembada pangan negara ini masih jauh panggang dari api. Dalam rentang waktu Januari—November 2018, Indonesia telah mengimpor gandum sebanyak 9,2 juta ton, 2,4 juta ton kedelai, 2,2 juta ton beras, 2,5 juta ton garam dan 4,6 juta ton gula.

Memang tidak sedap manakala kita mengetahui fakta di atas. Namun, rapuhnya ketahanan pangan yang menjadi realita negeri kita hari ini tak boleh membuat kita patah arang. Di balik itu semua kita juga memiliki banyak potensi yang bisa jadi tameng bagi cita-cita swasembada pangan. Iklim di negeri ini memungkinkan berbagai jenis tanaman pangan bisa tumbuh dengan baik. Tanah yang subur juga memungkinkan berbagai jenis tanaman pangan bisa tumbuh dengan baik. Kita punya laut luas yang memungkinkan berbagai macam ikan hidup. Kita masih punya banyak benih lokal tanaman pangan yang unggul. Dan kita masih punya lebih dari 250 juta sumber daya manusia yang bisa mengelola itu semua.



Satu hal yang belum kita miliki, yaitu perkara kesadaran, lebih spesifiknya kesadaran untuk memanfaatkan semua potensi tersebut. Kesadaran tidak bisa dilepaskan dari paradigma dan paradigma masyarakat Indonesia tentang pangan hari ini hanya terpaku pada satu jenis bahan pokok pangan—beras. Kerap kita mendengar sejumlah omongan, “kalau belum makan nasi, berarti belum makan”. Untuk memahami bagaimana masyarakat Indonesia sampai ke cara pandang macam itu, kita perlu menilik ulang sejarah pangan di Indonesia.

Pada awalnya tak semua masyarakat Indonesia memilih beras sebagai makanan pokok. Masing-masing daerah dahulu memiliki kearifan pangan lokal, sesuai dengan iklim dan kondisi geografis yang melatarbelakangi masing-masing daerah. Ada sagu yang bisa tumbuh dengan subur di Papua dan Maluku, jagung yang jadi makanan pokok beberapa daerah di Jawa Tengah, Sulawesi, Madura dan Nusa Tenggara Timur, singkong di Gunungkidul yang tanahnya kering dan berkapur, juga kentang, pula umbi-umbian yang banyak dijumpai di seluruh wilayah Indonesia. Kesemuanya mengandung karbohidrat dan layak disebut sebagai bahan pangan.

Namun, pada masa Orde Baru program swasembada pangan diartikan secara sempit dengan hanya memandang beras sebagai bahan pangan pokok. Hal tersebut dimanifestasikan dalam bentuk pembukaan lahan padi besar-besaran di daerah luar Jawa. Ada yang berhasil, tetapi banyak pula yang gagal sebab tak semua daerah memiliki tanah dan iklim yang cocok untuk ditanami padi. Program tersebut membawa sebuah dampak negatif saat masyarakat menjadi begitu bergantung pada beras.



Paradigma semacam itu harus mulai diubah, sebab setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi bahan makannya masing-masing. Semisal, Jawa dengan banyaknya sumber air dan tanah yang subur akan cocok jika ditanami padi. Namun, Nusa Tenggara Timur yang memiliki tanah kering dan berbatu kurang cocok. Jika tetap dipaksa untuk ditanami padi, maka besar kemungkinan akan terjadi gagal panen. Termasuk di Maluku dan Papua dengan lahan gambutnya, yang barang tentu akan lebih maksimal jika ditanami sagu.

Apabila cara pandangnya sudah demikian, maka risiko krisis pangan akibat pembatasan sosial akan dapat diminimalisasi. Dari sini risiko terjadinya krisis pangan tidak akan merambah ke krisis-krisis lain seperti ekonomi dan politik. Hal ini sangat penting, sebab makanan adalah basis kebutuhan dasar manusia paling utama. Dengan pangan yang berdaulat, manusia dapat berkegiatan dengan normal dan dari sanalah kebudayaan berkembang. Sebaliknya, jika krisis pangan terjadi dan tak diatasi, maka dampaknya akan menjalar dan menjelma menjadi krisis-krisis lain.

Untuk memaksimalkan potensi-potensi yang telah disebutkan di atas, diperlukan langkah-langkah yang taktis dan konkret. *Pertama*, perlu dilakukan pemetaan sosial dengan cara mengidentifikasi *stakeholder* dan potensi pengembangan diri pada komunitas warga desa. Secara lebih detail, langkah ini termasuk dalam mengidentifikasi tokoh kunci yang bisa digandeng, membuat pemetaan dukungan sosial, memahami pola hubungan sosial antara kelompok dengan tokoh kunci, hingga mengisolasi wacana kelompok-kelompok kontraproduktif. Langkah-langkah taktis dan konkret tersebut tentunya tidak mudah sehingga diperlukan pendekatan yang



tepat untuk menuju ke arah sana. Pendekatan dalam konteks ini akan lebih efektif, misalnya, jika kita menggunakan bahasa daerah, sebab pengembangan pangan suatu daerah dalam rangka menuju ketahanan pangan daerah maupun nasional tersebut ruang geraknya biasanya di satu wilayah yang memiliki kesamaan budaya. Penggunaan bahasa daerah bisa memunculkan keterikatan yang lebih kuat di antara mereka.

Langkah *kedua*, penting bagi kita untuk merumuskan dukungan dari pihak luar dalam rangka menguatkan kapasitas *building* menuju proses perubahan. Dukungan dari pihak luar juga akan memperkuat, membuat masyarakat menjadi lebih yakin dengan apa yang akan dikerjakannya. *Ketiga*—yang tak kalah penting—yaitu kolaborasi lintas *stakeholder* baik pemerintah, *Non Government Organization*, pelaku pertanian, organisasi sosial-budaya, maupun akademisi. Diperlukan riset-riset yang menunjang pengembangan potensi desa yang belum terjamah, seperti pengembangan benih lokal berkualitas, bantuan alat-alat penunjang yang dapat mempermudah masyarakat dalam meningkatkan produktivitas potensi lokal, hingga sosialisasi produk lokal agar lebih dikenal masyarakat luas.

Langkah-langkah di atas terbukti manjur manakala kami mengupayakan diversifikasi pangan dalam bentuk penanaman sorgum di Nusa Tenggara Timur (NTT). Perlu diketahui bahwa sebagian besar lahan di sana adalah lahan kering yang kurang cocok untuk ditanami padi. Bahkan tanah tempat kami menanam sorgum dipenuhi banyak batu, sehingga diksi tanah berbatu kurang cocok untuk digunakan. Sebagai gantinya, lahan tersebut lebih tepat disebut sebagai batu bertanah daripada tanah berbatu.



Batu bertanah inilah yang menjadi pijakan kami berpikir tentang bagaimana menemukan potensi di tengah kondisi semacam ini. Di tengah-tengah arus besar cara berpikir pemerintah dalam mewujudkan daulat pangan hari ini yang masih “padi sentris”, ketika pengolahan lahan untuk ditanami tanaman pangan harus menggunakan traktor dan sebagainya, apa yang akan kami tanam dan bagaimana cara pengolahannya sesuai dengan keadaan iklim dan struktur tanah kami?

Dari situ muncul sebuah pemikiran mengenai pentingnya memahami konteks lokal, bahwa padi tak akan pernah bisa tumbuh di lahan batu bertanah. Tanaman yang bisa tumbuh sudah tentu tanaman yang berasal dari benih lokal. Jika tetap memaksa untuk menanam tanaman dari luar seperti padi, maka barang tentu persentase keberhasilannya akan kecil. Dari sana kemudian kerap digulirkan isu soal NTT krisis pangan dan sebagainya. Isu-isu macam ini muncul karena kesalahan pola pikir yang memaksakan. Padahal dengan pangan lokal, masyarakat sekitar sudah sangat berdaulat.

Dalam pengembangan sorgum sebagai komoditas pangan lokal ini, berbagai elemen mulai dari anak-anak muda, ibu-ibu sampai tokoh masyarakat, semuanya ikut bergerak. Bahkan kelompok ibu-ibu menjadi elemen penting di masa-masa awal kami merintis penanaman sorgum. Mereka adalah elemen masyarakat yang kukuh dan keras mengupayakan agar sorgum dapat menjadi basis pangan di desa. Dari sini kebersamaan mulai muncul hingga banyak orang beralih menanam sorgum.



Antusiasme ini bukan tanpa alasan. Sorgum memiliki banyak keunggulan mulai dari kaya akan serat, hingga tepungnya yang dapat dibuat berbagai olahan roti dengan rasa lezat—tak kalah dengan tepung terigu. Sorgum juga dapat diolah menjadi beras sorgum yang memiliki nilai gizi yang baik sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai bahan makanan pokok sehari-hari.

Selain mampu menunjang kedaulatan pangan, penanaman sorgum juga memiliki fungsi lain dalam kaitannya dengan keserasian alam. Penanamannya tak membutuhkan pembukaan lahan dengan cara penebangan pohon seperti pencetakan lahan baru yang diwacanakan pemerintah—yang dalam hal ini justru mengganggu keseimbangan ekologis dan memunculkan berbagai potensi bencana seperti tanah longsor.

Keunggulan lainnya yang tak kalah menarik adalah penanaman sorgum di tempat kami justru menjadi ikon wisata baru, sebuah agrowisata dengan komoditas tanaman pangan yang belum banyak dikembangkan. Banyak tamu dari berbagai daerah baik lokal maupun mancanegara yang datang langsung ke lokasi penanaman untuk melihat langsung bagaimana tanaman sorgum dibudidayakan. Ini tentunya sebuah hal yang sangat positif bagi perkembangan kedaulatan desa. Jerih payah kami kian terbayar tuntas manakala pemerintah mulai mengakui sorgum sebagai komoditas pangan lokal yang perlu dibudidayakan.

Meskipun keberhasilan demi keberhasilan telah dilewati, apa yang kami kerjakan masih belum sempurna. Ada beberapa kendala yang menjadi tantangan dalam keberlanjutan diversifikasi



pangan ini. *Pertama*, sorgum masih dianggap makanan inferior jika dibandingkan dengan beras sehingga menghambat proses pengenalannya ke masyarakat yang lebih luas. Hal ini disebabkan oleh paradigma pemerintah yang masih mengutamakan beras sebagai komoditas pangan pokok. Oleh karenanya, masih perlu peran banyak pihak untuk memopulerkan sorgum sebagai makanan pokok dan masih diperlukan pengembangan strategi yang tepat sampai bahan pangan ini benar-benar bisa menggantikan beras sebagai makanan pokok di wilayah kami.

*Kedua*, keterbatasan petani dalam memproduksi benih sorgum. Ada banyak benih lokal yang mesti digali untuk menemukan benih yang unggul. Di sini peran riset baik dari kalangan pelaku pertanian, akademisi, maupun lembaga pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap isu pangan sangat diperlukan agar produksi benih dapat ditingkatkan. *Ketiga*, belum berkembangnya industri dan pengolahan pasca panen pada sentra produksi yang menghasilkan biji, batang, daun untuk pangan, pakan dan energi. Hal ini perlu dikembangkan guna meningkatkan nilai komoditas seluruh bagian tanaman sorgum. *Keempat*, pembenahan organisasi tani atau kelompok tani dan penguatan keuangan lembaga tersebut. Dengan adanya komitmen dari pihak pemerintah desa bersama masyarakat, hal ini dapat menjamin keberlanjutan budi daya sorgum di lahan yang kering.

Satu hal yang paling penting dari semua yang telah dibicarakan di atas adalah perihal semangat kebersamaan dalam mewujudkan daulat pangan lokal. Dengan hal tersebut, industri pertanian sorgum akan mempunyai prospek untuk meningkatkan taraf hidup petani, sebab tanaman sorgum bersifat multifungsi.



## **Profil Narasumber**

Maria Loretha. Ia dikenal sebagai ibu yang melahirkan kembali sorgum ke puncak daftar tertinggi produk makanan pokok sehari-hari bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengalahkan padi, jagung, dan ubi yang selama ini telah lebih dulu dikenal masyarakat. Nama lahirnya adalah Maria Loretha. Namun, masyarakat menyapanya dengan julukan “Mama Sorgum” berkat kegigihannya meluaskan sorgum, ia banyak menerima penghargaan pelestarian lingkungan. “Kita tidak bisa menunggu orang lain mengubah diri kita. Tetapi, perubahan harus kita mulai dari diri sendiri. Sehingga, Indonesia dapat menjadi negara yang terdepan,” tegas Mama Sorgum.





# Pertanian Organik Masyarakat Buton Utara dan Kekuatan Pangan Lokal<sup>1</sup>

Laxmi dan La Ode Gusman Nasiru<sup>1</sup>

Akhir-akhir ini, Buton Utara muncul dalam pemberitaan media lokal dan nasional atas keberhasilannya dalam menerapkan pertanian organik. Menurut Bupati Abu Hasan, lahan tanam padi organik mengalami perluasan menjadi 2000 hingga 5000 hektar

---

<sup>1</sup> Tulisan ini dikontribusikan untuk perhelatan gagasan Perempuan dan Anak dalam Webinar Sesi 7 Kongres Kebudayaan Desa (KKD), melalui *Call for Paper*.

dari sebelumnya 800 hektar.<sup>2</sup> Menteri pertanian memberi respons positif atas kemajuan pertanian organik di Buton Utara dengan mengunjungi langsung Desa Dampala Jaya untuk melihat potensi pertanian organik di Buton Utara.<sup>3</sup> Dalam kunjungan tersebut, Syahrul Yasin Limpo takjub terhadap potensi kekayaan alam Buton Utara dengan lahannya yang bagus dan tanah yang subur. Terkesan dengan kunjungannya tersebut, ia memberikan bantuan alat pertanian dalam jumlah besar.

Secara historis, masyarakat Buton Utara sejak lama menggunakan sistem organik dalam aktivitas pertaniannya. Mereka sudah bertani di ladang dan menanam ubi sejak abad ke-17. Pada masa itu sistem pertanian *sung kudalo*—sebuah sistem tukar pendapatan sesama anggota masyarakat—dimulai. Seiring waktu, praktik itu berganti nama menjadi *podawu-dawuako*. Konsep ini berhubungan dengan masa panen. Ketika musim panen tidak datang serentak di seluruh wilayah, pemukiman yang lebih dulu memasuki masa panen akan meminjamkan hasil panennya kepada masyarakat di pemukiman lainnya demi kepentingan *survival* dan subsistensi. Pinjaman akan dikembalikan jika suasana kembali kondusif. Prinsip subsistensi menggambarkan keselarasan dan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat Buton Utara pada masa Prabarata.<sup>4</sup>

---

2 Radar Sutra. 2017. "Ekspose 1 Tahun Pemerintahan Abu Hasan-Ramadio". Radarsultra.co.id, 21 Februari 2017, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://www.radarsultra.co.id/ekspose-1-tahun-pemerintahan-abu-hasan-ramadio/>)

3 Andi Nur Aminah. 2018. "Mentan Dorong Buton Utara Perluas Padi Organik". Republika.co.id, 26 Juli 2018, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian/18/07/26/pchg3d384-mentan-dorong-buton-utara-perluas-padi-organik>)

4 Harzan, et.al. 2013. *Buton Utara Pada Masa Pra Barata Abad XVI-VVIII*. Jurusan Pendidikan Sejarah. FIS. Universitas Negeri Gorontalo.



## ***Wakawondu sebagai Potensi dan Solusi***

Berdasarkan informasi BPS setempat, sekitar 70 persen masyarakat Buton Utara merupakan petani. Pemberdayaan masyarakat mendesak dilakukan demi mengimplementasikan strategi kemandirian sosial-ekonomi masyarakat Buton Utara, khususnya petani, dalam jangka panjang<sup>5</sup>. Sejauh ini, kebijakan telah diaplikasikan dari hulu hingga hilir, mulai dari pengambil kebijakan, staf ahli bidang pertanian, hingga pendamping lapangan di tingkat lokal. Dalam kaitannya dengan pengembangan pertanian organik, misalnya, Kabupaten Buton Utara telah mengantongi perda terkait penetapan dan penguatannya sebagai kabupaten pertanian organik.<sup>6</sup> Pemerintah setempat juga merencanakan penambahan anggaran di sektor pertanian sejumlah 30 persen dari APBD khusus. Oleh banyak pihak, apa yang telah dilakukan di sana bisa menjadi modal berharga dari usaha untuk membangun kedaulatan pangan, terutama di tengah-tengah ancaman krisis pangan akibat pandemi Covid-19.

Penetapan Buton Utara sebagai kawasan pengembangan pertanian organik membantu mewujudkan impian kabupaten yang beribukota Kulisusu ini untuk menjadikan pertanian sebagai sektor andalan. Hal ini dimaknai bukan terbatas pada penyediaan kebutuhan ekonomi, melainkan juga keberlanjutan kehidupan dalam konteks yang lebih luas seperti pelestarian lingkungan alam,

---

5 Suparman. 2018. "Tekan kemiskinan, Buton Utara andalkan pertanian organik". Antara Sultra, 5 Mei 2018, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://sultra.antarane.ws.com/berita/293028/tekan-kemiskinan-buton-utara-andalkan-pertanian-organik>)

6 Liputan 6. 2018. "Buton Utara Jadi Kabupaten Pertanian Organik". Liputan 6, 11 Februari 2017, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://www.liputan6.com/regional/read/2852655/buton-utara-jadi-kabupaten-pertanian-organik>)



kearifan lokal, dan keberlangsungan generasi lokal merawat sumber daya alam.

Sejak dicanangkan sebagai Kabupaten Organik pada tahun 2017, pemerintah Buton Utara mengumumkan sembilan varietas tanaman padi jenis beras merah organik dan beras hitam, yakni *Wakawondu*, Wakombe, Wangkaluku, Wabalongka, Warumbia, Watanta, Apolo, Patirangga, dan Wangkariri<sup>7</sup>. Secara kultural sejak dulu masyarakat kabupaten ini telah menggunakan sistem tanam organik. Nurlin (2017: 247) mencatat bahwa etnis Kulisusu, kelompok orang yang mendiami kabupaten Buton Utara, memiliki ciri adat yang berhubungan dengan nilai-nilai dan perilaku hidup yang bersumber dari akulturasi Islam dengan kepercayaan nenek moyang<sup>8</sup>. Proses pewarisan berasal dari sumber-sumber historis maupun yang berkategori mistis.

Simbol-simbol pertanian organik masa lalu kembali dikontekstualisasikan melalui pengalaman masa kini. Hal ini memicu lahirnya kembali interaksi antara anggota masyarakat dan lingkungannya dalam suatu *exercise* budaya yang pada akhirnya ikut menentukan struktur masyarakat pertanian<sup>9</sup>. Mengembalikan pertanian organik dengan menghadirkan olahan pangan lokal beras *Wakawondu* diartikan sebagai integrasi program pemerintah daerah. Integrasi ini tetap mempertahankan aktivitas masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan adat, budaya, dan lingkungan.

---

7 Mirdat Altahusada. 2018. "Pemda Buton Terima Sembilan Sertifikat Varietas Padi Lokal". Tegas.co, 29 April 2019, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<http://tegas.co/2019/04/26/pemda-buton-terima-sembilan-sertifikat-varietas-padi-lokal>).

8 Nurlin. 2017. *Menyingkap Tabir Kuasa di Tanah Buton "Orang Kulisusu, Identitas dan Kekuasaan"*. Yogyakarta: Ombak.

9 Umar Kayam, *Kebudayaan dan Pembangunan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987.



## Kiprah Perempuan dalam Penyediaan Pangan Lokal

Dalam konteks gender, keterbukaan pemimpin daerah yang berorientasi pada kesetaraan gender ini patut diapresiasi. Alih-alih menjadi sekadar pelengkap, perempuan berhak mengisi kantong-kantong strategis dalam sektor pemerintahan. Perempuan dalam posisinya baik di bidang sosial, ekonomi, dan kultural kerap menorehkan catatan prestasi. Mereka terbukti mampu mengakselerasi kemajuan Buton Utara menjadi sentra pertanian organik nasional. Beberapa gambar berikut menjadi bukti pendukung.

Salah satu aktor perempuan yang berkontribusi pada pengembangan pertanian organik di Buton Utara ialah Musyida Arifin. Tenaga ahli bidang pertanian Buton Utara inilah yang mengawal pertanian organik di wilayah Buton Utara sejak awal<sup>10</sup>. Ia aktif mendampingi petani lokal mengembangkan budi daya beras organik dengan nama *Wakawondu*. Nama *Wakawondu* diambil dari bahasa lokal yang berarti beras merah. Beras ini dikembangkan tanpa menggunakan pupuk kimia.

Produk andalan Buton Utara ini turut andil mengangkat isu pelestarian tradisi organik, pertanian berkelanjutan *zero waste zero cost*, dan kesehatan melalui penyediaan pangan sehat. Dalam ajang *Gebyar Usaha kecil dan Menengah Sulawesi Tenggara* yang diselenggarakan *International Council Small Business* bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal serta Kementerian

---

10 Safrudin Darma. 2019. "Potensi Komoditas Organik Butur Kini Dipaparkan ke Nasional". Media Kendari, 10 Juli 2019, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://mediakendari.com/potensi-komoditas-organik-butur-kini-dipaparkan-ke-nasional/50569/>)



Koperasi dan UMKM kemasan *Wakawondu* ditetapkan sebagai juara pertama.<sup>11</sup>

Kebijakan pemerintah Buton Utara memilih perempuan sebagai tenaga ahli bidang pertanian merupakan capaian strategis. Perempuan ialah kelompok masyarakat mayoritas yang terlibat secara intens di sektor pertanian. Hal ini berimplikasi positif terhadap persoalan lingkungan hidup yang bersentuhan langsung dengan sektor pertanian. Daya dukung lingkungan yang bertumpu pada pertanian berpijak pada posisi perempuan yang mayoritas berperan pada sektor domestik.

Gerak maju sebuah daerah bergantung kepada daya dukung sistem yang lahir dari wawasan kesetaraan gender. Kita kerap menemukan data di lapangan betapa sering kebijakan-kebijakan daerah jatuh pada ketimpangan gender. Tugas-tugas utama dibebankan kepada laki-laki, sementara perempuan menyelesaikan sisanya. Apa yang terjadi di Buton Utara merupakan oposisi dari persoalan benturan jenis kelamin. Pergeseran perspektif yang diaktualisasikan pemerintah Buton Utara menandakan sebuah lompatan sikap yang membanggakan, utuh dalam sorot kaleidoskop gender, pemberdayaan, dan pembangunan.

## **Tantangan untuk Mempertahankan *Wakawondu***

Sebuah sistem maupun produk tidak lepas dari tantangan akan keberlanjutannya. Harus diakui, pengembangan pertanian organik

11 Redaksi. 2018. "Beras Organik Wakawondu dari Butur Juara 1 di Gebyar UKM Jaman Now". Bumi Sultra, 22 September 2018, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://bumisultra.com/daerah/read/1350-produk-beras-wakawondu-dari-butur-juara-1-di-gebyar-ukm-jaman-now>)



telah menghasilkan beras *Wakowondu* yang harum, pulen, dan tidak cepat basi. Varietas ini disebut-sebut bermanfaat untuk kesehatan karena berfungsi sebagai anti kanker. Beras *Wakowondu* juga mengandung oksidan tinggi dan rendah gula—sehingga bermanfaat bagi penderita diabetes dan obesitas. Keunggulan-keunggulan ini tidak secara otomatis melepaskannya dari beban sebagai komoditas atas produk dan sistem yang penuh tantangan berkesinambungan.

Mesti diakui bahwa pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan sampai tingkat akar rumput dalam penerapan pertanian organik di Buton Utara mencapai puncak kesuksesan pada tahun 2018. Namun, yang perlu diperhatikan ialah kemungkinan dari ketidakmampuan masyarakat mengelola pertanian organik secara terus-menerus. Kita tentu tidak bisa menyepelekan optimisme para tenaga ahli pertanian Buton Utara dalam pendampingan masyarakat. Hanya saja, tidak jarang proses-proses pemberdayaan terhenti di tengah jalan. Bisa jadi pengembangan pertanian organik hanya *trend* temporer dalam kegiatan usaha tani.

Kekhawatiran itu tampaknya tidak terlalu beralasan, mengingat kenyataannya skema pertanian organik telah menyatu membudaya dengan masyarakat. Berbeda dengan beberapa daerah lainnya, misalnya yang baru mengenal praktik ini setelah bertahun-tahun menerapkan metode pertanian modern. Pertanian modern lebih awal diperkenalkan oleh pemerintah. Program ini dimulai sejak 1970-an dengan dalih percepatan dan peningkatan produksi padi.

Secara konseptual, pertanian modern yang terlaksana selama puluhan tahun dan akrab di telinga masyarakat sebagai panca



usaha tani (pengolahan tanah, pemupukan dengan pupuk buatan, perbaikan jaringan pengairan, penanaman benih unggul, serta pengendalian hama dan penyakit pestisida) juga sulit dilupakan begitu saja. Para pemangku kepentingan dalam pertanian organik tentu berharap budaya tani masyarakat Buton Utara yang melestarikan warisan cara bertani masa lalu tidak terseret “tren baru” dalam slogan pertanian modern mengingat budaya ini menjadi tumpuan ekonomi masyarakat. Ia membuka peluang bagi para petani secara mandiri memproduksi unsur pertanian yang digarap tanpa harus mengeluarkan modal yang berlebih untuk membeli komoditas kebutuhan pertanian seperti pada pertanian nonorganik.<sup>12</sup>

Guna menjawab kekhawatiran tentang tren temporer di atas, kita perlu menengok kembali agenda pembangunan dan pemberdayaan klasik. Kemajuan atau kemandekan dari perkembangan sebuah masyarakat bergantung pada kebudayaannya. Kebudayaan sebagai sistem nilai yang menjadi referensi bagi warga masyarakat dalam berpikir, bersikap, bertingkah laku di berbagai bidang kehidupan.<sup>13</sup> Budaya masyarakat tentang *sungkudalo* dan *podawu-dawuako* memuat hal-hal yang dianggap baik, benar, indah, bermakna, dan berguna sehingga layak menjadi referensi dan tujuan hidup. Masyarakat Buton Utara sesungguhnya menyalurkan sumber daya dan melakukan pengaturan sosial untuk kemudian

---

12 Parampara Garuda Yuda, *Meningkatnya Penggunaan Pertanian Organik di Masyarakat, “Studi Kasus di Kalangan Petani Desa Dowaluh”*, Skripsi (tidak diterbitkan) Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Skripsi (tidak diterbitkan), Yogyakarta, 2014, hal. 2-7.

13 Bambang Hudaya, *Pemberdayaan Masyarakat: Bunga Rampai Antropologi Terapan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hal. 139.



mengimplementasikannya dalam kehidupan agar terwujud tujuan hidup sesuai nilai budayanya.

## **Penutup**

Pertanian organik berbasis budaya adalah pertanian yang dilakukan atas dasar pengalaman masa lalu yang dinilai bermanfaat. Keberhasilan pertanian organik berbasis budaya di Buton Utara tidak terlepas dari kiprah strategis perempuan sebagai tenaga ahli pertanian, dukungan pemerintah Buton Utara yang selaras dengan kemauan, dukungan, dan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan dan peran serta semua pihak tersebut mengacu baik pada perspektif gender, proses-proses pemberdayaan masyarakat pada tingkat lokal maupun program kerja daerah

## **Profil Penulis**

Laxmi. Lahir di Kolaka Sulawesi Tenggara, pada tanggal 22 September 1977, memperoleh gelar S.Sos (Antropologi) dari Universitas Halu Oleo (1999), Gelar M.A (Antropologi) dari tempuh di UGM (2008). Saat ini sedang menempuh pendidikan Doktor di UGM (Kandidat Doktor). Kini ia mengajar pada jurusan Antropologi Universitas Halu Oleo. Ia banyak mendalami bidang kajian gender dan anak, pemberdayaan masyarakat, serta kajian-kajian bidang lingkungan. Buku yang pernah diterbitkan adalah Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah (2008), Taman Obat di Taman Hutan Raya (2008), Tombalaki (2010), Interelasi Manusia dan Lingkungan Pesisir di Keulauan Tiworo (2012), Problematika



dan Isu-isu Citizenship di Indonesia (2018). Dilema Badan Penyelenggara Pemilu: Potret Badan Ad Hoc Pemilihan Umum Serentak 2019 Di Sulawesi Tenggara ( 2020) Surat Elektronik: [luxmi77antro@yahoo.com](mailto:luxmi77antro@yahoo.com). HP/WA: 082293913765

La Ode Gusman Nasiru, M.A.mengawali karier penulisan sejak kelas 2 SMA dengan menerbitkan puisinya di Harian *Dinamika*, Bandar Lampung. Puisi dan cerpennya dibukukan dalam antologi *Puisi di Jantung Tamansari, Distopia*, dan *Rayuan Pohon Beringin*, yang diterbitkan UGM Press. Karya lainnya termuat pada antologi *Menapak ke Arah Senja, Jurnal Sastra No.03, Merindu Mentari di Bumi Anoa, Dua Sisi Mata Cinta, Pagi yang Mendaki Langit*, situs daring *Jurnal Ruang, Kibul.in, Locita.co*, dan *Qureta.com*. Sementara esainya tersebar di *Bunga Rampai Kajian Sastra Bolak-Balik Bulaksumur, Antologi 50 Opini Puisi Esai Indonesia, Majalah Pabitara*, dan Harian *Rakyat Sultra*.





# “Tentara Hitam” yang Menyejahterakan Masyarakat Desa<sup>1</sup>

Yudha Adipradana, S.Pi, M.I.L

Pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang cepat, dan perubahan pola hidup masyarakat berpengaruh penting dalam peningkatan jumlah timbunan sampah. Upaya penanganannya masih mengalami banyak kesulitan dan tantangan, terutama dalam hal pengadaan lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Terbatasnya ketersediaan

<sup>1</sup> Tulisan ini dikontribusikan untuk perhelatan gagasan Perempuan dan Anak dalam Webinar Sesi 7 Kongres Kebudayaan Desa (KKD), melalui *Call for Paper*.

lahan sangat dan harganya yang sangat mahal membuat timbunan sampah terus menjadi persoalan sampai sekarang. Dalam kasus TPST Bantargebang, misalnya, hanya butuh waktu 3 tahun sejak awal beroperasi TPST terbesar di Indonesia itu untuk *overload*. Di Bandung, persoalannya bahkan lebih kompleks karena kota terbesar di Jawa Barat itu masih punya masalah di proses pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir. Akibatnya, warga kota Bandung sering menyaksikan pemandangan timbunan sampah di berbagai titik di kota itu.<sup>2</sup>

Bila mengacu pada amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, paradigma baru dalam pengelolaan sampah sendiri sudah sangat jelas. Paradigma tersebut memandang sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomi seperti untuk energi, kompos, biogas ataupun untuk bahan baku industri<sup>3</sup>. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Konsep sirkular ekonomi dan lingkungan dalam tulisan ini berkaitan dengan *Black Soldier Fly* (BSF/lalat tentara hitam). BSF berperan mengurai sampah menjadi berbagai macam produk yang dapat menyejahterakan masyarakat desa. Para kepala desa dan atau direktur Badan Usaha Milik Desa yang memiliki jiwa wirausaha dan inovasi harus mampu menangkap dengan baik peluang ini

---

2 Redaksi. 2019. "Pengelolaan Sampah di 5 Kota Besar Indonesia". Kumparan.com, 18 Mei 2019, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://kumparan.com/kumparannews/pengelolaan-sampah-di-5-kota-besar-indonesia-1r6MzAPgXWx>)

3 Redaksi. 2019. "UU 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah". Jogloabang.com, 28 November 2019, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-18-2008-pengelolaan-sampah>)



dengan cepat dan baik. Tentunya program ini harus dimasukkan atau diagendakan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa).

## **Sirkular Ekonomi dan Lingkungan lewat Budi Daya BSF**

Meningkatnya jumlah penduduk yang disertai dengan perbaikan taraf ekonomi pada gilirannya akan semakin meningkatkan kebutuhan konsumsi protein. Akibatnya permintaan terhadap produk ikan dan hewan ternak juga semakin meningkat. Dampak yang dirasakan langsung oleh konsumen adalah semakin mahalnya sumber daya perikanan dan harga tepung ikan. Hal ini akhirnya mendorong para pengusaha atau petani ikan dan ternak untuk mencari sumber protein alternatif yang dapat diperoleh dengan mudah, bahan baku tersedia dalam jumlah banyak, dan memiliki nutrisi baik.

Semakin naiknya kebutuhan protein itulah yang mendorong peningkatan yang sangat besar pada kegiatan budi daya ikan air tawar sejak tahun 1990 hingga tahun 2020.<sup>4</sup> Budi daya ikan air tawar membutuhkan tepung ikan dan tepung kedelai yang sangat banyak. Sayangnya, tingkat produksi tepung ikan bersifat stagnan. Inilah yang menyebabkan harga pakan ikan maupun ternak melonjak drastis, sedangkan harga jual produk mengalami peningkatan yang tidak signifikan. Akibatnya, para pembudi daya ikan menjerit dan

4 Ridzki R. Sigit. 2014. "Ketahanan Pangan: Budi Daya Perikanan akan Menjadi Tumpuan Pemenuhan Konsumsi Dunia di Masa Depan". Mongabay.com, 15 Juni 2014, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://www.mongabay.co.id/2014/06/15/ketahanan-pangan-budidaya-perikanan-akan-menjadi-tumpuan-pemenuhan-pangan-dunia-di-masa-depan/>)



efek lainnya adalah masyarakat akan kesulitan mengonsumsi sumber protein hewani yang bergizi tinggi. Pada tingkat lebih lanjut, hal ini juga berpotensi pada stunting atau kekurangan gizi yang dialami generasi selanjutnya.

Masyarakat Indonesia, khususnya orang desa dalam hal ini petani, peternak maupun pembudi daya ikan akan selalu dirugikan oleh permainan/kepentingan ekonomi negara tertentu. Beberapa contoh yang nyata adalah ketergantungan pembudi daya ikan dan peternak (sapi, kambing maupun ayam) akan pakan buatan pabrik, khususnya kebutuhan tepung ikan maupun kedelai sebagai sumber protein (baik hewani maupun tumbuhan). Ketergantungan ini pada akhirnya akan menyengsarakan masyarakat desa secara keseluruhan, karena sebanyak 95% pemenuhan kebutuhannya diimpor dari Amerika Serikat dan Cina dan maupun negara lainnya seperti Chili.

Selain itu, tingkat efisiensi nilai dari pakan ikan itu sendiri juga patut diperhatikan. Tentu sangat mubazir atau sia-sia jika memindahkan protein yang berasal dari ikan di laut untuk menghasilkan protein daging ikan yang ada di perairan air tawar. Sebagai perbandingan, untuk menghasilkan 1 Kg tepung ikan, maka dibutuhkan 5 Kg ikan segar. Sementara, 1 kg tepung ikan yang diberikan kepada ikan air tawar, tidak akan menghasilkan 1 Kg daging ikan air tawar, karena aktivitas sehari-hari yang dilakukan ikan air. Artinya, perlu sumber protein baru yang memiliki kadar protein tinggi untuk mengganti peran (kebutuhan) dari tepung ikan dan tepung kedelai yang mudah diperoleh masyarakat desa.



Permasalahan lain yang harus diatasi adalah sampah. Dengan semakin banyaknya jumlah penduduk, hal ini sesuai dengan teori dari Thomas Robert Malthus yaitu laju pertumbuhan penduduk lebih cepat daripada laju pertumbuhan makanan, tentu hal ini akan berimplikasi terhadap kekurangan jumlah makanan yang dapat menyebabkan terjadinya bencana kelaparan, terlebih di negara-negara benua Afrika yang memiliki musim panas lebih panjang; Kebutuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat juga menyebabkan naiknya tingkat konsumsi makanan dan limbah organik. Jika hal ini tidak diatasi dengan segera, maka dapat menimbulkan masalah yang lebih besar seperti wabah penyakit, keterbatasan tempat pembuangan akhir sampah, sampai polusi. Perlu solusi praktis yang memanfaatkan kearifan lokal dalam mengatasinya.

Prinsip sirkular ekonomi dan lingkungan adalah mengurangi limbah-limbah yang dihasilkan oleh aktivitas makhluk hidup khususnya manusia (*Reduce*); menggunakan kembali sisa-sisa/ limbah yang dihasilkan oleh makhluk hidup (*Reuse*), serta mengubah baik secara bentuk, kandungan, maupun fungsinya sehingga dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih berguna dari zat sebelumnya (*Recycle*).

Sampah organik dan kebutuhan akan bahan pengganti sumber protein dari tepung ikan dan tepung kedelai dapat diatasi dengan mengembangkan konsep sirkular ekonomi dan lingkungan melalui budi daya BSF. Lalat BSF (*Hermetia illucens*) berbeda dengan lalat hijau yang hanya memakan limbah organik saja. Masa hidupnya juga relatif pendek, yaitu sekitar 45 hari. Lalat BSF jantan akan mengalami kematian setelah *melting* (kawin) dan lalat BSF betina



akan mati setelah bertelur. Berikut akan dijelaskan peran lalat BSF ini dalam mengurai sampah dan berbagai produk turunan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, sehingga berperan penting bagi sirkular ekonomi dan lingkungan di lingkup masyarakat desa.

Setelah menetas, larva BSF akan mulai memakan sampah yang diberikan, sampai pada tingkat reduksi hampir 55% berdasarkan berat bersih sampah.<sup>5</sup> Larva BSF tidak memiliki jam istirahat, namun mereka juga tidak makan sepanjang waktu.<sup>6</sup> Larva BSF umumnya memiliki ciri makan searah horizontal dengan makanannya. Namun, terkadang larva BSF akan bergerak secara vertikal untuk mengekstrak nutrisi yang terdapat pada lindi yang dihasilkan dari pembusukan sampah makanan yang diberikan. Ketika larva mencapai tahap dewasa, larva BSF akan mampu mengurai sampah organik dengan sangat cepat dan menekan pertumbuhan bakteri serta mengurangi bau tidak sedap yang ada pada sampah dengan sangat baik.<sup>7</sup> Selain itu, keuntungan tambahan yang diperoleh dari BSF adalah kemampuannya untuk mengusir lalat rumah yang merupakan vektor penyakit menular yang banyak di negara berkembang.<sup>8</sup>

Kualitas dan kuantitas makanan larva BSF (*Hermetia illucens*) mempengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup, ciri-ciri biologis lalat dewasa dan karakteristik tahap kehidupan BSF dewasa.<sup>9</sup> Larva

5 Diener S. 2010. Valorisation of Organic Solid Waste using the Black Soldier Fly, *Hermetia illucens* L., in Low and Middle-Income Countries [Dissertation]. ETH Zurich: Zurich (CH).

6 Alvarez, L. 2012. *The Role of Black Soldier Fly, Hermetia illucens* (L.) (Diptera: Stratiomyidae) in Sustainable Management in Northern Climates [Dissertation]. University of Windsor: Ontario (CA).

7 Diener S. 2010. Valorisation of Organic Solid Waste using the Black Soldier Fly, *Hermetia illucens* L., in Low and Middle-Income Countries [Dissertation]. ETH Zurich: Zurich (CH).

8 Diener S. 2010. Valorisation of Organic Solid Waste using the Black Soldier Fly, *Hermetia illucens* L., in Low and Middle-Income Countries [Dissertation]. ETH Zurich: Zurich (CH).

9 Tomberlin JK, Sheppard DC, Joyce JA. 2002. *Selected life-history traits of black soldier flies*



BSF merupakan fase paling lama dalam siklus hidupnya sehingga dikelompokkan sebagai agen biokonversi karena sebagian besar fase hidupnya berperan sebagai dekomposer.<sup>10</sup> Larva BSF mengonsumsi berbagai jenis bahan organik yang telah membusuk, seperti buah-buahan dan sayuran yang membusuk, kotoran hewan dan manusia.<sup>11</sup> Selain itu, larva BSF juga merupakan konsumen rakus terhadap sampah dapur, makanan basi, sayuran, dan bangkai.<sup>12</sup>

Biokonversi adalah proses dengan cara melibatkan mikroorganisme seperti ragi, jamur, dan bakteri atau alternatif dari invertebrata terestrial seperti larva serangga untuk mengubah sampah organik menjadi produk yang bernilai lebih tinggi. Konsep biokonversi tersebut merupakan solusi menarik yang dapat mengatasi masalah pengelolaan sampah organik. Biokonversi merupakan proses berkelanjutan yang memanfaatkan larva serangga untuk mentransformasi limbah organik. Selanjutnya, larva serangga tersebut mengonversi nutrisi dari sampah dan disimpan sebagai biomasanya.<sup>13</sup> Larva mampu mengonversi sejumlah besar limbah organik menjadi biomassa kaya protein untuk mengganti tepung

---

(Diptera: Stratiomyidae) reared on three artificial diets. *Ann Entomol Soc Am.* 95(3):379-386.

- 10 Fahmi, M. R., 2015. *Optimalisasi proses biokonversi dengan menggunakan mini-larva Hermetia illucens untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan*. Pros sem nas masy biodiv indon 1(1), hal. 139-144.
- 11 Žáková M dan Borkovcová M. 2013. *Hermetia illucens application in management of selected types of organic waste*. Electronic International Interdisciplinary Conference.
- 12 Newton L, Sheppard C, Watson DW, Burtle G, Dove R. 2005. *Using the black soldier fly, Hermetia illucens, as a value-added tool for the management of swine manure. Report for The Animal and Poultry waste Management Center* [Thesis]. North Carolina State University Raleigh: North Carolina (US).
- 13 Leong SY, Kuty SRM, Malakahmad A, Tan CK. 2016. *Feasibility study of biodiesel production using lipids of Hermetia illucens larva fed with organik waste*. *Waste Manage.* 47: 84-90



ikan.<sup>14</sup> Larva BSF telah dipropagasikan sebagai agen konverter limbah organik karena larva ini makan lahap berbagai bahan organik membusuk dan menghasilkan prepupa mengandung protein kasar 40% dan 30% lemak sebagai pakan ikan dan hewan ternak lainnya. Oleh karena itu, konversi sampah organik oleh larva BSF merupakan sebuah teknologi daur ulang menarik yang memiliki berbagai nilai guna, terutama untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

## Produk Konversi Sampah Organik

Selain pengurangan limbah dan stabilisasi, produk dalam bentuk *prepupa* menawarkan pakan hewan ternak bernilai tambah, membuka peluang ekonomi baru bagi pengusaha kecil di negara berkembang.<sup>15</sup> Dalam kaitannya dengan pemanfaatan BSF, ada 4 produk yang bisa dihasilkan dari proses penguraian sampah lewat BSF

## Pupuk Organik Maggot (Kasgot)

Pertama, pupuk organik Maggot (Kasgot). Reduksi berbagai limbah organik oleh larva BSF telah dikaji oleh para peneliti yakni reduksi bahan kotoran manusia sebesar 51.3% dan reduksi pakan

---

14 Diener S, Gutiérrez FR, Zurbrügg C, Tockner K. 2009b. *Are larvae of the black soldier fly-hermetia illucens – a financially viable option for organik waste management in Costa rica?*. In: Proceedings Sardinia 2009, Twelfth International Waste Management and Landfill Symposium; 2009 Oct 5-9; Cagliari, Italy. Cagliari (IT): CISA Publisher. 1-6.

15 Diener S, Solano NM, Gutiérrez FR, Zurbrügg CT. 2011. *Biological Treatment of Municipal Organik Waste using Black Soldier Fly Larvae*. Waste Biomass Valor. Vol 2(1): 357-363. Hal yang sama diungkapkan Nguyen dalam: Nguyen TTX, Tomberlin JK, Vanlaerhoven S. 2015. Ability of black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) larvae to recycle food waste. Environ Entomol. 44(2):406- 410.doi:10.1093/ee/nvv002.



unggas 84.9%.<sup>16</sup> Selanjutnya, reduksi kotoran sapi 33-58% dan kotoran ayam 50%<sup>17</sup> dan reduksi sampah organik kota 66—79%. Residu dari larva BSF digunakan sebagai kompos dan memiliki tingkat nutrisi untuk digunakan sebagai pupuk dan amandemen tanah. Laju konsumsi sampah oleh larva BSF bervariasi menurut jenis sampah, kadar air, jumlah larva, ukuran larva dan suhu.<sup>18</sup>

Dari 150 gram telur lalat BSF, bisa dihasilkan sekitar 750 Kg Maggot BSF (dalam proses pemeliharaan yang optimal) mampu mengurai sekitar 2 ton limbah organik, dalam kurun waktu 2-3 minggu. Proses penguraian limbah organik dengan memanfaatkan maggot BSF jauh lebih cepat dibandingkan dengan proses pembuatan pupuk organik (kompos) secara konvensional (fermentasi dan pengadukan rutin), yang membutuhkan waktu sekitar 3 bulan. Dari bahan limbah organik sebanyak 2 ton di atas, nantinya akan menghasilkan maggot BSF berkisar 220 – 250Kg dan pupuk organik (kasgot) berkisar 150 – 200Kg.

Pemanfaatan maggot BSF sangat ramah lingkungan. Maggot BSF yang menetas dan telur lalat BSF akan merombak, mengekstraksi, dan mengonversi nutrisi yang masih tersimpan di dalam limbah organik. Dengan begitu, nutrisi yang dihasilkan berbentuk baru, yakni berupa pupuk organik berkualitas tinggi (kasgot). Penguraian

---

16 Gabler F. 2014. *Using black soldier fly for waste recycling and effective Salmonella spp. reduction* [theses]. Swedish (SE): University of Agricultural Sciences.

17 Myers HM, Tomberlin JK, Lambert BD, Kattes D. 2008. *Development of black soldier fly (Diptera: Stratiomyidae) larvae fed dairy manure*. Environmental Entomology. Vol 37(1): 11-15.

18 Alvarez, L. 2012. *The Role of Black Soldier Fly, Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomyidae) in Sustainable Management in Northern Climates* [Dissertation]. University of Windsor: Ontario (CA).



sampah organik oleh maggot BSF lebih sempurna dibandingkan dengan pengomposan biasa (dengan fermentasi).

Maggot BSF mempunyai peluang sebagai pakan ikan atau substitusi tepung ikan karena mempunyai kandungan nutrisi tidak jauh berbeda dengan tepung ikan, terutama tepung ikan lokal dan dapat diproduksi dalam kuantitas yang cukup dalam waktu singkat secara berkesinambungan.

Kedua, tepung Maggot. Dari Tabel 1 diketahui bahwa kadar protein maggot BSF lebih rendah daripada tepung ikan impor dan tepung ikan lokal. Kadar protein Maggot BSF sangat ditentukan oleh kandungan protein media pakan yang diberikan dan umur maggot BSF yang dipanen. Semakin tinggi kadar protein media pakan dan semakin cepat maggot dipanen, akan semakin tinggi pula kadar proteinnya.

**Tabel 1.** Analisis Proksimat tepung ikan, maggot dan bungkil kelapa sawit (PKM)

Sampel	Hasil Analisis (% Bobot Kering)					Sumber
	Protein	Lipid	Serat Kasar	Abu	BETN	
Tepung Ikan Impor	74,6	11,9	1,48	13,9	-	Ediwarman et al, 2006
Tepung Ikan Lokal	55,4	10,6	1,08	22,6	10,3	Ediwarman et al, 2006
Maggot BSF	45	25	5,62	12,36	6,8	Lab BBATJ, 2006
PKM	18	32	0,81	8,56	17,6	Lab BBATJ 2006



## **Pupuk Organik Cair (POC) Maggot**

Ketiga, pupuk organik cair Maggot. Sisa kotoran maggot maupun telur maggot dapat dibuat menjadi pupuk organik cair, yang mana di beberapa perlakuan ditambahkan bakteri pengurai untuk mengaktifkan kandungan kimia dalam limbah kotoran maggot tersebut. Kandungan pupuk organik cair maggot juga dapat mengandung bakteri dan senyawa aktif bagi tanaman, karena maggot dapat menghambat beberapa jenis bakteri yang bersifat merusak seperti *Salmonella sp* dan *E. coli*.

Keempat, Dried Maggot dan Chitosan dari Kitin Maggot. Maggot sendiri dapat dikonsumsi secara langsung oleh manusia karena mengandung protein yang sangat tinggi, namun terlebih dahulu dilakukan beberapa perlakuan seperti dikeringkan dengan menggunakan oven dengan suhu rentang 55–750 Celcius. Makanan ini sudah mulai digemari di Cina dan Eropa. Tentu hal ini bisa sangat menjanjikan bagi masyarakat desa. Selain itu, bagian kitin pada maggot yang bersifat keras mengandung asam amino yang cukup tinggi sehingga dapat dibuat chitosan sebagai pengganti dari karapas kepiting, atau pun udang yang dibutuhkan oleh industri kimia maupun makanan.

## **Penutup**

Pengembangan budi daya maggot merupakan sebuah inovasi desa yang harus segera ditangkap baik oleh pemerintah desa, pengurus BUMDes atau masyarakat desa pada umumnya. Hal ini dikarenakan sifat biokonversi pada lalat BSF tidak hanya



mampu menguraikan sampah namun juga mampu menghasilkan produk primer dengan kandungan protein tinggi dan mampu menggantikan peran dari tepung ikan dan tepung kedelai sebagai pakan ikan, unggas, maupun kambing. Di samping itu, maggot dapat menghasilkan produk turunan bernilai tinggi seperti kasgot, pupuk organik cair, dried maggot, dan penghasil chitosan dari kitinnya. Produk-produk turunan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk diaplikasikan kepada tanaman, namun juga ternyata terdapat produk turunan yang dapat dimakan oleh manusia bahkan dimanfaatkan oleh berbagai industri kimia dan makanan.

## **Profil Penulis**

Yudha Adipradana lahir di Jakarta, 02 Januari 1986. Lulusan S-1 Perikanan IPB tahun 2009 dan S-2 Ilmu lingkungan Unpad Tahun 2015. Saat ini bekerja di BBPLM Jakarta, Kementerian Desa sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat yang bertugas melakukan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat desa dan transmigran





# Isu Ekohidrologi Perdesaan dalam Komunikasi Sains: dari Masa Pandemi ke Tata Pemerintahan Desa menuju Indonesia Baru<sup>1</sup>

Muhammad Yunus Zulkifli

Persoalan air saat ini telah berdampak buruk bagi ekosistem global. Salah satu indikasinya adalah semakin berkurangnya keanekaragaman hayati di wilayah perairan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengelolaan sumber daya air yang konvensional

---

<sup>1</sup> Tulisan ini dikontribusikan untuk perhelatan gagasan Perempuan dan Anak dalam Webinar Sesi 7 Kongres Kebudayaan Desa (KKD), melalui *Call for Paper*.

dengan segala rangkaiannya tidak cukup mampu mengatasi krisis air global. Masyarakat perkotaan, misalnya, mengambil air konsumsi dari air tanah, bahkan air tanah dalam yang sebenarnya ilegal. Akibatnya, banyak wilayah di Indonesia mengalami kekurangan air, terutama air tanah dalam. Sementara itu, penggunaan air dari PDAM di kota besar terus menunjukkan penurunan kualitas air. Hal ini terjadi karena masyarakat dan industri mengotori sumber air seperti sungai dengan menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah dan limbah. Persoalan ini kerap kali berujung pada munculnya penyakit-penyakit yang berkaitan dengan air, contohnya diare.

Di sisi lain, masyarakat perdesaan mengalami dinamika masalah air lainnya, yakni banjir dan kekeringan. Konversi hutan dan lahan pertanian produktif di perdesaan menjadi hunian, industri dan infrastruktur pendukungnya secara akumulatif telah memberi sumbangan besar terhadap bencana banjir di musim penghujan dan bencana kekeringan di musim kemarau. Dengan demikian, saat ini terdapat dua tantangan yang dihadapi terkait ketahanan air, yaitu bagaimana mengurangi risiko banjir; dan bagaimana meningkatkan pasokan air bagi masyarakat, industri dan pertanian.

Mimpi buruk habisnya air bersih yang sebelumnya pernah terjadi di Cape Town<sup>2</sup> bisa terjadi di kota-kota lain di dunia. Penyebabnya beragam, mulai pertambahan populasi penduduk yang diperparah dengan gaya hidup boros air, pencemaran, hingga perubahan iklim yang diakibatkan industri yang masif mengonversi lahan produktif

---

2 Endro Priherdityo. 2017. "Afrika Selatan Alami Kekeringan Terburuk dalam Satu Abad". CNN Indonesia, 23 Mei 2017, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20170522233345-127-216533/afrika-selatan-alami-kekeringan-terburuk-dalam-satu-abad>)



dan memproduksi limbah. Masyarakat belum menyadari bahwa jumlah air bersih di bumi sesungguhnya tetap. Artinya, tidak ada penambahan jumlah air, tetapi air hanya mengalami siklus dari atmosfer dan kembali ke bumi. Siklus hidrologi itu terdiri dari kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Lalu, berapa banyak air bersih yang sesungguhnya ada di Indonesia? Berdasarkan data Perserikatan Bangsa- Bangsa, Indonesia berkontribusi atas 21% dari total keseluruhan air bersih di Asia Pasifik.<sup>3</sup> Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS), rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak di Indonesia hanya 65,05% pada 2012. Peningkatan akses terjadi tiap tahun hingga menjadi 72,04% pada 2017.<sup>4</sup>

Di tanah air, pengelolaan irigasi air Subak di Bali saat ini mulai ditinggalkan, karena konversi lahan, atau pergeseran paradigma. Untuk itu diperlukan satu pendekatan baru sebagai solusi, yaitu pendekatan ekohidrologi yang tidak hanya berfokus pada persoalan teknis, melainkan juga pada permasalahan secara luas melalui kebijakan sumber daya air yang berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan pengelolaan sumber daya air dan biodiversitas menjadi satu kesatuan.

Terjangan pandemi Covid-19 yang kini melanda Indonesia sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah dalam upaya menjamin ketahanan air secara nasional. Koordinasi dan konsolidasi

- 
- 3 Dr. Ignasius Dwi Atmana Sutapa. 2018. "Konsep Ekohidrologi Jadi Solusi Masalah Air Bersih di Indonesia". LIPI, 30 Mei 2018, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<http://lipi.go.id/berita/single/Konsep-Ekohidrologi-Jadi-Solusi-Masalah-Air-Bersih-di-Indonesia/20582>)
  - 4 Scholastica Gerintya. 2018. "Bagaimana Mutu dan Akses Air Bersih di Indonesia?". *Tirto.id*, 20 Maret 2018, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://tirto.id/bagaimana-mutu-dan-akses-air-bersih-di-indonesia-cGrk>)



intensif dari para pemangku kepentingan, pemerintah maupun masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan dasar di sektor air harus tetap berjalan sesuai koridor Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada target 2: memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, sehingga ketersediaan asupan gizi, dukungan air minum, dan sanitasi yang sehat tetap terjamin dan akan menentukan terbangunnya imunitas sebagai komponen utama bagi keberlangsungan hidup masyarakat.

## **Ekohidrologi sebagai Solusi Permasalahan Air**

Ekohidrologi merupakan ilmu integratif dengan paradigma baru yang berupaya mencari solusi permasalahan seputar air, manusia dan lingkungan sekitarnya. Pendekatan ekohidrologi sekaligus mengajak masyarakat menjaga ekosistem wilayah basah dengan menanam tanaman yang mampu menyerap polutan dan limbah, sehingga air terjaga kualitasnya.

Konsep dasar ekohidrologi adalah pendekatan pengelolaan sumber daya air dan biodiversitas dalam kesatuan. Dalam konsep ekohidrologi, penyediaan air bersih dilakukan dengan memanfaatkan ekosistem yang terdapat di lingkungan. Hal tersebut tidak hanya berlaku di wilayah pegunungan atau perdesaan yang relatif lebih kaya akan ekosistem, melainkan juga di wilayah perkotaan yang lebih rentan terhadap persoalan krisis air bersih. Salah satu contoh pemanfaatan ekosistem air adalah dengan mengubah air limbah yang dialirkan melalui ekosistem wilayah basah (*wetland*) dengan tanaman penyerap polusi, sehingga air itu menjadi bersih setelah



keluar dari ekosistem. Professor Maciej Zalewski, penemu konsep ekohidrologi sekaligus Direktur Pusat Ekohidrologi Kawasan Eropa, mengemukakan bahwa pemanfaatan konsep ekohidrologi dalam menghadirkan air bersih dapat menekan biaya secara signifikan, walaupun efisiensinya dapat berbeda-beda.<sup>5</sup> Kita mengeluarkan biaya 10 kali lipat lebih tinggi untuk menghadirkan air bersih melalui teknologi, dibandingkan jika menggunakan konsep ekohidrologi.

Konsep ekohidrologi melalui pendekatan ilmiah senantiasa mempertimbangkan interaksi aspek abiotik dan biotik, lebih lanjut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Asas 1: aspek hidrologi, menyangkut struktur abiotik dari sistem sungai, dinamika proses hidrologi, serta dampak spesifik spasial-temporal akibat intervensi manusia;

Asas 2: keterpaduan ekologi, menyangkut antarhubungan komponen ekosistem yang menunjukkan potensi dan kapasitas ekosistem dalam menghasilkan produk dan jasa lingkungan;

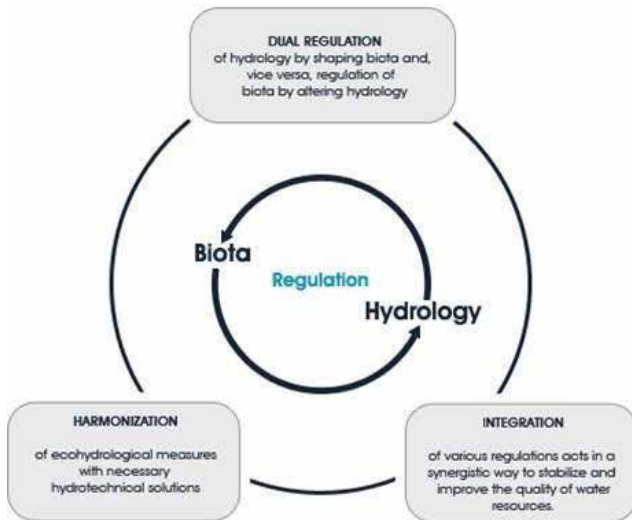
Asas 3: ekoteknologi, menyangkut penggunaan informasi dan pengetahuan mengenai aspek abiotik dan biotik (dari asas 1 dan asas 2) untuk pengembangan bioteknologi ekologi baru dan solusi sistem hidrologi yang mampu meningkatkan kapasitas ekosistem dalam menghasilkan produk dan jasa lingkungan.

Interaksi harmonis hidrologi-biota dalam suatu rekayasa untuk meningkatkan kapasitas ekosistem dikenal sebagai teori dual-regulasi ekohidrologi, yang digambarkan dalam skema pada Gambar 1.

---

5 Zalewski, M. 2000. Ecohydrology – the scientific background to use ecosystems properties as management tool toward sustainability of freshwater resources. Guest editorial Ecological Engineering 16:1-8.





**Gambar 1.** Skema teori dual-regulasi ekohidrologi

Salah satu penerapan ekohidrologi yang sudah dilakukan adalah pemanfaatan tumbuhan atau vegetasi dalam mengatasi masalah lingkungan, contohnya pengembalian ekosistem Waduk Saguling di Kabupaten Bandung Barat oleh APCE dan berdampak pada kualitas air Sungai Citarum. Air waduk yang tercemar dibersihkan lewat pemanfaatan tanaman seperti rumput atau eceng gondok yang ditanam di sepanjang aliran waduk. Hasilnya tingkat kebersihan air meningkat dan biaya pembersihan lebih murah. Konsep ekohidrologi menyatukan berbagai aspek di antaranya ekologi, hidrologi, ekoteknologi, dan budaya. Tujuan penyatuan dalam berbagai aspek pada konsep ekohidrologi adalah untuk menghadirkan kualitas sumber daya air yang terbaik untuk masyarakat.

*Demosite* ekohidrologi di Saguling, Kabupaten Bandung Barat juga menjadi tempat praktik dan konstruksi untuk memperkenalkan konsep hidrologi multifungsi yang pertama, sehingga manfaatnya sebagai pembelajaran dan edukasi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di Saguling, selain untuk memantau dan memperbaiki kualitas air, terdapat kolam-kolam percontohan yang bisa digunakan untuk ternak ikan dan dapat dikombinasikan. Dengan demikian, model ekohidrologi ini tidak hanya dapat mengelola sumber daya air, tetapi juga dimanfaatkan oleh masyarakat secara ekonomi.

Dalam upaya pengelolaan sumber daya air terpadu, konsep ekohidrologi meliputi informasi dasar ekologi—potensi sumber daya air dan aplikasi teknologi yang tepat guna serta ramah lingkungan lokal yang berbasis partisipasi masyarakat. Aplikasi terbaru dari konsep ekohidrologi ini adalah untuk mengurangi dampak musim kemarau. Hal ini telah dilakukan pada beberapa wilayah di Indonesia, seperti di Pulau Kalimantan, Pulau Bangka, Mojokerto Jawa Timur, dan Grokgak di Bali dengan hasil pengurangan dampak kekeringan yang nyata. Selain di Kabupaten Bandung Barat, APCE juga telah melakukan pengembangan *demosite* ekohidrologi di Kabupaten Ciamis dan di Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, penelitian ekohidrologi di daerah gambut di Kabupaten Banyuasin, dan penerapan pendekatan ekohidrologi dan konservasi lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Kemandirian masyarakat berbasis kearifan lokal mampu menjadi solusi terhadap kesulitan air bersih yang sering dihadapi di sejumlah daerah. Masyarakat sebagai komunitas majemuk memiliki kemampuan untuk menyediakan air bersih dengan mempergunakan



modal sosial berupa gotong royong. Salah satu contohnya adalah penyediaan air dengan cara mengonservasi ekosistem tertentu dengan nilai-nilai tradisional yang masih hidup pada beberapa kelompok masyarakat adat. Konsep-konsep tradisional di beberapa etnis di tanah air seperti hutan larangan, lubuk larangan, *sirah cai* (mata air) dan berbagai konsep lainnya, sudah ada sejak lama di masyarakat. Nilai-nilai tersebut mampu melebur dalam keseharian masyarakat. Oleh karena itu komunitas masyarakat di perdesaan maupun perkotaan mampu tidak semata tergantung pada upaya pemerintah, tetapi mempergunakan modal sosialnya untuk penampungan dan pendistribusian air bersih. Selain itu, diperlukan edukasi ke masyarakat agar mendorong mereka semakin berinisiatif menciptakan tata kelola air bersih yang baik seperti mengelola hutan desa untuk menjaga jumlah air bersih dalam tanah. Seperti misalnya pembuatan lubuk ikan di sumber mata air dan pembuatan bak penampungan air di perdesaan.

Solusi permasalahan air dengan pendekatan ekohidrologi harus terus ditingkatkan. Salah satunya melalui peran APCE yang berada di kawasan *Cibinong Science Center*, Bogor, Jawa Barat. APCE diharapkan menjadi garda terdepan dalam memperdalam, mempertajam dan mengembangkan konsep pengelolaan berbasis ekohidrologi yang bermanfaat bagi masyarakat dan kehidupan di sekitarnya. Komponen dalam ekohidrologi memiliki perannya masing-masing. Prinsip ekologi adalah peningkatan kapasitas penyerapan dari ekosistem. Sedangkan, prinsip hidrologi menjadi kerangka kerja untuk proses kuantifikasi massa air. Prinsip ekoteknologi terkait penggunaan properti ekosistem yakni sebagai



alat tata kelola manajemen air. Prinsip budaya adalah untuk meningkatkan hubungan yang dinamis antara sistem hidrologi, sosial, dan ekologi. Masyarakat sebetulnya mampu menciptakan sumber air bersihnya sendiri. Salah satu bentuk inisiatif masyarakat desa yakni membuat penampungan air sebagai bentuk gotong royong perdesaan. Keberadaan bak penampungan air mencerminkan masih kuatnya semangat gotong royong dan proses mengatur pengelolaan air bersih yang dilakukan masyarakat.

Namun demikian, kerja sama dan respons positif dari pemerintah daerah tetap diperlukan untuk bersama-sama masyarakat mengelola dan menjaga air bersih. Edukasi juga penting dilakukan pada masyarakat supaya semakin berinisiatif menciptakan tata kelola air bersih yang baik seperti mengelola hutan desa untuk menjaga jumlah air bersih dalam tanah, membuat lubang ikan di sumber mata air, dan melalui bak penampungan air di perdesaan. Edukasi terkait pentingnya air bersih sangat diperlukan untuk diajarkan sedari dini. APCE, misalnya, berupaya mengajarkan pada pentingnya menjaga sumber daya air dan pemahaman untuk menggunakan air secara bijaksana kepada pelajar. Menjelang musim kemarau pada puncaknya di bulan Agustus—September, seharusnya mulai dibuat skenario pemerintah untuk mengantisipasi dampak kekeringan. Salah satu upayanya adalah dengan gencar mengedukasi masyarakat untuk mulai membuat sistem pengelolaan air yang tepat. Petani, khususnya, perlu diajarkan bagaimana membuat sistem imbuhan air bawah tanah agar tidak terlalu mempengaruhi kondisi pangan nasional.



Dalam upaya pengelolaan sumber daya air terpadu, konsep ekohidrologi meliputi informasi dasar ekologi-potensi sumber daya air, aplikasi teknologi yang tepat guna serta ramah lingkungan lokal dan berbasis partisipasi masyarakat. Adapun, aplikasi penerapan konsep dan teknologi tersebut saat ini sudah dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia dan diharapkan dapat terus diterapkan secara berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan yang disematkan pada hal ini adalah tentang ketersediaan air yang terjangkau bagi masyarakat dengan kualitas dan kuantitas yang terjaga sama baiknya di kawasan perkotaan ataupun perdesaan. Dengan konsep ini, maka air yang dihasilkan akan aman dan terjamin bagi kesehatan masyarakat yang mengonsumsinya. Ketersediaan air bersih dapat menurunkan *water borne disease*, menurunkan *stunting*, dapat meningkatkan derajat kesehatan, dan perekonomian masyarakat. Kehadiran aplikasi dari teknologi ekohidrologi salah satunya bertujuan untuk mengurangi dampak musim kemarau yang ada di Indonesia. Dengan ekohidrologi, persoalan tahunan musim kemarau yang melanda berbagai daerah diharapkan bisa dipecahkan secara berkala.

Perkembangan konsep ekohidrologi dapat dilihat dari informasi dan pengetahuan, dan sampai pada kearifan (*wisdom*) dalam menyelesaikan masalah.<sup>6</sup> Telah banyak ilmuwan dan peneliti yang mengembangkan konsep untuk menjawab tantangan permasalahan hidrologi sumber daya air, semua sebagai hasil riset, sehingga dikenal sejumlah istilah dan konsep terkait pengelolaan sumber daya air yang perlu klarifikasi, sebagaimana dibahas oleh Naiman et al. (2007)

---

6 Zalewski, M. 2000. *Ecohydrology – the scientific background to use ecosystems properties as management tool toward sustainability of freshwater resources*. Guest editorial Ecological Engineering 16:1-8.



yang mengidentifikasi lima konsep saling berhubungan: *Integrated Water Resources Management (IWRM)*, *Hydroecology*, *Ecohydrology*, *Ecohydraulics and Environmental Flows*.<sup>7</sup> Riset ekohidrologi berasosiasi dengan keilmuan lainnya seperti ekonomi lingkungan, sosial kemasyarakatan, kebudayaan, gender, kesehatan, pangan, energi, iklim. Kebutuhan riset ekohidrologi di Indonesia sangat penting. Apabila riset ini menjadi bagian pendidikan ekohidrologi di perguruan tinggi yang ada di Indonesia pada tingkat S-2 atau S-3 secara lebih luas, maka upaya pengelolaan lingkungan sumber daya air nasional secara berkelanjutan akan lebih cepat tercapai. Berbagi sumber daya penelitian antar lembaga penelitian dan universitas di Indonesia juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas riset yang ada.

Selain itu, kerja sama internasional akan sangat membantu dalam pengembangan kapasitas riset ekohidrologi dengan interaksi yang saling menguatkan dan menguntungkan demi pengembangan keilmuan dan teknologi di Indonesia, dan hal ini sangat dimungkinkan dengan keberadaan APCE.<sup>8</sup> Upaya sistematis pengembangan infrastruktur penelitian dan sumber daya peneliti ekohidrologi harus segera dirintis dengan melibatkan seluruh komponen yang ada, baik di lembaga-lembaga penelitian maupun di universitas, dan APCE telah memulai dengan *research training* dan *workshop* bagi peneliti dan dosen bekerja sama dengan Kementerian

---

7 Naiman, RJ, SE Bunn, L Hiwasaki, ME McClain, CJ Vorosmarty, and M Zalewski. 2007. *The science of flow ecology relationships: clarifying key terms and concepts*. University of Washington, Seattle-USA.

8 Hehanussa, P dan GS Haryani. 2011. *Asia Pacific Center for Ecohydrology Cibinong, Indonesia*, paper dipresentasikan di International Workshop on UNESCO New Ecohydrology Demosite Projects, Jakarta, 21-23 March, 2011.



Pendidikan Nasional. Negara-negara di kawasan Asia Pasifik saat ini masih menghadapi permasalahan ketersediaan dan rendahnya akses air bersih. Hal yang sama juga dialami Indonesia. Hingga saat ini masih ada masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan air bersih di beberapa wilayah tanah air. APCE dalam hal ini menyarankan penerapan konsep ekohidrologi untuk ketersediaan air bersih yang berkelanjutan di Indonesia.

### **Apa yang Harus Dilakukan?**

Wilayah perdesaan diperkirakan membutuhkan air sekitar 60 liter per hari, di perkotaan dibutuhkan rata-rata 110 liter air per hari, sementara di wilayah metropolitan kebutuhan air mencapai 150 liter per hari.<sup>9</sup> Perbedaan kebutuhan air di wilayah perdesaan dan perkotaan ini mencerminkan gaya hidup yang terkait dengan air. Untuk memenuhi kebutuhan air layak konsumsi, pemerintah telah melakukan serangkaian upaya di berbagai sektor. Namun, dengan jumlah penduduk sebesar 257 juta jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,49 per tahun, serta kondisi geografis yang beragam dan tingkat kemudahan aksesibilitas yang berbeda-beda, maka persoalan ketersediaan tidak hanya menyangkut metode penyediaannya saja.

Kita perlu melihat berbagai inisiatif masyarakat dalam menyediakan air, termasuk bagaimana partisipasi masyarakat kemudian direspons oleh pemerintah. Secara regulasi kita merujuk

---

9 Dewi Purningsih. 2018. "LIPI: Ekohidrologi, Solusi Ketersediaan Air Bersih Berkelanjutan di Indonesia". LIPI, 26 Mei 2018, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://www.greeners.co/berita/lipi-ekohidrologi-solusi-ketersediaan-air-bersih-berkelanjutan-di-indonesia/>)



pada standar kelayakan air yang ditetapkan pemerintah yang salah satunya dimuat dalam Permenkes 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Namun demikian, dengan masih seringnya terjadi perbedaan standar kelayakan air antara masyarakat dan para peneliti, edukasi dengan basis budaya tetap menjadi solusi alternatif yang dapat dilakukan.

Teknologi yang digunakan dalam ekohidrologi bukan sesuatu yang baru. Sebaliknya, kebaruan terletak pada konsep ekohidrologi yang memadukan empat prinsip (ekologi, hidrologi, ekoteknologi, dan budaya). Kelokalan sangat diperhatikan dalam pengelolaan air berdasarkan ekohidrologi. Konsep tersebut bertumpu pada masyarakat sebagai pengelola sumber daya air. Oleh karena itu, pendekatan ekohidrologi menggunakan pendekatan berdasarkan kearifan lokal masyarakat sekitar.

APCE telah melakukan berbagai kegiatan penelitian dan pengembangan di beberapa daerah sebagai penerapan konsep ekohidrologi untuk ketersediaan air bersih yang berkelanjutan di Indonesia. Pengembangan model dan kegiatan penelitian itu di antaranya adalah pengembangan *demosite* ekohidrologi di Jawa Barat (Waduk Saguling Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Ciamis) dan di NTT (Kabupaten Timor Tengah Utara), penelitian ekohidrologi di daerah gambut Sumatera Selatan (Kabupaten Banyuasin), penerapan pendekatan ekohidrologi dan konservasi lahan gambut di Kalimantan Tengah.

Riset ekohidrologi perlu dijadikan bagian pendidikan ekohidrologi di perguruan tinggi di Indonesia pada tingkat S-2



atau S-3, sehingga dapat mendukung pengelolaan lingkungan sumber daya air nasional secara berkelanjutan. Selain itu untuk meningkatkan kapasitas riset yang ada, lembaga penelitian dan universitas di Indonesia perlu berbagi sumber daya penelitian.

Pengembangan kapasitas riset ekohidrologi perlu diperkuat melalui kerja sama internasional sekaligus untuk membantu interaksi yang saling menguntungkan demi pengembangan keilmuan dan teknologi di Indonesia, dan melalui upaya sistematis pengembangan infrastruktur penelitian dan sumber daya peneliti ekohidrologi.

## **Profil Penulis**

Muhammad Yunus Zulkifli saat ini adalah Widyaiswara Muda pada Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Pusbindiklat LIPI); memiliki ketertarikan pada bidang *Science Communication* sebagai media *Science Diplomacy* dalam isu lingkungan hidup termasuk ekohidrologi, dan kampanye informasi dalam konteks *English for science and technology*. Penulis bisa dikontak lewat email: [muhammadyunuszulkifli1983@gmail.com](mailto:muhammadyunuszulkifli1983@gmail.com)





# Pemanfaatan *Water Banking* sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana Hidrometeorologi<sup>1</sup>

Zuhrotun Nisa'

**W**ilayah Indonesia terletak pada 60LU—110LS dan 950BT—1410BT. Posisi astronomisnya yang dilalui oleh garis khatulistiwa mengakibatkan kondisi wilayah Indonesia banyak dipengaruhi oleh aktivitas cuaca dan kecenderungan iklim matahari. Anomali iklim yang terjadi secara terus-menerus membuat

---

<sup>1</sup> Tulisan ini dikontribusikan untuk perhelatan gagasan Perempuan dan Anak dalam Webinar Sesi 7 Kongres Kebudayaan Desa (KKD), melalui *Call for Paper*.

Indonesia menjadi salah satu negara yang rentan terdampak oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, puting beliung, dan kekeringan. PBB mendefinisikan bencana hidrometeorologi sebagai sebuah proses atau fenomena atmosferik, hidrologis, atau oseanografis yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa, luka-luka atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan properti, kehilangan mata pencaharian dan pelayanan, gangguan sosial dan ekonomi, atau kerusakan lingkungan.<sup>2</sup> Berdasarkan kajian risiko bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah merumuskan 10 provinsi prioritas yang menjadi fokus kegiatan penanggulangan bencana hidrometeorologi. Agenda prioritas ini akan dimulai dengan penguatan kapasitas masyarakat di tingkat desa untuk menciptakan daerah-daerah yang tangguh bencana.<sup>3</sup>

Menurut BNPB, sepanjang tahun 2019 telah terjadi 477 kejadian bencana alam dengan 98% di antaranya didominasi oleh bencana hidrometeorologi.<sup>4</sup> Jenis bencana tersebut adalah banjir, kekeringan, puting beliung, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gempa bumi, letusan gunung api, serta gelombang pasang atau abrasi. Kerugian akibat bencana hidrometeorologi pun turut mengalami peningkatan, baik pada jumlah korban maupun fasilitas yang mengalami kerusakan. Jumlah korban jiwa yang meninggal dunia dan hilang mengalami peningkatan, yakni dari 33 orang (7

2 "Hydro-meteorological Hazards". Unesco.org, -, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/disaster-risk-reduction/natural-hazards/hydro-meteorological-hazards/>)

3 Dedi Hermon, *Mitigasi Bencana Hidrometeorologi: Banjir, Longsor, Ekologi, Degradasi Lahan, Puting Beliung, Kekeringan*. Lembang, UNP PRESS (pdf), 2018.

4 Ahda Bayhaqi . 2019. "BNPB: 1.901 Bencana Alam Terjadi Sepanjang 2019". *Liputan 6*, 31 Mei 2019, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://www.liputan6.com/news/read/3980939/bnpb-1901-bencana-alam-terjadi-sepanjang-2019>)



Februari 2018) menjadi 113 orang (7 Februari 2019). Korban luka-luka meningkat dari 71 orang menjadi 164 orang, begitu juga jumlah korban mengungsi meningkat secara signifikan dari 242.715 menjadi 326.345 orang. Penyebab meningkatnya kerugian akibat bencana hidrometeorologi ini adalah kesiapan masyarakat dan pemanfaatan ruang yang kurang mempertimbangkan keseimbangan.

Peningkatan risiko bencana dan kejadian potensial mengindikasikan perlu adanya langkah strategis yang diterapkan oleh pemerintah bersama masyarakat guna mengurangi risiko terjadinya bencana hidrometeorologis. Salah satu upaya yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologi adalah dengan memperbaiki tatanan hidrologi wilayah agar siap menghadapi dampak dari anomali iklim global. Tatanan hidrologi wilayah yang kurang siap menghadapi perubahan iklim merupakan akar dari timbulnya ancaman bencana hidrometeorologis seperti banjir dan kekeringan.<sup>5</sup>

Water Banking Method (Metode Menabung Air) bisa diterapkan untuk memperbaiki tatanan hidrologi yang dapat diterapkan di wilayah desa guna mengurangi risiko bencana hidrologis. Metode ini mengintegrasikan fungsi ekologi dari biopori, parit resapan, bak kontrol, dan sumur injeksi guna mengoptimalkan tangkapan air di wilayah pemukiman. Optimalisasi ini mampu mengurangi erosi akibat limpasan permukaan dan meningkatkan infiltrasi/penyerapan air ke dalam tanah. Apabila hal ini dilakukan secara simultan, maka akan memperkaya cadangan air tanah di wilayah pemukiman.

5 A. Indriawati, dkk., *Konservasi Air Tanah Melalui Pembuatan Biopori Sebagai Upaya Mengatasi Kekeringan di Desa Jada Bahrin Kecamatan Merawang*, Universitas Bangka Belitung, *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2015, hal. 2.



Penerapan metode ini di wilayah desa akan mampu mendukung arah kebijakan pemerintah dalam peningkatan kapasitas masyarakat desa menuju Indonesia Tangguh Bencana.

## **Kampung Glintung, Penggagas Pertama Penerapan *Water Banking***

Glintung adalah kampung padat penduduk yang berada di Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kampung Glintung merupakan sebuah kampung urban perkotaan dengan jumlah penduduk sekitar 350 jiwa. Seperti halnya kampung-kampung urban lainnya, kampung ini juga memiliki beraneka permasalahan dan juga sekaligus beragam potensi. Selain sebagai wilayah yang secara sosial memiliki angka kriminalitas tinggi, sampai tahun 2013 Glintung dikenal oleh warga kota Malang sebagai daerah langganan banjir. Jalan kampung yang posisinya rendah tidak bisa dilewati karena ketinggian air mencapai 1 meter.

Metode *Water Banking* diterapkan secara terpadu di Kampung Glintung sebagai upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana banjir.<sup>6</sup> Gerakan rehabilitasi dan rekonstruksi ini diberi nama Glintung Go Green yang diprakarsai oleh Ir. H. Bambang Irianto, ketua RW 23, Kelurahan Purwantoro. Bentuk kegiatannya berupa rekonstruksi pemanfaatan ruang wilayah dengan memperhatikan tata lingkungan yang tepat. Salah satu bentuk rekonstruksi yang diterapkan pada Glintung Go Green yaitu Gerakan Menabung Air

6 Moch Prima Fauzi. 2018. "Kampung di Malang Ini Jadi Rujukan Menabung Air di Mancanegara". *DetikNews*, 5 November 2018, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://news.detik.com/berita/d-4288201/kampung-di-malang-ini-jadi-rujukan-menabung-air-di-mancanegara>)



(GEMAR) yang diimplementasikan dengan pembuatan biopori super jumbo, parit resapan, bak kontrol resapan, sumur injeksi.<sup>7</sup> Kampung Glintung juga mengembangkan inovasi penerapan biopori super jumbo guna meningkatkan jumlah air hujan yang diresapkan ke tanah melalui biopori.

Metode Water Banking yang menggabungkan antara lubang biopori, parit resapan, dan bak kontrol memberikan peran dan fungsi masing-masing bagi penyerapan air ke dalam tanah (infiltrasi). Lubang biopori berperan untuk menangkap air hujan dan menyerapnya hingga menjadi air tanah.<sup>8</sup> Bak kontrol diciptakan untuk membedakan aliran air yang berasal dari aktivitas mandi cuci kakus dengan air yang berasal dari air hujan. Air hujan yang masuk ke dalam parit resapan dialirkan ke bak kontrol khusus resapan air hujan, dan kemudian air disaring agar air yang mengalir ke sumur injeksi milik warga menjadi lebih bersih. Hingga saat ini Kampung Glintung telah memanfaatkan 1.100 biopori dengan berbagai macam ukuran, 3 parit resapan, dan 7 sumur injeksi yang memiliki daya serap 101.300 liter per 1 x hujan. Semakin banyak biopori dan parit resapan yang dimanfaatkan akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah air yang terserap ke dalam tanah, dan secara efektif mengurangi risiko genangan banjir maupun limpasan permukaan. Berikut merupakan data daya serap air hujan berdasarkan fungsi alat konservasi di Kampung Glintung

---

7 Muhammad Aminudin. 2016. "Melongok Kampung Glintung, Dulu Kumuh dan Banjir Kini Hijau". *DetikNews*, 12 April 2016, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://news.detik.com/berita/d-3185985/melongok-kampung-glintung-dulu-kumuh-dan-banjir-kini-hijau>)

8 Juliandari, Murti. Dkk. (2012). *Efektivitas Lubang Resapan Biopori terhadap Laju Resapan*. <https://media.neliti.com/media/publications/191345-ID-efektivitas-lubang-resapan-biopori-te>



**Tabel 2.1** Data daya serap air hujan di kampung Glintung

<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>DAYA TAMPUNG (liter/unit)</b>	<b>TOTAL (liter)</b>
Biopori standar	700	20	14.000
Biopori jumbo	200	75	15.000
Biopori super jumbo	200	100	20.000
sumur injeksi	7	6.000	42.000
bak kontrol resapan	40 m		10.000
parit resapan	3	100	300
<b>total daya serap per 1x hujan</b>			<b>101.300</b>

(sumber: dokumen Kampung Glintung)

Sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat penting untuk digiatkan guna mendorong antusiasme dan peran serta semua pihak guna menjadi kunci sukses implementasi Water Banking. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebelum tahap implementasi adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya peran serta masyarakat untuk memelihara lingkungan dan memodifikasi tatanan ekologi wilayah guna mengurangi risiko bencana banjir dan kekeringan. Koordinasi yang intensif dengan melibatkan masyarakat juga dinilai mampu mendorong semangat gotong royong dalam upaya membangun desa. Implementasi Water Banking di Kampung Glintung terlebih dahulu diawali dengan sosialisasi, musyawarah, dan konsultasi terbuka yang dilakukan bersama warga dengan mengundang tenaga ahli dari Pemerintah, Rektor Universitas Brawijaya, hingga Kementerian Pertanian. Hal ini bertujuan agar langkah perbaikan ini berjalan dengan benar dan



terarah. Selanjutnya adalah tahap pemeliharaan dan pengembangan pascarekonstruksi. Pemeliharaan dilakukan untuk memastikan keseluruhan sistem berfungsi secara seimbang sehingga mampu dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tahap pengembangan pasca rekonstruksi dilakukan guna optimalisasi dan peningkatan sistem sosial yang dinilai perlu ditingkatkan.

## **Teknikalisasi *Water Banking* di Kampung Glitung**

Water Banking merupakan salah satu metode konservasi air untuk meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah dan mengurangi limpasan permukaan. Salah satu cara yang dinilai paling efektif untuk Water Banking adalah dengan memasang lubang biopori di beberapa tempat yang rawan terjadi genangan. Pemasangan lubang biopori sangat sesuai diterapkan di wilayah pemukiman khususnya yang sering mengalami permasalahan seperti banjir dan kekeringan.<sup>9</sup> Secara ekologis cara ini mampu menyeimbangkan tatanan hidrologi wilayah pemukiman yang semula rusak atau kurang berfungsi dengan baik akibat sampah dan ketidaksesuaian drainase. Hal ini bisa terjadi karena air permukaan yang dialirkan melalui lubang biopori akan menjadi cadangan air tanah (groundwater) yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.<sup>10</sup> Berdasarkan prinsip penerapannya, metode

9 Gazali, A., Fathurrahman, F., & Cahyadi, H. (2019). Penyuluhan Teknik Pembuatan Lubang Biopori dalam Pencegahan Banjir di Desa Pernalongan Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 105-110. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v4i2.892>

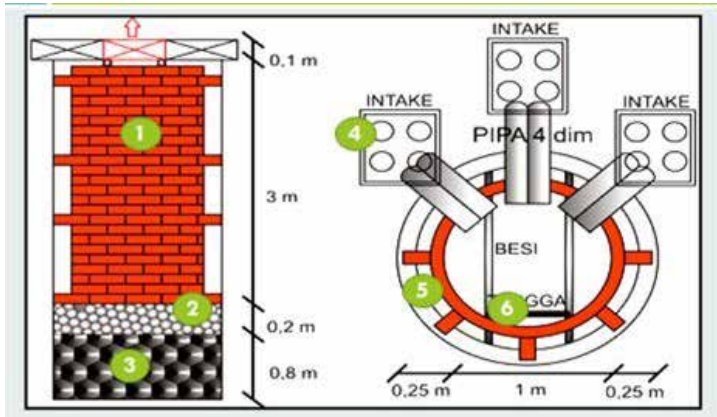
10 Sebagai pembanding, studi yang dilakukan oleh Mukhlisin ini menarik. Ia menerapkan konsep resapan biopori untuk konservasi lahan di desa Munggangsari, Kabupaten Temanggung. Mukhlisin, M. (2016). Penerapan Resapan Biopori untuk Konservasi Lahan Desa Munggangsari Kab. Temanggung, Jawa Tengah. *Wahana Teknik Sipil: Jurnal Pengembangan Teknik Sipil*, 21(01). Retrieved from <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/wahana/article/view/824>



Water Banking ini dapat diintegrasikan dengan sistem sumur injeksi untuk mengalirkan cadangan air tanah pada bak kontrol ke sumur milik warga.

Penerapan metode Water Banking dimulai dengan tahap analisis dan perencanaan. Sebelum mengaplikasikan lubang biopori, parit resapan, dan sumur injeksi, analisis terhadap kondisi geohidrologi wilayah dilakukan terlebih dahulu. Analisis ini membantu perencana untuk menentukan kedalaman biopori dan parit resapan serta lokasi untuk bak kontrol dan sumur injeksi. Setelah analisis kondisi geohidrologi wilayah, penentuan kedalaman biopori dapat disesuaikan dengan ketinggian air tanah di wilayah tersebut. Penerapan Water Banking di Kampung Glintung sendiri menyesuaikan dengan kondisi hidrogeologisnya yang dipengaruhi oleh kondisi fluvio-vulkanik dan kondisi air tanah yang dangkal. Berdasarkan kondisinya, kedalaman biopori dan sumur resapan di kampung ini cenderung tidak terlalu dalam, mulai dari 25—100 cm, ada pula yang disesuaikan dengan tinggi penampang dari media yang digunakan. Sementara kedalaman bak kontrolnya adalah 4,1m. Setelah tahap analisis kondisi geohidrologis, langkah selanjutnya adalah pembuatan skema atau gambaran sistem biopori, parit resapan, dan bak kontrol resapan air yang akan dialirkan ke sumur injeksi milik warga. Berikut ini merupakan model sistem biopori, parit resapan, dan bak kontrol yang diimplementasikan di Kampung Glintung.





**Gambar 1.** Skema sistem biopori, parit resapan, dan bak kontrol di Kampung Glintung (Sumber: dokumentasi Kampung Glintung)

Tahap selanjutnya adalah persiapan alat dan bahan untuk pembuatan biopori, parit resapan, dan bak kontrol resapan air. Setelah alat dan bahan terkumpul, proses pembuatan biopori, parit resapan, dan bak kontrol dapat dilakukan. Proses pembuatan biopori dilakukan dengan menerapkan beberapa tahapan sebagai berikut: (1) menyiapkan media biopori berupa pipa paralon maupun bak bekas yang berbentuk silinder; (2) membuat lubang silindris di tanah dengan diameter dan kedalaman sesuai dengan media biopori yang telah disiapkan; (3) menguatkan mulut lubang biopori dengan semen setebal  $\pm 2$  cm dan pengaman untuk menghindari anak kecil atau orang yang terperosok; (4) mengisi lubang dengan sampah organik seperti daun, sampah dapur, ranting pohon, dan sampah makanan dapur nonkimia; (5) mengisi kembali lubang dengan sampah organik apabila telah menyusut Sampah dalam lubang akan menyusut; (6)



jumlah lubang biopori dihitung berdasarkan besar kecil hujan, laju resapan air dan wilayah yang tidak meresap air dengan rumus = intensitas hujan (mm/jam) x luas bidang kedap air (meter persegi)/ laju resapan air perlubang (liter/jam). Sedangkan proses pembuatan parit resapan dan bak kontrol dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut: (1) menghitung intensitas hujan wilayah dan debit air yang dapat ditampung pada drainase; (2) membuat parit infiltrasi sesuai dengan perhitungan debit limpasan permukaan yang akan ditampung; (3) memastikan saluran parit infiltrasi diarahkan menuju bak kontrol resapan air; (4) memasang kawat atau pengaman di atas drainase yang dilengkapi dengan kerikil untuk mengendalikan debit air yang masuk pada parit infiltrasi; (5) membangun bak kontrol sumur resapan dengan kedalaman 3-5 m yang diintegrasikan dengan sumur injeksi warga (6) material pada bak kontrol diatur secara bertingkat yang terdiri dari material batu, kerikil, dan pasir yang digunakan untuk memfilter air yang mengalir menuju sumur injeksi.

## **Dampak Penerapan *Water Banking* di Kampung Glintang**

Penerapan *Water Banking* sebagai model pemanfaatan ruang wilayah desa untuk mengurangi risiko bencana hidrometeorologis memiliki beberapa keunggulan ditinjau dari pemanfaatan sistem biopori, parit resapan, dan bak kontrol. Keunggulan tersebut di antaranya: (1) biopori dapat diterapkan dengan mudah oleh setiap rumah tangga; (2) pemanfaatan biopori mendorong masyarakat untuk menerapkan 3R (reuse, reduce, recycle); (3) biopori dapat



pula dimanfaatkan menjadi media pengomposan sampah organik; (4) penggunaan parit resapan yang terintegrasi dengan bak kontrol mampu mengoptimalkan fungsi drainase permukaan; (5) parit resapan merupakan metode pengisian air tanah/groundwater recharge yang sangat sesuai diterapkan pada lahan dengan air tanah dangkal ; (6) sistem bak kontrol yang terintegrasi dengan sumur injeksi milik warga akan membantu memelihara persediaan air agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Berdasarkan manfaat dan keunggulannya, metode Water Banking dinilai efektif dalam mengurangi dampak terjadinya bencana hidrometeorologi karena mampu mengoptimalkan infiltrasi dan mengurangi limpasan permukaan.

Pasca penerapan metode Water Banking untuk rekonstruksi dan rehabilitasi tata ruang, Kampung Gintung menjelma menjadi kampung hijau dengan daya dukung lingkungan yang baik. Pemanfaatan 1100 biopori dan parit resapan berdampak besar terhadap penurunan angka kejadian banjir secara signifikan, baik di Kampung Glintung maupun daerah sekitarnya<sup>11</sup>. Selain risiko bencana banjir yang mulai berkurang, dampak lainnya yang dirasakan oleh masyarakat adalah munculnya beberapa mata air baru di pekarangan rumah warga. Hal ini mengindikasikan bahwa metode Water Banking tak hanya mampu mengembalikan fungsi hidrologis wilayah pemukiman, namun juga mampu mendukung kesiapan wilayah desa dalam menghadapi anomali iklim seperti

---

11 Eko Widiyanto. 2019. "Kampung Kumuh dan Langganan Banjir Itu Kini Hijau dan Kaya Sumber Air". Mongabay, 22 Maret 2019, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://www.mongabay.co.id/2019/03/22/kampung-kumuh-dan-langganan-banjir-itu-kini-hijau-dan-kaya-sumber-air>)



kemarau panjang dan curah hujan yang tinggi. Guna mendukung keberhasilan penerapan Water Banking, diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai hasil penataan ruang yang optimal. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman mengenai pentingnya kesiapsiagaan masyarakat dan tata lingkungan yang baik dalam menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di Indonesia.

## **Penutup**

Hasil penerapan Water Banking menunjukkan perubahan yang signifikan pada kondisi hidrologis Kampung Glitung. Pasca rekonstruksi dan penerapan Water Banking, terjadi penurunan risiko banjir tahunan dan munculnya mata air baru di beberapa lokasi di Kampung Glitung. Hal ini dikarenakan tatanan hidrologi wilayah Kampung Glitung telah berfungsi secara optimal akibat tingginya laju infiltrasi dan berkurangnya limpasan permukaan. Selain fungsi utama Water Banking untuk mencegah banjir dan kekeringan, terdapat beberapa keunggulan yang dimiliki metode ini, di antaranya: (1) biopori mudah diterapkan secara mandiri; (2) biopori dapat dimanfaatkan sebagai media pengomposan; (3) bak kontrol yang terintegrasi dengan sumur injeksi milik warga akan mampu memelihara cadangan air tanah untuk dimanfaatkan secara kontinu.

Strategi yang dapat dilakukan untuk optimalisasi Water Banking adalah koordinasi yang intensif dan sinergis antara masyarakat dan pemerintah di tingkat perencanaan hingga pelaksana kegiatan



guna mendukung keberhasilan Water Banking. Pemeliharaan dan pemantauan sarana Water Banking juga harus terus dilakukan secara berkala untuk memastikan sistem biopori, parit resapan, dan bak kontrol berfungsi dengan baik dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Pemanfaatan Water Banking secara berkelanjutan akan mampu menjamin kesiapan wilayah desa dalam menghadapi ancaman bencana kekeringan maupun banjir akibat intensitas hujan yang tinggi.

### **Profil Penulis**

Zuhrotun Nisa' lahir di Lamongan, 18 September 1997. Saat ini tengah menempuh pendidikan sarjana di Jurusan Geografi, Universitas Negeri Malang. Tertarik mendalami bidang lingkungan dan kebencanaan, penulis telah mengimplementasikan kajiannya dalam kegiatan pengembangan diri serta kajian ilmiah yang pernah diikuti, seperti pemakalah seminar nasional geografi maupun pelatihan assessment kebencanaan. Kontak penulis: zurhotun.nisa.1707216@students.um.ac.id





# Diversifikasi Pangan ala Masyarakat Desa

Menciptakan Kedaulatan Pangan Nasional melalui Pemuliaan Tanaman Lokal<sup>1</sup>

Rizka Nur Laily Muallifa

**D**i tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang berlangsung di banyak negara, *Food and Agriculture Organization* (FAO) menyebutkan bahwa salah satu masalah besar yang akan dihadapi adalah krisis pangan dunia.<sup>2</sup> Ancaman krisis pangan ini dipicu oleh

- 1 Tulisan ini dikontribusikan untuk perhelatan gagasan Perempuan dan Anak dalam Webinar Sesi 7 Kongres Kebudayaan Desa (KKD), melalui *Call for Paper*.
- 2 Aud/bir. 2020. "Jokowi Soroti Peringatan FAO soal Risiko Krisis Pangan". CNN Indonesia, 13 April 2020, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200413154558-532-493084/jokowi-soroti-peringatan-fao-soal-risiko-krisis-pangan>)

terhentinya rantai pasok antar negara maupun antara satu wilayah dengan wilayah lain seiring dengan meluasnya pandemi Covid-19. Negara-negara yang selama ini mengalami surplus produksi pangan tidak bisa mengeksport surplus tersebut ke negara lain. Hal yang sama terjadi di ranah domestik saat sentra-sentra produksi bahan pangan tidak bisa menjual produk pangan mereka karena berhenti atau terbatasnya sarana transportasi.

Tidak lama setelah Badan Pangan Dunia tersebut mengirim sinyal krisis pangan yang kemungkinan besar akan menimpa dunia, sejumlah ahli di Indonesia menyampaikan analisis serupa terkait kemungkinan terjadinya krisis pangan di dalam negeri. Sayangnya, Indonesia memiliki ketergantungan pangan impor dengan angka yang cukup variatif. Ekonom senior *Institute for Democracy of Economics and Finance* (INDEF), Faisal Basri, mencatat angka impor sayur dari China mencapai 67,5 persen.<sup>3</sup> Menurut data BPS, pada tahun 2017 impor jagung sebagai bahan pemanis dan gluten mencapai 290 ribu ton.<sup>4</sup> Sementara itu, impor gandum juga terus menunjukkan tren kenaikan. Pada tahun 2019, impor gandum Indonesia mencapai 10,69 ton. Jumlah ini meningkat dari tahun 2018 yang angkanya sebesar 10,10 juta ton.<sup>5</sup>

Demikian halnya dengan komoditas buah-buahan yang sebagian besar didatangkan dari luar negeri. Bahkan, untuk bahan pangan

3 Caesar Akbar. 2020. "Faisal Basri Khawatirkan Ketergantungan Impor RI dari Cina". TEMPO.CO, 22 Mei 2020, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://bisnis.tempo.co/read/1345299/faisal-basri-khawatirkan-ketergantungan-impor-ri-dari-cina>)

4 Melisa Riska Putri. 2017. "Kementan: Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian Surplus". Republika.co.id, 22 September, 2017, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/08/27/ekonomi/makro/17/09/22/owonke423-kementan-neraca-perdagangan-komoditas-pertanian-surplus>)

5 Andryanto S. 2020. "Impor Gandum Melejit Tembus 11,43 Juta Ton". *Indonesianside*.id, 28 Februari 2020, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://indonesianside.id/ekonomi/2020/02/28/impor-gandum-melejit-tembus-1143-juta-ton>)



pokok berupa beras, Indonesia juga mengandalkan impor dari negara lain seperti Thailand dan Vietnam. Terkait impor beras, misalnya, dalam waktu dekat Thailand dan Vietnam akan mengalami musim kering. Kedua negara ini pun sudah membuat kebijakan pembatasan ekspor beras.<sup>6</sup> Kebijakan pembatasan ekspor bahan pangan oleh Vietnam dan Thailand dilakukan demi mengamankan pasokan pangan dalam negeri selama pandemi Covid-19.

Lantas, bagaimana dengan Indonesia yang selama ini menggantungkan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri? Di masa serba sulit seperti sekarang, pertanyaan di atas terasa sulit dijawab. Presiden Jokowi jauh-jauh hari memerintahkan para menteri terkait untuk menghitung stok bahan pangan yang ada. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto merilis data stok beberapa bahan pangan pokok yang disebut masih bisa memenuhi kebutuhan pangan nasional hingga Desember 2020.<sup>7</sup> Meski demikian, ia juga menyampaikan kekhawatirannya terkait ancaman krisis pangan dunia yang akibatnya tidak main-main bagi negara Indonesia dengan jumlah penduduknya yang relatif banyak.

## **Kegagalan Program Swasembada Beras**

Sejak tahun 1970-an, Pemerintah Orde Baru memiliki ambisi kuat menjadikan Indonesia sebagai negara swasembada beras.

- 
- 6 Herdi Alif Al Hikam. 2020. "Impor Gandum Melejit Tembus 11,43 Juta Ton". DetikNews, 8 April 2020, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4970348/corona-bikin-negara-dunia-pelit-ekspor-pangan>)
  - 7 Lidya Yuniartha. 2020. "Menko Airlangga Hartarto jamin pasokan bahan pangan pokok aman hingga akhir tahun". *Kontan.co.id*, 16 Juni 2020, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://nasional.kontan.co.id/news/menko-airlangga-hartarto-jamin-pasokan-bahan-pangan-pokok-aman-hingga-akhir-tahun>)



Program Revolusi Hijau yang ditandai dengan pencetakan sawah-sawah baru dilakukan secara masif hampir di seluruh penjuru Indonesia. Dalam tiga puluh tahun, produksi beras nasional meningkat hingga tiga kali lipat. Indonesia sempat keluar dari daftar negara pengimpor beras terbesar menjadi negara swasembada beras, bahkan dapat melakukan ekspor beras ke negara lain.

Namun, kesuksesan itu tak bertahan lama. Sejak tahun 1990-an, Indonesia kembali menjadi negara pengimpor beras. Setelah melonjak tajam tahun 1995 dan 1996, angka impor beras Indonesia mencapai puncaknya pada 1998 bertepatan dengan lengsernya Soeharto, yaitu sebesar 2,8 juta ton. Setahun kemudian, pada 1999, impor besar Indonesia mencapai 3 juta ton. Itulah rekor impor beras tertinggi yang berlangsung hingga hari ini. Tidak hanya beras, Indonesia juga memiliki ketergantungan impor pada bahan pangan lain. Di antaranya jagung, gandum, kedelai, ubi kayu, kacang tanah, bawang putih, serta gula.<sup>8</sup> Dari tahun ke tahun, angka impor bahan pangan tersebut terus menunjukkan tren peningkatan. Bahkan di tahun 2017, Indonesia menjadi negara pengimpor gandum terbesar di seluruh dunia.<sup>9</sup>

Sebelum begitu tergantung pada beras, masyarakat di suatu daerah mengonsumsi tanaman pangan lokal yang ada di daerahnya. Sebagai contoh, masyarakat Papua memiliki pangan lokal berupa

8 Felani/MDH). 2018. "Kedaulatan Pangan, Kunci Terpenuhinya Hak atas Pangan". Komnas HAM, 19 Maret 2018, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/3/19/503/kedaulatan-pangan-kunci-terpenuhinya-hak-atas-pangan.html>)

9 Redaksi WE Online/Ant. 2018. "IPB: Indonesia Jadi Negara Pengimpor Gandum Terbesar di Dunia". Warta Ekonomi, 21 Maret 2018, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://www.wartaekonomi.co.id/read174454/ipb-indonesia-jadi-negara-pengimpor-gandum-terbesar-di-dunia.html>)



sagu. Sejak zaman nenek moyang, mereka menjadikan sagu sebagai bahan pangan pokok untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizinya. Selain itu, masyarakat di pedalaman Sumba Timur juga mengonsumsi beragam tanaman pangan lokal mulai beragam biji-bijian seperti sorgum, jawayut, dan jail, serta umbi-umbian seperti singkong, keladi, ganyong, dan lain sebagainya. Sagu di Papua serta biji-bijian dan umbi-umbian di pedalaman Sumba Timur merupakan tanaman lokal yang cocok dengan iklim daerah setempat yang cenderung kering. Masyarakat yang tinggal di daerah dengan kondisi tanah cenderung kering seperti Papua dan Sumba Timur tidak memiliki kebiasaan menanam dan mengonsumsi beras sebagai bahan pangan pokok mereka.

Namun, program swasembada beras ala Orde Baru yang dilanjutkan dengan program Beras Miskin (Raskin) di era Presiden Megawati akhirnya memaksa masyarakat di seluruh Indonesia mengenal beras. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki budaya mengonsumsi beras perlahan-lahan mengganti bahan pangan pokoknya dan dengan mudah menjadi ketergantungan dengan beras.

Program yang kini berubah nama menjadi Beras Sejahtera (Rastra) itu terbukti tidak efektif menyelesaikan masalah pangan masyarakat. Alih-alih menyejahterakan seperti yang diharapkan, program bantuan beras justru menimbulkan ketergantungan masyarakat kurang sejahtera terkait pemenuhan pangan pokok sehari-hari. Mereka mengandalkan beras bantuan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Padahal, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sejumlah kendala teknis dalam mendistribusikan program bantuan. Sering kali beras bantuan



terlambat datang dari yang semula dijadwalkan, terutama di daerah-daerah pelosok yang akses transportasinya masih sulit. Hasilnya, masyarakat sangat mungkin mengalami kelaparan dan kekurangan gizi.

Perubahan konsumsi masyarakat ke beras memicu defisit pangan. Masyarakat yang dulu bisa berswasembada pangan kini justru menggantungkan pemenuhan bahan pangan dari daerah lain. “Setelah hanya makan beras, kami kini kekurangan pangan. Jadi, harus beli dari luar,” ungkap Kepala Desa Meurumba, Kecamatan Kahaungu Eti, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur kepada jurnalis harian *Kompas*, Ahmad Arif. Kenyataan sedih dari pedalaman Sumba Timur itu menjadi bukti nyata kegagalan kebijakan penyeragaman pangan di Indonesia. Beras yang diproduksi oleh petani setempat hampir selalu tidak bisa mencukupi kebutuhan pangan masyarakatnya. Hasilnya, mereka mengandalkan beras dari daerah lain bahkan juga tidak menutup kemungkinan dari negara lain.

## **Tantangan Kedaulatan Pangan Nasional**

Diperlukan terobosan atau pencarian solusi yang serius guna meminimalkan guncangan ketahanan pangan nasional. Salah satu caranya yakni dengan mengembalikan diversifikasi atau keberagaman pangan masyarakat melalui pemuliaan tanaman pangan lokal. Sejarah mencatat, diversifikasi pangan lokal di masa silam berhasil memenuhi kebutuhan pangan dan gizi masyarakat Indonesia di seluruh penjuru Indonesia.



Dalam edisi khusus Hari Pangan Dunia 2019, Food and Agriculture (FAO) merilis analisis berjudul *Pola Pangan Sehat untuk Dunia*.<sup>10</sup> Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwasanya ada peningkatan jumlah orang yang tidak mendapatkan cukup makanan. Lebih dari 800 juta orang atau diperkirakan satu dari sembilan orang mengalami kelaparan. Meski demikian, ketahanan dan kedaulatan pangan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan jumlah pangan, namun juga kualitas pangan yang ada. Pola konsumsi pangan yang tidak sehat menjadi faktor utama yang menyebabkan timbulnya penyakit dan kematian di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, perlu adanya pembiasaan konsumsi pangan sehat dan berkelanjutan.

Dalam masyarakat agraris Indonesia, keberhasilan panen di suatu daerah sangat menentukan ketercukupan pangan dan gizi masyarakat setempat. Bencana kelaparan di Kabupaten Asmat, Bintang, hingga Pulau Seram pada 2018 silam merupakan bukti nyata dibutuhkannya kedaulatan dan kemandirian pangan di tingkat lokal. Program bantuan beras, Rastrea, justru merupakan kebijakan yang tidak tepat dan perlu segera dikaji ulang, alih-alih dijadikan solusi. Program Rastrea masih tidak beranjak dari ambisi Orde Baru ihwal swasembada beras. Padahal sejumlah kondisi sosial, budaya, ekonomi, bahkan kesehatan di masyarakat menunjukkan tidak efektifnya program bantuan tersebut. Alih-alih mencapai swasembada beras seperti yang didamba-dambakan, pengenalan dan kecenderungan penyeragaman bahan pangan pokok berupa beras justru menimbulkan sejumlah masalah.

---

10 Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations. 2019. Pola Pangan Sehat untuk Dunia #ZeroHunger.



Iklim dan kondisi tanah di masing-masing daerah di Indonesia sangat beragam. Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, dikenal dengan tanahnya yang kering dan berbatu. Secara umum, tanah dengan kondisi ini jelas tidak cocok untuk pertanian padi. Hasilnya, para petani di NTT kerap kali mengalami gagal panen padi. Mereka harus memenuhi kebutuhan pangan pokoknya dengan mendatangkan beras dari luar daerah, dan tak menutup kemungkinan juga beras impor. Kendatipun nenek moyang mereka pernah mengalami masa emas swasembada pangan, kebiasaan luhur itu tak bisa mudah diulangi. Pasalnya, masyarakat terlanjur mengubah pola konsumsinya hanya bertumpu pada beras. Mereka juga sudah jarang yang menanam tanaman-tanaman pangan lokal yang dulu menjadi sumber pangan dan gizi para leluhur. Biasanya hanya sedikit orang berusia tua yang masih mengenal dan mengonsumsi pangan lokal seperti biji-bijian dan umbi-umbian khas daerahnya. Selebihnya, anak-anak banyak yang tidak mau mengonsumsi bahkan tidak mengenal tanaman pangan lokal itu.

Dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat di masa lalu juga menunjukkan hal yang serupa. Sorgum yang dalam bahasa setempat disebut *gandrung* atau *gandrum* pernah menjadi makanan penting, khususnya bagi para peladang lahan kering.<sup>11</sup> Selain *gandrung*, masyarakat Jawa Barat di masa silam juga biasa mengonsumsi jali dan jawawut. Selain persoalan penyeragaman konsumsi beras, secara umum pola konsumsi masyarakat Indonesia juga berubah. Perubahan ini sebagai dampak dari globalisasi, urbanisasi dan peningkatan pendapatan. Konsumsi makanan yang sebelumnya

---

11 Arif, Ahmad. 2020. *Sorgum*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia



dominan bersumber dari tumbuhan pun beralih menjadi makanan tinggi kalori (juga mengandung karbohidrat, gula, lemak, dan garam dalam jumlah tinggi), makanan olahan, serta konsumsi daging yang berlebihan.

## **Menjawab Tantangan dengan Diversifikasi Pangan**

Periode pertama pemerintahan Joko Widodo mencantumkan kedaulatan pangan sebagai salah satu program utama dalam Nawacita<sup>12</sup>. Berpedoman pada itu, Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2015—2019 terkait Sasaran Kedaulatan Pangan menyebut diversifikasi pangan sebagai ujung tombak keberhasilan negara berdaulat pangan. Namun, rencana dan praktik di lapangan seolah bertolak belakang.

Pemerintah berambisi mencetak 255 ribu hektar sawah di lahan gambut Kalimantan. Padahal, menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) sawah di lahan bekas gambut memiliki risiko tinggi gagal panen. Akibatnya, proyek yang membutuhkan modal besar itu berbuntut pada kerugian yang akan dialami para petani serta kerusakan lingkungan dalam skala lebih besar. Program cetak sawah baru juga menjadi bukti kebijakan bias beras warisan Orde Baru. Kedaulatan pangan seolah hanya dinilai dari ketersediaan beras untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Padahal, jauh-jauh hari Presiden Pertama RI sudah mewanti-wanti ihwal ini.

---

12 Redaksi. 2018. "Wujudkan Nawacita dengan Menggenjot Infrastruktur Pertanian". INDONESIA.GO.ID, 24 Desember 2018, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/wujudkan-nawacita-dengan-menggenjot-infrastruktur-pertanian>)



Pidato Soekarno saat perayaan Hari Tani pada September 1965 pernah menekankan betapa pentingnya diversifikasi atau keberagaman pangan. Ia menekankan pentingnya mengubah menu makan agar tidak melulu beras. Jauh sebelum itu, Soekarno sudah menyadari betapa pentingnya menambah persediaan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi rakyat Indonesia yang jumlahnya terus bertambah. Menariknya, penambahan persediaan bahan pangan menurut Soekarno tidak seharusnya dilakukan dengan cara mencetak sawah baru. Mengingat masing-masing daerah di Indonesia memiliki kecocokan tanah yang tak sama satu sama lain. Alih-alih merekomendasikan pencetakan sawah baru di tengah kondisi lahan Indonesia yang memiliki kecocokan untuk bertanam padi sangat terbatas, perhatian Soekarno justru bertumpu pada memaksimalkan pemanfaatan lahan kering dan lahan gambut untuk pertanian dan perkebunan. Nyatanya, berbagai jenis tanaman yang khasiatnya setara dengan beras memang lebih cocok hidup di lahan kering, yakni jenis biji-bijian dan umbi-umbian. Pemanfaatan tanaman lokal sebagai sumber pangan utama di masa silam patut menjadi pelajaran penting swasembada pangan berkelanjutan yang berperspektif Nusantara. Masyarakat di berbagai daerah mampu mencukupi kebutuhan pangan dan gizi dari tanaman lokal yang mereka tanam dan panen dari lahan di wilayahnya.

Data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Indonesia mencatat, negeri ini memiliki 77 jenis tanaman pangan berkarbohidrat, 75 jenis sumber minyak, 26 jenis kacang-kacangan, 389 jenis buah-buahan, 228 jenis sayuran, dan 110 jenis rempah dan



bumbu<sup>13</sup>. Keragaman hayati ini menempati angka tertinggi kedua di dunia setelah Brasil.

## Penutup

Kedaulatan pangan akan dicapai Indonesia apabila seluruh pihak bahu-membahu mewujudkan diversifikasi atau keragaman pangan berkelanjutan dan berperspektif Nusantara. Dalam hal ini, beberapa daerah di Indonesia memiliki ikatan kebudayaan yang kuat dengan tanaman pangan lokal. Sehingga pemuliaan tanaman pangan lokal tidak sekadar sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi, tetapi juga bentuk pelestarian identitas masyarakat setempat. Dengan demikian, kedaulatan pangan nasional tidak sekadar menjadi gagasan retorik yang hanya digaungkan tanpa implementasi memadai dalam praktiknya.

Komunitas masyarakat dan organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan yang fokus pada isu pangan dan lingkungan menunjukkan hasil dari kinerjanya. Maria Loretha, pemulia dan petani sorgum bekerja sama dengan Yayasan Keragaman Hayati Indonesia (KEHATI) dan Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larantuka (Yaspensel) Keuskupan Larantuka terus memopulerkan sorgum kepada para petani di Flores dan daerah-daerah lain dengan kondisi lahan kering. Perlahan tapi pasti, masyarakat mulai menaruh perhatian pada sorgum. Selain menanam, mereka juga mengonsumsi sorgum dengan mengolahnya menjadi berbagai jenis panganan.

---

13 Tiara Dianing Tyas. 2016. "MP3L untuk Swasembada dan Kelestarian Pangan Lokal". *Tabloid Sinar Tani*, 10 Mei 2016, dilihat pada 9 Agustus 2020 (<https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/pangan/3593-mp3l-untuk-swasembada-dan-kelestarian-pangan-lokal>)



Sorgum di lahan kering seperti Flores menjadi solusi kedaulatan pangan masyarakat setempat.

Pemuliaan sorgum oleh petani Flores sudah saatnya diaplikasikan di daerah-daerah lain di Indonesia. Berbagai jenis tanaman lokal yang sudah ada sejak masa hidup leluhur di masa silam perlu kembali digali dan dianalisis secara ekonomi, sosial, budaya, serta kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai pemegang otoritas memiliki peran penting mendorong pemuliaan berbagai tanaman lokal guna menciptakan negara berdaulat pangan di masa depan. Kerja sama dengan organisasi dan tokoh masyarakat di bidang pangan dan lingkungan juga perlu terus dijalin guna mempermudah implementasi swasembada pangan di berbagai penjuru Indonesia.

## **Profil Penulis**

Rizka Nur Laily Muallifa. Jurnalis media daring dan penulis lepas. Bergiat di Komunitas Sastra Pawon. Tulisannya pernah tersiar di *Koran Tempo*, *Kompas*, *Kedaulatan Rakyat*, *Solopos*, *detik.com*, dan beberapa media daring lain. Bisa dihubungi melalui surel: [muallifa13@gmail.com](mailto:muallifa13@gmail.com).





# Epilog

**Kongres Kebudayaan Desa**

**Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A:**

**Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa**

*Ryan Sugiarto*

*(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,*

*Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)*

## **Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi**

**T**epat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusdalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggunharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer, mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19. Ruang ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggunharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa

Panggungharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggungharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggungharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggap melalui identifikasi kondisi klinis harian warganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggungharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Laporan dan Platform Dukung.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, *pasar desa.id* menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya. Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.

Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat



dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengukung gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

## **Memahami Situasi di Tengah Pandemi**

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.

Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia



miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasan. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seenaknya melakukan eksploitasi terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu)



dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjot maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19<sup>1</sup>.

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan. Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena sepihnya aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan,

---

1 Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam Majalah Basis, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.



pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyieramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK<sup>2</sup>.

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direalokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun<sup>3</sup>.

Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada

---

2 Wibowo, A. Setyo. 2020. Ibid. Lihat pula <http://www.cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan>.

3 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>.



kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggung pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tanggung karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.



Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses “pendewasaan manusia” harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya. Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* ‘siapa yang menanam akan menuai’.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkinkan manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?



## **Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru**

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan. Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.

Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku *The End of Ideology* (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal



abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang “masuk akal”, dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.

Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksanaannya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat kesadaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat kesadaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabat tangan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *ruhiah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, “Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada



sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?”

## Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.



## **Kongres Kebudayaan Desa**

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang “perlawanan” yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa, para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.



Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community, government, finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

## **Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara**

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.

Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujudkan. Istilah *kongres* yang selama ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai



bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama, culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua, culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

## **Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatahan Indonesia Baru dari Desa**

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah sengkabut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia ataukah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.

Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi



sosok ibu yang *nuturing*, *ngopeni*, *ngrumat*, *ngemonah*, *nggulowentah*, *murakabi* semua anggota keluarga.

Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa*, *para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan surga di dunia nyata, yakni ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya,



layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara*. Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia.”<sup>4</sup>

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai “*paradise*”. Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

---

4 Raharjo, T. 2013. “Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya”. <https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/>.



Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang “*new normal*” akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.

## **Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka**

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga, dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.



Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20 tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan

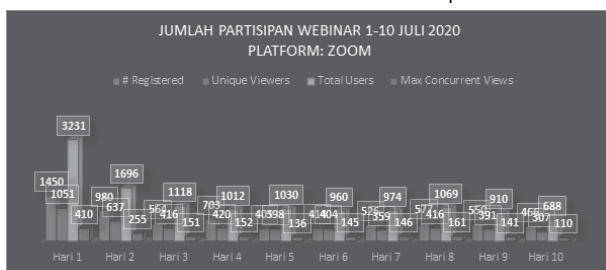


dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.



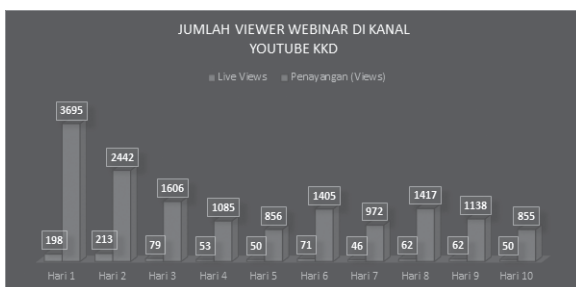
Dari sisi partisipan seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipan webinar dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.

**Tabel 1** Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom



Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:

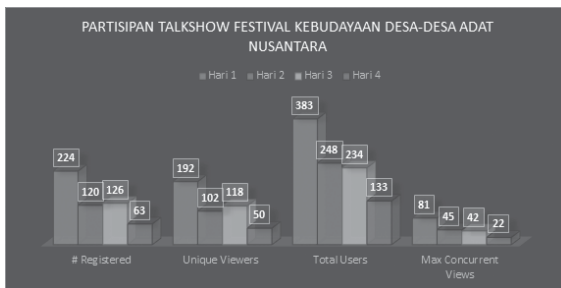
**Tabel 2** Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube



Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara.com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.

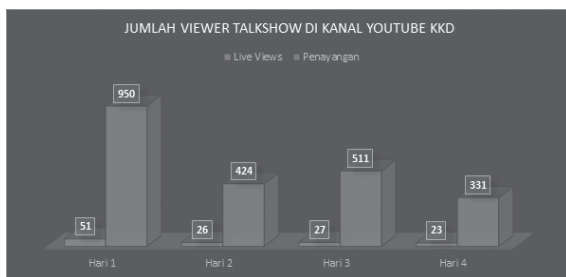
Keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Festival ini membicarakan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari 13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.

**Tabel 3** Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom



Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.

**Tabel 4** Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube



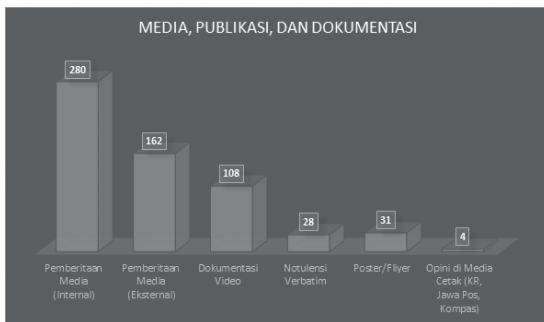
Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tetumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.



Keenam, buku putih Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman [www.kongreskebudayaandesas.id](http://www.kongreskebudayaandesas.id); 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantarai semua agenda kongres.

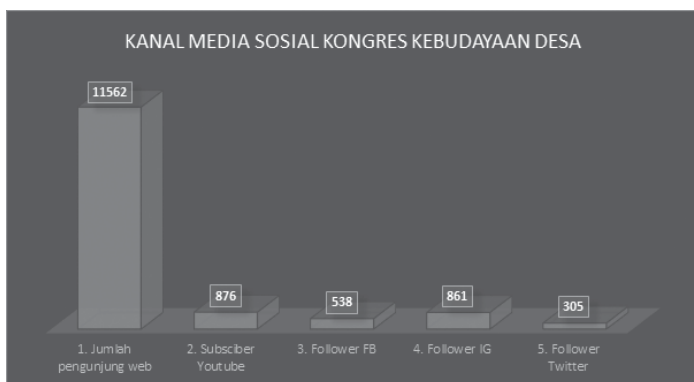
**Tabel 5** Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD



Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

**Tabel 6** Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung [www.kongreskebudayaan.desa.id](http://www.kongreskebudayaan.desa.id) sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861, dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali “syukuran”. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungksi agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi



dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community, government, finance*, dan media.

Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

## Mengintip Hasil Kongres

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *probematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian desa. Jika 75 ribu desa tergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki



kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).

\*\*\*

Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun*.

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah



Desa Panggunharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus *ngesubi* dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong, matur nuwun, hatur nuhun, matur suksme, amanai, muliate, tampiaseh, tarimo kasi, kurusumanga'epanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan!

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggunharjo, Bantul, Yogyakarta





## Deklarasi

### ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

Mengingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan



ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.

Yogyakarta, 15 Agustus 2020



## KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

### Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

## PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

### Ketua: Ryan Sugiarto

#### A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

#### Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman  
(Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

#### Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

#### Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa  
(Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia

4. Nava Anggita Ardiana

5. Yesseta Novi Sukma

#### Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoiril Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

#### Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai  
(Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati



## **B. Program: Aditya Mahendra Putra**

### **Tim Webinar**

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda

### **Tim Festival**

1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikencono
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono

### **Tim Buku dan Call Of Papers**

1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Arif Gunawan
3. Ageng Indra Sumarah
4. Agus Teriyana
5. Ahmad Yasin
6. Amanatia Junda Solikhah
7. Asy Syaffa Nada Amatullah
8. Berryl Ilham
9. Chusna Rizqati
10. Citra Maudy Mahanani
11. Rheisnayucentara
12. Dadang Ari Murtono
13. Diah Rizki Fitriani
14. Dwi Cipta
15. Dyah Permatasari
16. Fawaz
17. Fitriana Hadi
18. Fiqih Rahmawati
19. Gregorius Ragil Wibawanto
20. Irfan Afifi
21. Iswan Heriadjie
22. Ketjilbergerak
23. Kusharditya Albihafifzal
24. Prima Hidayah
25. Rio Anggoro Pangestu
26. Rofi Ali Majid
27. Suhairi Ahmad
28. Yona Primadesi







**KPK**

